

LAPORAN TAHUNAN

**PUSAT DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN**

2025

SAMBUTAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Tahunan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin) Tahun 2025 dapat diselesaikan secara akuntabel dan tepat waktu. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban instansi atas pelaksanaan program strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dijabarkan melalui Perjanjian Kinerja tahunan.

Penyusunan laporan ini berfungsi sebagai media transparansi bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam memotret implementasi sasaran dan kegiatan operasional Pusdatin sepanjang tahun 2025. Sebagai dokumen pertanggungjawaban tugas dan fungsi organisasi, laporan ini diharapkan menjadi instrumen evaluasi yang mampu mengidentifikasi masukan konstruktif demi peningkatan efisiensi serta efektivitas kinerja di masa mendatang.

Dalam mencapai target organisasi, Pusdatin senantiasa mengedepankan pendekatan strategis melalui penguatan integrasi, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektor yang diwujudkan dalam berbagai aksi nyata. Laporan ini merangkum capaian kinerja programatik, aspek pendukung organisasi, serta apresiasi dan penghargaan yang berhasil diraih selama periode berjalan.

Besar harapan kami, laporan ini dapat menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja Pusdatin dalam menjaga akuntabilitas dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Semoga dokumen ini dapat menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja Pusdatin di masa yang akan datang.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan, semoga laporan ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 10 April 2026
Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan,



Abdurochman Indrajaya Sukma., S.Kom., M.Kom

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR LAMPIRAN	8
HIGHLIGHT KEGIATAN	9
BAB I PENDAHULUAN	34
1. Visi, Misi dan Budaya Organisasi	34
2. Struktur Organisasi Serta Tugas Pokok dan Fungsi	36
BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA	38
1. Sumber Daya Manusia	38
a. Data Kepegawaian	38
b. Kebutuhan Pegawai	43
c. Peningkatan Kompetensi Pegawai	50
d. Kenaikan Pangkat dan/atau Jabatan	55
2. Sarana dan Prasarana	56
a. Lingkungan Eksternal	56
b. Lingkungan Internal	57
3. Anggaran	58
a. Realisasi Anggaran	58
4. Implementasi PUG	61
BAB III HASIL KEGIATAN	63
Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	63
IK 1. Nilai Indeks SPBE	63
IK 2. Persentase data dan sistem informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi	98
IK 3. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	101
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	106
IK 1. Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	106
IK 2. Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	109
IK 3. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	123
IK 4. Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	124
BAB IV PENUTUP	130
1. Kesimpulan	130
2. Saran	131
LAMPIRAN	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Dokumentasi kegiatan sharing knowledge terkait use case AI	9
Gambar 2 Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE) Instansi Penyelenggara Negara	10
Gambar 3 Dokumentasi kegiatan diskusi awal yang membahas tentang pengelolaan data di BPOM terkait implementasi kebijakan dan standar data di BPOM	10
Gambar 4 Penghargaan Peserta Terbaik Kedua Pelatihan di BSSN	11
Gambar 5 Dokumentasi kegiatan Pembahasan Dashboard Pre-Market	11
Gambar 6 Penyusunan Kerja Sama antara Badan POM dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan	12
Gambar 7 Dokumentasi Workshop Design Arsitektur Satu Sehat Logistik	13
Gambar 8 Dokumentasi Pembinaan Statistik Sektoral	14
Gambar 9 Dokumentasi koordinasi penanganan domain ilegal	15
Gambar 10 Dokumentasi Sosialisasi Aplikasi Katalistik	15
Gambar 11 Dokumentasi Sosialisasi Keputusan Kepala Badan Nomor 185 Tahun 2024 tentang Manajemen SDM SPBE	17
Gambar 12 Dokumentasi Penyusunan metadata statistik bersama produsen data	17
Gambar 13 Dokumentasi Pengukuhan BPOM Sebagai Bagian Dari Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Kesehatan	18
Gambar 14 Sertifikat ISO 27001:2022 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	19
Gambar 15 Dokumentasi kegiatan re-sertifikasi ISO 27001:2022 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	19
Gambar 16 Dokumentasi partisipasi PUSDATIN dalam Forum Analisis dan Berbagi Informasi CSIRT Sektor Administrasi Pemerintahan 2025	20
Gambar 17 Dokumentasi Pembinaan Kesadaran Keamanan Informasi (security awareness) dan Peningkatan Kompetensi SDM	21
Gambar 18 Dokumentasi Pembinaan Statistik Sektoral	21
Gambar 19 Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi Implementasi PDNS dan JIP 2025	22
Gambar 20 Dokumentasi Sosialisasi Standar Prosedur Operasional (SOP) Makro Manajemen Layanan Berbasis Elektronik	23
Gambar 21 Dokumentasi Verifikasi Hasil Pengisian Usulan Reviu Peta Arsitektur SPBE Tahun 2025	24
Gambar 22 Dokumentasi Kunjungan KOMDIGI dan UI terkait Layanan PDNS dan Rencana Pengembangan Ekosistem PDN	24
Gambar 23 Dokumentasi Penandatanganan Project Charter Interoperabilitas Data Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Kementerian Kesehatan	25
Gambar 24 Dokumentasi audiensi perkuatan sinergi data untuk efektivitas pengawasan obat dan makanan antara BPOM dan BPS	27
Gambar 25 Gambar Sosialisasi Implementasi BPOM Digital Office	27
Gambar 26 Penghargaan MURI atas Rekor Sistem Izin Edar Obat dan Makanan Pertama Berbasis Kecerdasan Buatan	29
Gambar 27 Juara 2 Kompetisi Siber Kementerian/Lembaga Tahun 2025	29
Gambar 28 Dokumentasi Workshop Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tahun 2025	30
Gambar 29 Dokumentasi pelatihan dan praktek keamanan arsip elektronik	31
Gambar 30 Dokumentasi pemberian sertifikat verifikasi Indeks Keamanan Informasi dan Persandian (IKASANDI) Tahun 2025	32
Gambar 31 Dokumentasi rapat pembahasan langkah antisipasi insiden siber pada aplikasi layanan publik dalam rangka menghadapi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025	32
Gambar 32 Dokumentasi Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIPT	33
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusdatin	36

Gambar 2.1 Data pegawai Pusdatin tahun 2025 berdasarkan Golongan	39
Gambar 2.2 Data pegawai Pusdatin tahun 2025 berdasarkan gender	39
Gambar 2.3 Data pegawai Pusdatin tahun 2025 berdasarkan pendidikan	40
Gambar 2.4 Data pegawai Pusdatin tahun 2025 berdasarkan usia	40
Gambar 2.5 Data pegawai Pusdatin tahun 2025 berdasarkan jabatan	41
Gambar 3.1 Dokumentasi Sosialisasi Keputusan Kepala Badan Nomor 185 Tahun 2024 tentang Manajemen SDM SPBE	64
Gambar 3.2 Keputusan Kepala Kepala BPOM Nomor 335 Tahun 2025 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan BPOM	65
Gambar 3.3 Dokumentasi Pembahasan Reviu dan Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana 2025-2029	66
Gambar 3.4 Pembahasan Reviu dan Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana 2025-2029	67
Gambar 3.5 Dokumentasi Audit Internal ISO 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi	68
Gambar 3.6 Dokumentasi Audit Eksternal ISO 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi	68
Gambar 3.7 Dokumentasi Audit Internal ISO 9001:2015 tentang Quality Management System, ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan	68
Gambar 3.8 Dokumentasi	72
Gambar 3.9 Hasil Penilaian Evaluasi SDI	74
Gambar 3.10 Dokumentasi Kegiatan interoperabilitas data dengan Kemenkes	75
Gambar 3.11 Dokumentasi Kegiatan reviu pedoman manajemen satu data di lingkungan BPOM	76
Gambar 3.12 Dokumentasi Kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan akun di BCC	77
Gambar 3.13 Dokumentasi Kunjungan Kantor Kepresidenan ke BCC Tanggal 13 Februari 2025	78
Gambar 3.14 Dokumentasi Kunjungan Tamu Acara International Symposium on Dissolution Science & Quality Drug Development pada tanggal 29 Juli 2025	79
Gambar 3.15 Dokumentasi Kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik pada Tanggal 31 Oktober 2025	79
Gambar 3.16 Dokumentasi Kunjungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada Tanggal 13 Oktober 2025	80
Gambar 3.17 Dokumentasi Kunjungan Ghana Food and Drugs Authority pada Tanggal 5 November 2025	80
Gambar 3.18 Rincian Penilaian Kinerja Simpul Jaringan Tahun 2025 berdasarkan Domain	81
Gambar 3.19 Dokumentasi Persiapan serta koordinasi terkait pemanfaatan AI dalam analisis data di BPOM.	82
Gambar 3.20 Dokumentasi Persiapan serta koordinasi terkait pemanfaatan AI dalam analisis data di BPOM.	83
Gambar 3.21 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Lintas Sektor yang dikelola oleh Pusdatin Tahun 2025	84
Gambar 3.22 Dokumentasi asesmen Indeks Keamanan Informasi dan Persandian (IKASANDI) Tahun 2025	85
Gambar 3.23 Sertifikat hasil asesmen Indeks Keamanan Informasi dan Persandian (IKASANDI) Tahun 2025	85
Gambar 3.24 Tampilan Aplikasi Safeline WAF	86
Gambar 3.25 Koordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) terkait monitoring keamanan siber melalui perangkat Trellix	87
Gambar 3.26 Grafik asesmen keamanan aplikasi per TW	88
Gambar 3.27 Dokumentasi kegiatan simulasi Business Continuity Plan (BCP) melalui Pelaksanaan Backup dan Restore Sistem Aplikasi	89
Gambar 3.28 Postingan media sosial Pusdatin terkait Awareness Keamanan Informasi	91
Gambar 3.29 Dokumentasi rapat koordinasi Keamanan Informasi bersama BSSN	91

Gambar 3.30 Infografis Imbauan Keamanan Informasi Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026	92
Gambar 3.31 Dokumentasi Asistensi Layanan Sandi Data	93
Gambar 3.32 Dokumentasi Asistensi Layanan Sandi Data	94
Gambar 3.33 Aktivitas BPOM Mobile 2018-Desember 2025	95
Gambar 3.34 Grafik Kendala/Keluhan Layanan Aplikasi Ekspor Impor TW IV 2025	96
Gambar 3.35 Distribusi Status Tiket Layanan TIK Tahun 2025	97
Gambar 3.36 Tampilan KATALISTIK	98
Gambar 3.37 Pelaksanaan Pembahasan teknologi dalam Single Login	99
Gambar 3.38 Pelaksanaan Pembahasan teknologi dalam Single Login	100
Gambar 3.39 Hasil Portal Single Sign On yang mengintegrasikan ke Aplikasi	100
Gambar 3.40 Dokumentasi Kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral	103
Gambar 3.41 Dokumentasi Kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral	103
Gambar 3.42 Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Metadata Statistik	104
Gambar 3.43 Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Standar Data Statistik	105
Gambar 3.44 Dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulanan	108
Gambar 3.45 Dokumentasi Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi bersama dengan Inspektorat	108
Gambar 3.46 Dokumentasi Rapat Pembahasan Progress Program Prioritas	108
Gambar 3.47 Rencana Strategis Pusdatin 2025-2029	110
Gambar 3.48 Rencana Kinerja Tahunan 2026	111
Gambar 3.49 Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2025	112
Gambar 3.50 Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2025	112
Gambar 3.51 Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2025	113
Gambar 3.52 Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2025	113
Gambar 3.53 Revisi Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2025	114
Gambar 3.54 Revisi Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2025	115
Gambar 3.55 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2025	116
Gambar 3.56 Revisi 1 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2025	117
Gambar 3.57 Revisi 2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2025	118
Gambar 3.58 Grafik Nilai Kinerja Organisasi Pusdatin tahun 2025	119
Gambar 3.59 Dokumentasi Evaluasi Internal TW I	121
Gambar 3.60 Dokumentasi Evaluasi Internal TW II	121
Gambar 3.61 Dokumentasi Evaluasi Internal TW III	122
Gambar 3.62 Dokumentasi Evaluasi Internal TW IV	122
Gambar 3.63 Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusdatin TA 2025	123
Gambar 3.64 SK Tim Manajemen Risiko Pusdatin Tahun 2025	124
Gambar 3.65 Dokumentasi Koordinasi Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Pusdatin Tahun 2024 Tanggal 12 Februari 2025	124
Gambar 3.66 Dokumentasi Refreshment Manajemen Risiko Tanggal 27 Februari 2025	125
Gambar 3.67 Dokumentasi Refreshment Manajemen Risiko Tanggal 11 Maret 2025	125
Gambar 3.68 Daftar Risiko Pusdatin Semester 1 Tahun 2025 di SAPAAPIP	126
Gambar 3.69 Awareness Manajemen Risiko Tanggal 23 April 2025	126
Gambar 3.70 Sosialisasi Daftar Risiko Pusdatin Tanggal 16 Juni 2025	127
Gambar 3.71 Daftar Risiko Pusdatin Semester 2 Tahun 2025 di SAPAAPIP	127
Gambar 3.72 Undangan Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2025 di Lingkungan BPOM dari Inspektur Utama	128
Gambar 3.73 Nota Dinas Laporan Koordinasi terkait Hasil Penilaian Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2025 pada Pusdatin	129

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Pegawai Pusdatin Tahun 2025	38
Tabel 2.2 Data pegawai Pusdatin tahun 2025 berdasarkan jabatan	42
Tabel 2.3 Data kebutuhan pegawai Pusdatin	46
Tabel 2.4 Data kebutuhan pegawai Pusdatin	49
Tabel 2.5 Data Pengembangan Kompetensi oleh Pusdatin	51
Tabel 2.6 Data Pengembangan Kompetensi oleh Pusdatin yang belum tercantum dalam rencana kegiatan pengembangan kompetensi	52
Tabel 2.7 Data Pengembangan Kompetensi oleh Pusdatin yang tercantum dalam rencana kegiatan pengembangan kompetensi	53
Tabel 2.8 Data Pegawai yang melakukan tugas belajar	53
Tabel 2.9 Data Kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi terkait Calon Peserta Tugas Belajar	54
Tabel 2.10 Data Pegawai yang Melakukan Uji Kompetensi tahun 2025	55
Tabel 2.11 Data Pegawai yang Melakukan Perubahan Administrasi Kepegawaian	56
Tabel 2.12 Data Kendaraan Operasional Pusdatin tahun 2025	57
Tabel 2.13 Realisasi Anggaran Tahun 2025	59
Tabel 2.14 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2025	60
Tabel 2.15 Rencana aksi kegiatan PUG Pusdatin 2025 - 2026	62
Tabel 3.1 Nilai Indeks Domain dan Indeks SDI	73
Tabel 3.2 Nilai Indeks Aspek	73
Tabel 3.3 Rekomendasi SDI	75
Tabel 3.4 Rincian Penilaian Kinerja Simpul Jaringan Tahun 2025	81
Tabel 3.5 Jumlah Insiden berdasarkan Kategori	88
Tabel 3.6 Aplikasi yang disimulasikan dan tabel terdampak	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pegawai Pusdatin 2025	134
Lampiran 2 Pengembangan Kompetensi Pegawai Pusdatin Tahun 2025	139
Lampiran 3 Laporan Survei Kepuasan Layanan TIK Tahun 2025	154

HIGHLIGHT KEGIATAN

JANUARI

1. Interoperabilitas Data & AI: Fondasi Pengawasan Obat dan Makanan

Interoperabilitas data menjadi salah satu aspek yang menjadi dasar pembuatan kebijakan di internal maupun eksternal BPOM. Pusdatin memfasilitasi pertukaran data untuk unit kerja di BPOM serta kerjasama dengan Kementerian lain seperti Kemenkes untuk pemanfaatan data PBF (Pedagang Besar Farmasi) dalam mendukung pengawasan obat dan makanan (22 Januari 2025). Selain itu, perkembangan teknologi juga diperlukan dalam analisis data, sehingga dilaksanakan *sharing knowledge* terkait *use case* AI yang bertujuan untuk mendiskusikan tahapan dan metode yang tepat dalam implementasi AI pada pemanfaatan data di BPOM (13 Januari 2025).

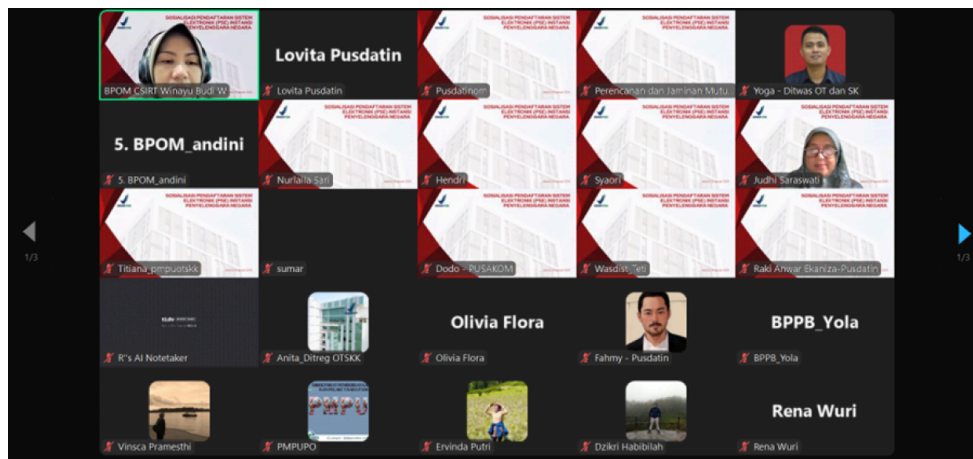


Gambar 1 Dokumentasi kegiatan *sharing knowledge* terkait *use case* AI

2. Sosialisasi Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE) Instansi Penyelenggara Negara Dalam Rangka Proses *Clearance* Mendukung Implementasi SPBE.

Dalam rangka penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman dan terintegrasi, Badan POM mewajibkan seluruh aplikasi di Badan POM untuk melakukan Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE) sesuai amanat Permenkominfo No. 10 Tahun 2015. Langkah ini krusial untuk menjamin perlindungan data, kepatuhan regulasi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan digital BPOM.

Melalui sosialisasi pada 14 Januari 2025 bersama Komdigi, BPOM berhasil meningkatkan pemahaman dan kemandirian unit kerja dalam melakukan pendaftaran PSE sebagai syarat wajib integrasi sistem **EGA SPBE** guna menjamin keamanan dan legalitas seluruh aplikasi layanan publik.



Gambar 2 Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE) Instansi Penyelenggara Negara

FEBRUARI

1. Transformasi Data BPOM: Standar Kebijakan Menuju Implementasi AI

Pada aspek kebijakan data, dilaksanakan diskusi awal yang membahas tentang pengelolaan data di BPOM terkait implementasi kebijakan dan standar data di BPOM (5 Februari 2025). Serta dilaksanakan diskusi lanjutan tahapan *assessment* terhadap sumber data BPOM yang akan dibuat menjadi *usecase* AI (17 Februari 2025).



Gambar 3 Dokumentasi kegiatan diskusi awal yang membahas tentang pengelolaan data di BPOM terkait implementasi kebijakan dan standar data di BPOM

2. Prestasi Pusdatin Sebagai Peserta Terbaik Kedua Pelatihan di BSSN

Pegawai Pusdatin mendapatkan predikat Terbaik Kedua pada Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik Angkatan ke-4 Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2025 yang diberikan pada 14 Februari 2025.



Gambar 4 Penghargaan Peserta Terbaik Kedua Pelatihan di BSSN

MARET

1. Pembahasan Dashboard Pre-Market dalam Rangka Mendukung Interopabilitas Data SPBE

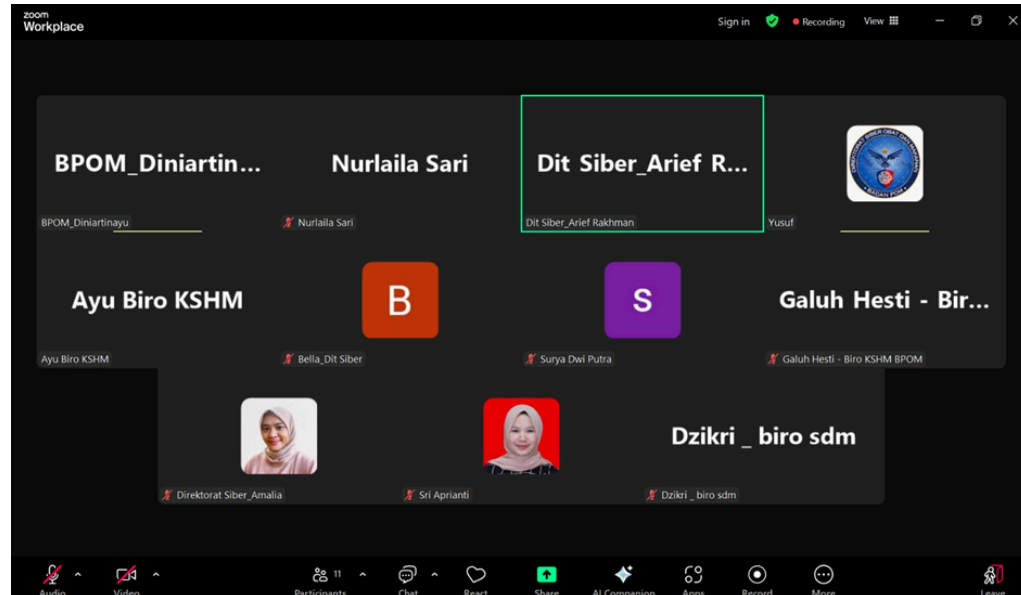
Salah satu kegiatan visualisasi data pada BPOM *Command Center* (BCC) dengan adanya pengembangan *Dashboard Pre-Market* yang akan menampilkan data agregat dan detail status perizinan edar berdasarkan hierarki proses registrasi, serta membahas penyamaan *format query view*, validasi tabel ke *Single Store*, dan simulasi migrasi data dari sumber aplikasi ke Portal Satu Data.



Gambar 5 Dokumentasi kegiatan Pembahasan Dashboard Pre-Market

2. Penyusunan Kerja Sama antara Badan POM dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan menyelenggarakan rapat tindak lanjut penyusunan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa, 4 Maret 2025. Pertemuan ini difokuskan pada implementasi teknis pemanfaatan data kependudukan guna mendukung efektivitas berbagai fungsi unit kerja di lingkungan instansi tersebut. Biro Sumber Daya Manusia (Biro SDM) menjelaskan bahwa verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) saat ini telah terintegrasi melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (SIASN BKN). Di sisi lain, Direktorat Siber menekankan perlunya akses data yang lebih spesifik seperti alamat dan foto untuk mendukung kebutuhan pemprofilan serta penegakan hukum. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) turut mengidentifikasi pentingnya pemetaan kebutuhan data serta perumusan desain data balikan yang akan disampaikan kepada pihak Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Sebagai langkah akhir, Direktorat Siber akan memimpin pembahasan teknis lanjutan sementara Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (Biro KSHM) bertugas memfasilitasi koordinasi pertemuan luring mendatang dengan instansi terkait.



Gambar 6 Penyusunan Kerja Sama antara Badan POM dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan

APRIL

1. *Workshop Design Arsitektur Satu Sehat Logistik dalam Rangka Integrasi Service Delivery dan Interoperabilitas Data Bidang Kesehatan*

Salah satu kegiatan *Integrasi Service Delivery* dan Interoperabilitas Data Bidang Kesehatan dengan ikut serta dalam *Workshop Design Arsitektur Satu Sehat Logistik* (Kementerian Kesehatan) pada tgl 16 April 2025, Rapat Koordinasi Aplikasi yang digunakan dalam rangka Pengawasan Obat tgl 24 April 2025 dengan Kedeputan 1 serta koordinasi terkait pengembangan portal Satu Data untuk mendukung interoperabilitas data. Selain itu, bentuk kerjasama yang lain antara BPOM dengan lembaga lain adalah kerjasama yang berkaitan dengan isi siaran obat dan makanan bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dilaksanakan dengan kegiatan tindak lanjut audiensi bersama KPI Pusat pada 16 April 2025.



Gambar 7 Dokumentasi Workshop Design Arsitektur Satu Sehat Logistik

MEI

1. *Pembinaan Statistik Sektoral dalam Rangka Implementasi Satu Data Indonesia*

Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan Pembinaan Statistik Sektoral sepanjang bulan Mei 2025. Pada pembinaan ini BPS menekankan pentingnya menerapkan prinsip Satu Data Indonesia (SDI), Proses Bisnis Statistik berbasis *Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)* dalam menjamin data yang berkualitas serta Sistem Statistik Nasional (SSN) untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia optimal dengan menghindari

kemungkinan terjadinya duplikasi statistik dan menciptakan sistem statistik yang andal, efektif dan efisien. Harapan dari pembinaan statistik sektoral ini untuk peningkatan kualitas dan kesiapan dalam evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral yang mendatang.



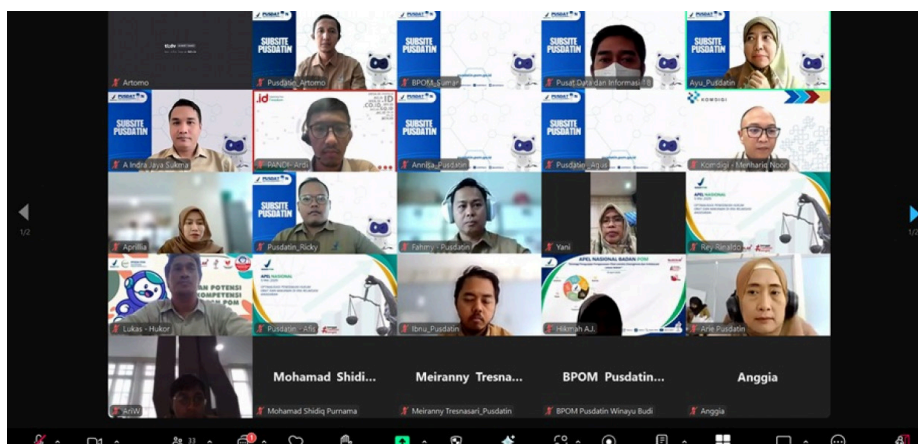
Gambar 8 Dokumentasi Pembinaan Statistik Sektoral

2. Koordinasi Lintas Sektor Integrasi Data Dukcapil dengan Kemendagri dan Data Halal dengan BPJPH

Sinergi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan dengan melaksanakan Pembahasan Perjanjian Kerja Sama antara BPOM dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri pada tgl 21 Mei 2025, Finalisasi Justifikasi dan Kajian Kebutuhan BPOM terhadap Pemanfaatan Data Kependudukan tgl 27 Mei 2025. Selain itu, Pengawasan Jaminan Produk Halal di Bidang Obat dan Makanan dengan melaksanakan koordinasi dengan BPJPH tgl 20 Mei 2025.

3. Koordinasi Lintas Sektor Penanganan Domain Ilegal Peniru pom.go.id

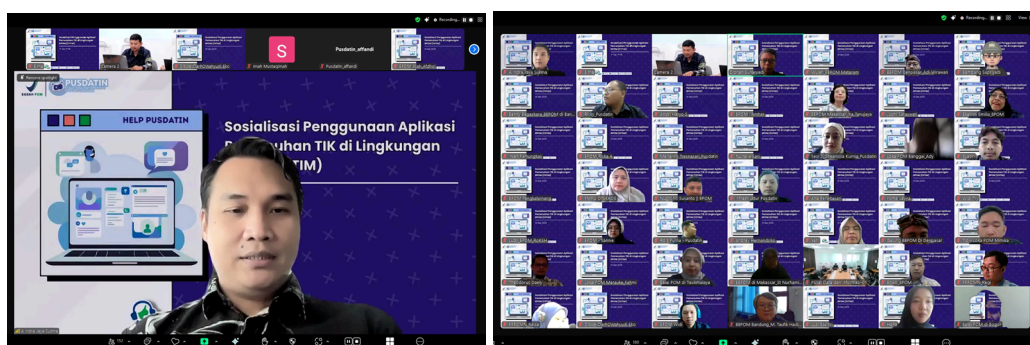
Berkaitan dengan adanya situs/web dengan domain ilegal yang mirip dengan domain pom.go.id, tanggal 6 Mei 2025 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan melaksanakan koordinasi penanganan domain ilegal tersebut dengan mengundang perwakilan dari Direktorat Pengendali Ruang Digital - Kementerian Komunikasi dan Digital, asosiasi Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), Direktorat Siber Obat dan Makanan serta Biro Hukum dan Organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama antar-instansi dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan menindak penyalahgunaan domain yang meniru situs resmi Badan POM.



Gambar 9 Dokumentasi koordinasi penanganan domain ilegal

4. Sosialisasi Aplikasi Katalistik Dalam Rangka Pelayanan Publik Pusat Data dan Informasi

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik pada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi penggunaan aplikasi Katalistik pada tanggal 15 Mei 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Unit Kerja Pusat, Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM), serta Loka POM. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait penggunaan aplikasi Katalistik sekaligus memfasilitasi kebutuhan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan kerja Badan POM. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan seluruh unit kerja dapat memanfaatkan aplikasi Katalistik secara optimal dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik



Gambar 10 Dokumentasi Sosialisasi Aplikasi Katalistik

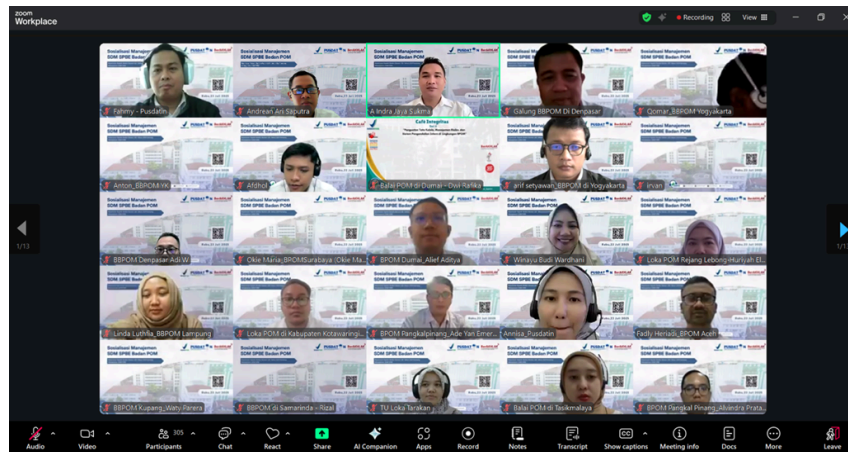
JUNI**1. Konsolidasi Data SPPG dalam Rangka Mendukung Program Makanan Bergizi Gratis**

Kegiatan sinergitas Program Makanan Bergizi Gratis dengan melaksanakan Rapat Koordinasi Dukungan Data Kelompok Penerima Manfaat dan Penerima Manfaat Program Pemenuhan Gizi Nasional pada tgl 4 Juni 2025 dan rapat bersama Kedepatian 3 pada tanggal 16 Juni 2025.

JULI**1. Sosialisasi Keputusan Kepala Badan Nomor 185 Tahun 2024 tentang Manajemen SDM SPBE**

Rabu, 23/07/2025 Pusdatin Obat dan Makanan menyelenggarakan Sosialisasi Keputusan Kepala Badan POM nomor 185 tahun 2024 tentang Manajemen SDM SPBE BPOM di lingkungan Badan POM sebagai salah satu implementasi domain SPBE. Kegiatan dibuka oleh Bapak Kepala Pusdatin dan menghadirkan Narasumber dari PPSDM, Perdhana Ari Sudewo, S.Psi., M.A.B. Kegiatan diikuti oleh kurang lebih 300 peserta, yang sebagian besar adalah JFT Pranata Komputer di Lingkungan Badan POM.

Keputusan Kepala Badan POM No. 185 tahun 2024 menjadi dasar manajemen SDM SPBE, SDM SPBE sendiri dibagi menjadi dua kategori yaitu pegawai Badan POM pada umumnya dan pejabat fungsional bidang TIK (Pranata Komputer). Tujuh spesialisasi untuk pranata komputer mencakup proses bisnis, arsitektur SPBE, aplikasi, data dan informasi, infrastruktur, keamanan, dan pengelolaan SPBE. Tujuan sosialisasi tersebut adalah agar dapat dilakukan pemetaan kebutuhan SDM SPBE hingga level spesialisasi di seluruh Indonesia untuk Badan POM.



Gambar 11 Dokumentasi Sosialisasi Keputusan Kepala Badan Nomor 185 Tahun 2024 tentang Manajemen SDM SPBE

2. Penyusunan metadata statistik bersama produsen data terhadap data prioritas RPJMN 2025 - 2029

Sebagai salah satu Prinsip Satu Data Indonesia, telah dilaksanakan penyusunan metadata statistik bersama produsen data terhadap data prioritas RPJMN 2025 - 2029. Indikator yang telah disusun pada triwulan ketiga ini yaitu Persentase Label Produk tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Memenuhi Ketentuan, Persentase Fasilitator yang dibina untuk Melakukan Pendampingan kepada UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik, Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu, Persentase Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu, dan Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman pada tanggal 1 Juli dan 9 Juli 2025. Setelah itu dilaksanakan penyusunan metadata dengan produsen data dilakukan metadata *coaching clinic* bersama Direktorat Diseminasi Statistik, Badan Pusat Statistik selaku pembina metadata statistik yang dilaksanakan pada 29 Juli 2025.



Gambar 12 Dokumentasi Penyusunan metadata statistik bersama produsen data

3. Pengukuhan BPOM Sebagai Bagian Dari Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Kesehatan

Sebagai upaya untuk memperkuat koordinasi serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan insiden siber di sektor kesehatan secara terintegrasi. Badan POM bersama Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tergabung dalam *Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Sektor Kesehatan* berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/542/2025 tentang Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Kesehatan (*Health Sector Computer Security Incident Response Team/Health CSIRT*). Pada periode yang sama, BSSN juga meresmikan sebanyak 43 Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS), yang terdiri atas 3 TTIS sektoral, 10 TTIS pemerintah pusat, 24 TTIS pemerintah daerah, dan 6 TTIS dari sektor pembangunan manusia.



Gambar 13 Dokumentasi Pengukuhan BPOM Sebagai Bagian Dari Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Kesehatan

AGUSTUS

1. Re-sertifikasi ISO 27001:2022



Gambar 14 Sertifikat ISO 27001:2022 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan



Gambar 15 Dokumentasi kegiatan re-sertifikasi ISO 27001:2022 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Pada bulan Agustus 2025, Pusdatin berhasil mempertahankan Sertifikat bertaraf internasional untuk ISO 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi melalui proses re-sertifikasi yang dilaksanakan pada 5 - 6 Agustus 2025 oleh Auditor Eksternal yang

dikeluarkan oleh PT. CBQA Global Indonesia. Ruang lingkup sertifikasi Pengelolaan Operasional dan Pengembangan Aplikasi E-Sertifikasi (*Certification of GMP- Good Manufacturing Practices, GDP - Good Distribution Practices*) dan Aplikasi Notifkos (*Cosmetic Notifications*).

2. Partisipasi PUSDATIN dalam Forum Analisis dan Berbagi Informasi CSIRT Sektor Administrasi Pemerintahan 2025

PUSDATIN berpartisipasi dalam Forum Analisis dan Berbagi Informasi Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) Sektor Administrasi Pemerintahan Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar-CSIRT dalam menghadapi insiden siber serta mendukung terwujudnya pemerintahan digital yang aman dan tangguh. Dalam forum tersebut, Kepala PUSDATIN, Abdurrochman Indrajaya Sukma, S.Kom., M.Kom., memaparkan upaya penguatan sistem keamanan informasi di lingkungan Badan POM, yang meliputi implementasi standar ISO 27001, pembentukan BPOM-CSIRT, pemanfaatan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), paparan tren serangan siber terkini, serta studi kasus penanganan insiden. Hal ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam menjaga keamanan layanan digital dan meningkatkan kepercayaan publik.



Gambar 16 Dokumentasi partisipasi PUSDATIN dalam Forum Analisis dan Berbagi Informasi CSIRT Sektor Administrasi Pemerintahan 2025

3. Pembinaan Kesadaran Keamanan Informasi dan Peningkatan Kompetensi SDM BPOM

Pada 14 Agustus 2025 di Denpasar, Badan POM bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Kesadaran Keamanan Informasi (*security awareness*) dan Peningkatan Kompetensi SDM di Balai Besar POM di Denpasar secara hybrid. Kegiatan ini merupakan implementasi perjanjian kerja sama BPOM dan BSSN yang bertujuan meningkatkan kesadaran serta keterampilan

pegawai dalam menjaga keamanan informasi. Peserta berasal dari unit kerja pusat dan daerah, dengan materi meliputi pemahaman keamanan informasi, simulasi serangan phishing dan malware, serta penguatan koordinasi internal dalam menjaga keamanan data dan sistem. Melalui kegiatan ini, diharapkan pegawai BPOM semakin mampu mengenali, mencegah, dan merespons ancaman siber secara efektif, guna menjaga keamanan layanan digital dan meningkatkan kepercayaan publik.



Gambar 17 Dokumentasi Pembinaan Kesadaran Keamanan Informasi (security awareness) dan Peningkatan Kompetensi SDM

4. Pembinaan Statistik Sektoral

Pada tanggal 28 Agustus 2025 dilakukan pembinaan statistik sektoral bersama Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan selaku produsen data, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei selaku pembina statistik sektoral BPOM dan Direktorat Diseminasi Statistik selaku pembina metadata statistik yang dilaksanakan di Badan Pusat Statistik. Pada pembinaan ini dilakukan diskusi terkait cara meningkatkan statistik sektoral berdasarkan dari hasil evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2024.



Gambar 18 Dokumentasi Pembinaan Statistik Sektoral

SEPTEMBER

1. Monitoring dan Evaluasi Implementasi PDNS dan JIP 2025

Rapat Monitoring dan Evaluasi Implementasi PDNS dan JIP dilaksanakan pada 24 September 2025 secara luring dan daring, dihadiri oleh Badan POM dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi serta mengevaluasi implementasi dan kebutuhan pengembangan infrastruktur TIK. Dalam sambutannya, Kepala Pusdatin BPOM menyampaikan bahwa sejak 2022 BPOM telah memanfaatkan layanan PDNS, termasuk data center, SPLP, dan JIP, serta saat ini tengah mengupayakan dukungan pendanaan untuk penguatan infrastruktur. Sebagai kesimpulan, diperlukan penguatan koordinasi lintas instansi, pemenuhan kebutuhan infrastruktur, optimalisasi keamanan dan backup, serta dukungan pendanaan agar implementasi PDNS dan JIP dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung transformasi digital di Badan POM.

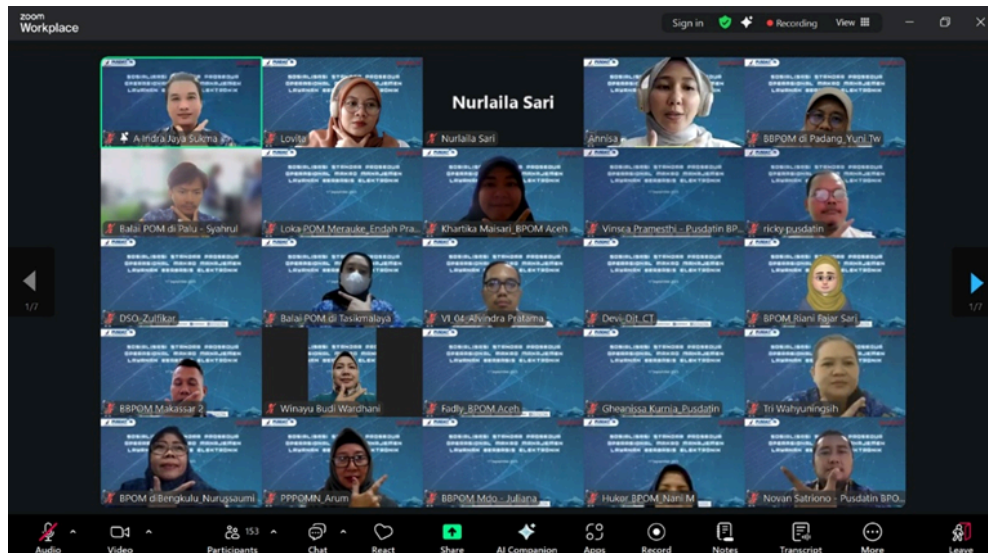


Gambar 19 Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi Implementasi PDNS dan JIP 2025

2. Sosialisasi Standar Prosedur Operasional (SOP) Makro Manajemen Layanan Berbasis Elektronik

Dalam rangka peningkatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna memperkuat tata kelola pada Domain Layanan SPBE BPOM, telah ditetapkan SOP Makro Manajemen Layanan Berbasis Elektronik Nomor POM-09.01/CFM.04/SOP.01 yang berlaku efektif sejak 8 September 2025. Pusdatin telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi SOP Makro tersebut pada hari Rabu, 17 September 2025 yang diikuti oleh kurang lebih 200 peserta dari seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM, yang terdiri atas pejabat/pegawai yang membidangi pengelolaan TIK dan

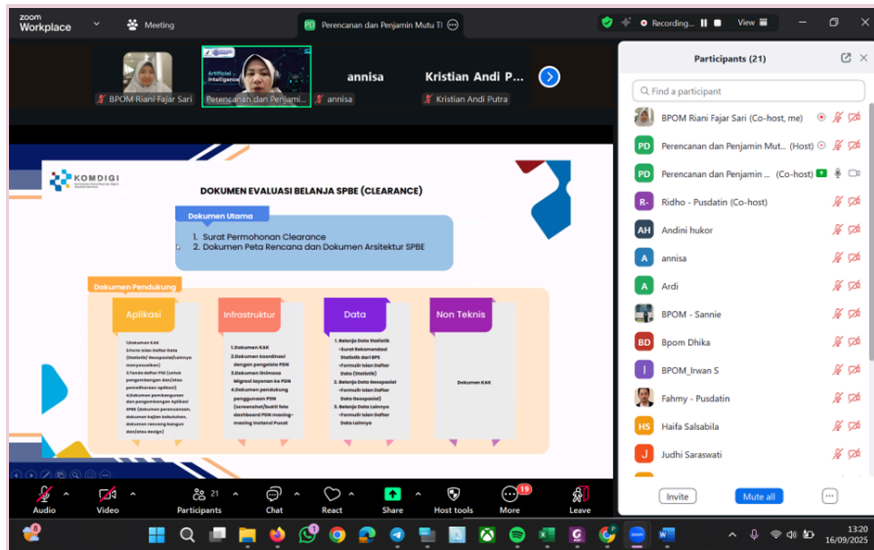
penyelenggaraan layanan SPBE. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait alur dan prosedur SOP Makro Manajemen Layanan Berbasis Elektronik, dengan ruang lingkup layanan TIK pada Aplikasi Katalistik (Klaster Layanan TIK Terintegrasi) sebagai sarana utama dalam pengelolaan permintaan layanan dan penanganan insiden TIK.



Gambar 20 Dokumentasi Sosialisasi Standar Prosedur Operasional (SOP) Makro Manajemen Layanan Berbasis Elektronik

3. Verifikasi Hasil Pengisian Usulan Reviu Peta Arsitektur SPBE Tahun 2025

Peta Arsitektur SPBE berfungsi sebagai acuan dalam penyelarasan proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan organisasi. Seiring dengan dinamika perkembangan kebutuhan organisasi, perubahan kebijakan, serta kemajuan teknologi informasi, diperlukan penyesuaian terhadap Peta Arsitektur SPBE agar tetap relevan dan mampu mendukung pencapaian tujuan strategis instansi. Oleh karena itu, unit kerja di lingkungan BPOM telah melakukan pengisian usulan reviu Peta Arsitektur SPBE Tahun 2025 sebagai bagian dari proses perencanaan dan pengembangan SPBE. Selanjutnya untuk memastikan bahwa usulan reviu yang disampaikan telah sesuai dengan kebutuhan organisasi, selaras dengan kebijakan nasional SPBE, serta memenuhi prinsip keterpaduan dan interoperabilitas, perlu dilakukan kegiatan verifikasi terhadap hasil pengisian usulan tersebut. Kegiatan verifikasi yang dilaksanakan pada bulan September dan November 2025 diharapkan dapat menghasilkan dokumen Peta Arsitektur SPBE yang lebih komprehensif, konsisten, dan implementatif dalam mendukung transformasi digital di lingkungan BPOM.



Gambar 21 Dokumentasi Verifikasi Hasil Pengisian Usulan Reviu Peta Arsitektur SPBE Tahun 2025

OKTOBER

1. Kunjungan KOMDIGI dan UI terkait Layanan PDNS dan Rencana Pengembangan Ekosistem PDN



Gambar 22 Dokumentasi Kunjungan KOMDIGI dan UI terkait Layanan PDNS dan Rencana Pengembangan Ekosistem PDN

Dalam rangka mendukung penguatan ekosistem Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), Badan POM melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) menerima kunjungan dan melaksanakan diskusi bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) serta Universitas Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai potensi pusat data

B POM serta membahas arah pengembangan ekosistem PDNS ke depan. Pertemuan dibuka oleh arahan dari Kepala Pusdatin, Bapak A. Indrajaya Sukma, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi. Dalam pembahasan, disampaikan bahwa B POM memanfaatkan virtualisasi berbasis Proxmox sebagai solusi open source, serta mendorong penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk pertukaran data. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin kolaborasi yang lebih erat antar instansi serta meningkatkan kesiapan B POM dalam mendukung pengembangan pusat data nasional yang terintegrasi, aman, andal, dan berkelanjutan.

2. *Project Charter* Interoperabilitas Data Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Kementerian Kesehatan dalam rangka kerjasama B POM dan Kementerian Kesehatan

Penandatanganan *Project Charter* Interoperabilitas Data Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Kementerian Kesehatan pada tanggal 6 Oktober 2025 dalam rangka kerjasama B POM dan Kementerian Kesehatan sebagai bentuk implementasi kegiatan Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) yang salah satunya bertujuan Meningkatkan efisiensi pertukaran data antara B POM dan Kemenkes untuk mendukung kolaborasi pengawasan obat dan makanan.



Gambar 23 Dokumentasi Penandatanganan *Project Charter* Interoperabilitas Data Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Kementerian Kesehatan

3. BPOM dan BPS Perkuat Sinergi Data untuk Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat sinergi dalam bidang penyediaan dan pemanfaatan data melalui audiensi antara Kepala BPOM dengan Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, di Ruang Rapat Pimpinan BPOM, Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2025. Pertemuan ini bertujuan memperdalam kerja sama sinkronisasi data di bidang obat dan makanan guna mendukung kebijakan berbasis data yang lebih akurat dan terintegrasi.

Dalam audiensi yang berlangsung secara luring tersebut, Kepala BPOM didampingi oleh jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama, antara lain Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan; Deputi Bidang Penindakan; Sekretaris Utama; Inspektur Utama; Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (Pusakom); serta Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin).

Kerja sama antara BPOM dan BPS sebelumnya telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang “Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Bidang Pengawasan Obat dan Makanan”. Melalui kerja sama ini, kedua lembaga berkomitmen meningkatkan kualitas data nasional, khususnya dalam mendukung pengawasan obat dan makanan.

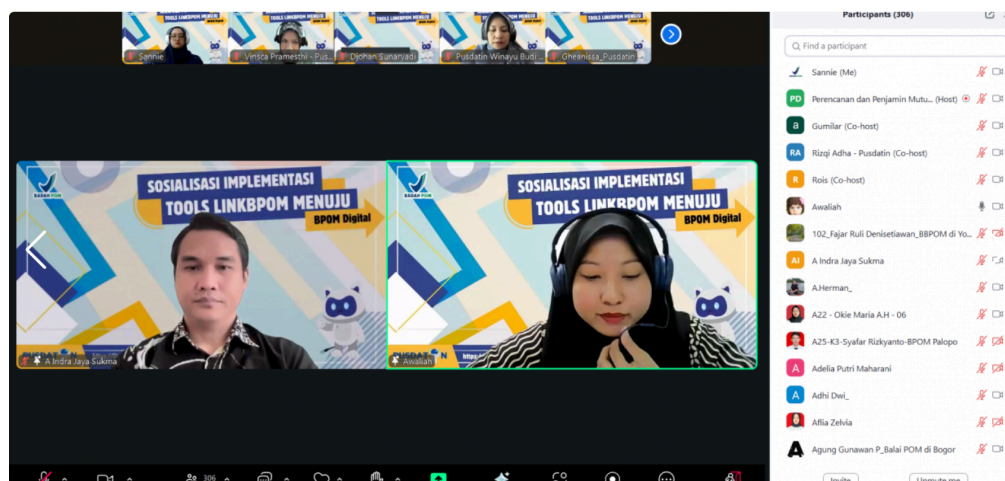
Beberapa implementasi kerja sama yang telah berjalan antara lain penyusunan metodologi sampling untuk Survei Kesadaran dan Kepuasan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan, pemanfaatan data statistik sektoral melalui aplikasi BPS seperti Silastik dan Romantik, serta dukungan data BPOM untuk persiapan Sensus Ekonomi 2026. BPOM juga telah mengalirkan data terkait jumlah industri farmasi dan pedagang besar farmasi di DKI Jakarta melalui Portal Satu Data BPOM.

Selain membahas sinkronisasi data, audiensi juga menyoroti pentingnya pembinaan sumber daya manusia pada jabatan fungsional pranata komputer dan statistisi di lingkungan BPOM. Saat ini, BPOM memiliki 255 pranata komputer dan 9 statistisi yang memerlukan pembinaan serta peningkatan kapasitas dari BPS selaku instansi pembina jabatan fungsional tersebut. BPOM berharap kerja sama dengan BPS dapat terus ditingkatkan, baik melalui integrasi sistem data berbasis *Application Programming Interface* (API), peningkatan kapasitas SDM, maupun kolaborasi dalam pengembangan metodologi survei nasional.



Gambar 24 Dokumentasi audiensi perkuatan sinergi data untuk efektivitas pengawasan obat dan makanan antara BPOM dan BPS

4. Sosialisasi Implementasi BPOM Digital Office



Gambar 25 Gambar Sosialisasi Implementasi BPOM Digital Office

Berdasarkan peminatan atas pemanfaatan aplikasi BPOM *Digital Office* (link.pom.go.id) yang cukup tinggi pada seluruh unit kerja di Badan POM secara nasional, Pada 29 Oktober 2025, Pusdatin melakukan sosialisasi sekaligus pemberian akses pada modul-modul aplikasi kepada seluruh pengguna secara umum yang sebelumnya pada beberapa modul masih bersifat tertutup untuk meminimalisir penyalahgunaan fungsi aplikasi BPOM *Digital Office*.

Adapun pada kesempatan tersebut yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh unit kerja di lingkungan Badan POM, dilakukan sosialisasi atas modul aplikasi antara lain :

- Modul Daftar Hadir Kegiatan, untuk melakukan pembuatan jadwal dinamis dan formulir pengisian absensi daftar hadir suatu kegiatan yang dapat menghasilkan dokumen kebutuhan administrasi dan data dukung pelaksanaan kegiatan. Setiap jadwal daftar hadir yang dibuat

dapat dibagikan kepada calon peserta kegiatan untuk kemudian melakukan pencatatan kehadiran secara mandiri pada perangkat peserta.

- Modul *Schedule* (jadwal), merupakan modul lanjutan terhadap pengumpulan seluruh data kegiatan daftar hadir yang dibuat dan disajikan dalam format kalender untuk mempermudah monitoring kegiatan yang sedang dan akan datang pada setiap unit kerja.
- Modul *Link Tree*, untuk melakukan pembuatan kumpulan tautan pada satu halaman dinamis yang dapat dikelola mandiri, untuk mempermudah penyebaran informasi yang dibutuhkan oleh unit kerja maupun peserta atau responden suatu kegiatan.
- Modul *Short URL*, untuk melakukan pembuatan tautan pendek atas tautan utama yang bersifat panjang, untuk mempermudah pembagian informasi.
- Modul *Survei*, untuk melakukan pembuatan formulir dinamis berupa angket survei yang dapat dikelola secara mandiri dari sisi penyusunan pertanyaan dan kategori jawaban untuk kemudian dibagikan kepada peserta. Modul ini dapat dimanfaatkan juga sebagai pengumpulan saran dan masukan pada pelaksanaan kegiatan, dan dapat menghasilkan indeks kepuasan atas kegiatan yang dilakukan.
- Modul *Watermark PDF*, untuk penambahan *text watermark* atas file PDF yang dimiliki oleh pengguna. Modul ini umumnya dimanfaatkan dalam pemberian *watermark* seperti dokumen rancangan, rahasia, kearsipan, dan lain sebagainya.
- Modul *Dashboard*, untuk memberikan informasi atas pemanfaatan keseluruhan aplikasi dalam format chart atau grafik yang mudah dipahami.

NOVEMBER

1. Penghargaan MURI atas Rekor Sistem Izin Edar Obat dan Makanan Pertama Berbasis Kecerdasan Buatan

Pada tanggal 28 November BPOM mendapatkan Penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atas rekor Sistem Izin Edar Obat dan Makanan Pertama Berbasis Kecerdasan Buatan. Keterlibatan Pusdatin pada pencapaian penghargaan ini berupa dukungan dan pengawalan dalam pengembangan sistem tersebut. Pusdatin juga membantu berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menyediakan server dan GPU yang cukup untuk menjalankan sistem kecerdasan buatan. Pada tanggal 3 Desember 2025 sistem ini juga sudah didaftarkan hak cipta nya ke Kementerian Hukum.



Gambar 26 Penghargaan MURI atas Rekor Sistem Izin Edar Obat dan Makanan Pertama Berbasis Kecerdasan Buatan

2. Prestasi BPOM pada Kompetisi Siber Kementerian/Lembaga Tahun 2025

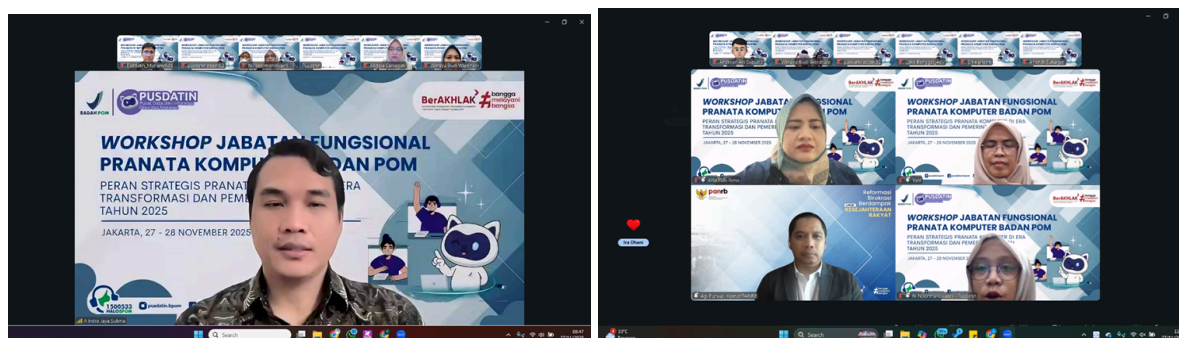
Pada bulan November 2025, Badan POM meraih Juara II pada kompetisi siber Kementerian dan Lembaga Republik Indonesia kategori *Capture the Flag* (CTF). Prestasi ini menjadi bukti komitmen BPOM dalam memperkuat kapasitas dan ketangguhan keamanan siber di lingkungan instansi pemerintah. Capaian tersebut mencerminkan kompetensi, kolaborasi, serta kesiapan tim dalam menghadapi tantangan dan ancaman di ruang digital, sekaligus mempertegas peran BPOM dalam mendukung transformasi digital yang aman dan terpercaya.



Gambar 27 Juara 2 Kompetisi Siber Kementerian/Lembaga Tahun 2025

3. Pelaksanaan *Workshop* Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tahun 2025

Pada tanggal 27-28 November 2025 telah dilakukan *Workshop* Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tahun 2025 di Lingkungan BPOM dengan tema “Peran Strategis Pranata Komputer di Era Transformasi dan Pemerintah Digital” secara *hybrid* (luring dan daring). *Workshop* dilaksanakan pada Kegiatan Terpadu Pusat-Pusat BPOM dengan tema “Membangun Ekosistem Unggul untuk Pengawasan Obat dan Makanan yang Modern dan Andal Menuju Indonesia Emas 2045”. Kegiatan tersebut dihadiri 265 peserta yang merupakan Fungsional Pranata Komputer, Statistisi, dan Sandiman unit Pusat dan UPT di seluruh Indonesia. Narasumber kegiatan workshop ini merupakan pembicara dari lintas sektor yang menangani bidang jabatan dan pekerjaan terkait Pranata Komputer, beliau merupakan pakar atau ahli dari Organisasi Pranata Komputer Indonesia (Ketua PrakomID) dan Asisten Deputi Perumusan Strategi dan Kebijakan Transformasi Digital Pemerintah - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi) serta dari internal Pusdatin yang merupakan perwakilan dari fungsi-fungsi di Pusdatin. Penyelenggaraan kegiatan ini sebagai langkah peningkatan kompetensi dan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait dengan peta rencana TIK di lingkungan BPOM.



Gambar 28 Dokumentasi *Workshop* Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tahun 2025

4. Narasumber Pelatihan dan Praktek Keamanan Arsip Elektronik

Pada 19 November 2025, Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan menghadiri kegiatan pelatihan dan praktek keamanan arsip elektronik sebagai narasumber pada kegiatan tersebut. Kegiatan ini merupakan kolaborasi BPOM bersama Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan (YPPK) untuk meningkatkan pemahaman terkait keamanan informasi pada pengelolaan arsip elektronik.



Gambar 29 Dokumentasi pelatihan dan praktek keamanan arsip elektronik

5. Audit Internal Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi Tahun 2025 Ruang Lingkup Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Telah dilaksanakan Audit Internal Sistem Manajemen POM Terintegrasi Tahun 2025 pada tanggal 4 s.d. 5 November 2025 yang mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, serta ISO 27001:2022 khusus untuk Pusdatin sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 316 Tahun 2025 tentang Penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi pada BPOM.

DESEMBER

1. Capaian Sertifikasi IKASANDI BPOM Tahun 2025

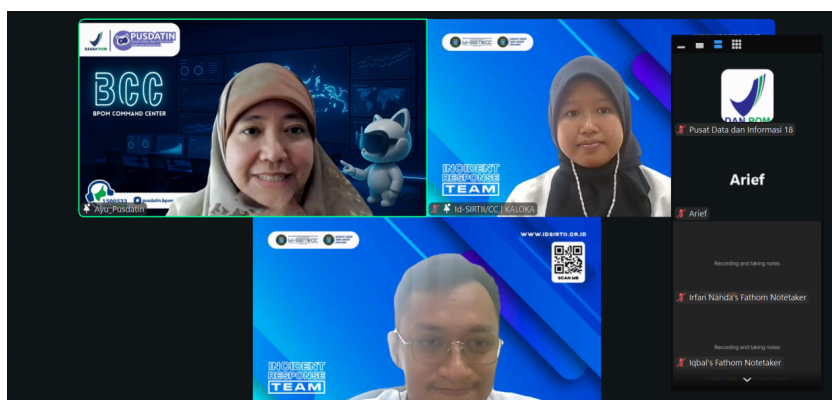
Badan POM meraih sertifikat verifikasi Indeks Keamanan Informasi dan Persandian (IKASANDI) Tahun 2025 dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan capaian Indeks Keamanan Siber Level 5 (Inovatif) dan Indeks Penyelenggara Persandian Level 4 (Terkelola). Pada kesempatan tersebut, Badan POM juga berhasil masuk dalam 10 Kementerian/Lembaga terbaik yang secara simbolis menerima sertifikat hasil IKASANDI Tahun 2025. Capaian ini menjadi bukti komitmen Badan POM dalam memperkuat keamanan siber dan perlindungan data, sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan digital serta menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan.



Gambar 30 Dokumentasi pemberian sertifikat verifikasi Indeks Keamanan Informasi dan Persandian (IKASANDI) Tahun 2025

2. Antisipasi Insiden Siber Layanan Publik BPOM Menjelang Nataru 2025

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (PUSDATIN) BPOM menyelenggarakan rapat pembahasan langkah antisipasi insiden siber pada aplikasi layanan publik dalam rangka menghadapi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 pada tanggal 23 Desember 2025. Rapat yang dilaksanakan secara daring ini melibatkan Direktorat Operasi Keamanan Siber BSSN serta unit kerja terkait di lingkungan BPOM, guna memastikan kesiapan dan keberlangsungan layanan publik selama periode libur panjang yang berpotensi meningkatkan risiko gangguan keamanan siber. Dalam rapat tersebut, BPOM melalui Pusdatin memaparkan kondisi insiden siber yang terjadi sepanjang tahun 2025 serta potensi risiko yang perlu diantisipasi. BSSN turut memberikan masukan terkait penguatan koordinasi, kesiapan operasional, serta mekanisme penanganan dan pelaporan insiden. Melalui kegiatan ini, BPOM dan BSSN menegaskan komitmen bersama dalam menjaga keamanan sistem elektronik serta memastikan layanan publik tetap aman, andal, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

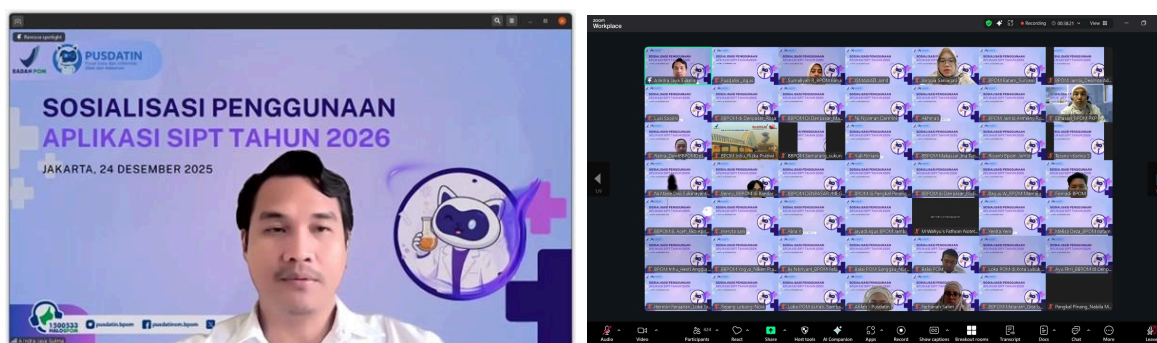


Gambar 31 Dokumentasi rapat pembahasan langkah antisipasi insiden siber pada aplikasi layanan publik dalam rangka menghadapi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025

3. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIPT

Dalam rangka mendukung kesiapan implementasi Aplikasi SIPT yang akan dimanfaatkan pada Tahun 2026, Pusdatin BPOM melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIPT pada tanggal 24 Desember 2025 yang diikuti oleh 839 peserta dari unit teknis pusat dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di daerah melalui aplikasi Zoom. Adapun materi sosialisasi menekankan pada penyampaian hasil pengembangan yang telah dilakukan di 2025 serta penyamaan persepsi dan peningkatan pemahaman pengguna terhadap mekanisme entri data pada aplikasi.

Diharapkan melalui kegiatan ini, pemanfaatan Aplikasi SIPT dalam mendukung kegiatan pengawasan *post-market* dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan selaras dengan kebijakan transformasi digital BPOM.



Gambar 32 Dokumentasi Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIPT

BAB I PENDAHULUAN

1. Visi, Misi dan Budaya Organisasi

Badan POM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029 yang menjadi landasan utama dalam menavigasi serta mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan Badan POM selama lima tahun ke depan, dengan tujuan utama melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam penyusunan visi tersebut, Badan POM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu *“Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”*.

Berdasarkan hal tersebut, Visi yang diusung Badan POM dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi Badan POM tersebut menjadi wujud komitmen Pusdatin dalam menjalankan perannya sebagai unit pendukung Badan POM, khususnya dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengawasan obat dan makanan.

Misi Badan POM dalam rangka mewujudkan visi Badan POM Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Berdasarkan misi Badan POM tersebut serta fungsi strategis Pusdatin di bidang infrastruktur TIK, sistem informasi, serta tata kelola data dan informasi, dirumuskan misi Pusdatin yang selaras dan tercantum dalam Misi Badan POM Nomor 4, yaitu: **“Pengelolaan pemerintahan yang bersih,**

efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan”.

Dalam rangka mewujudkan visi serta mengimplementasikan misi, Badan POM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025–2029. Tujuan strategis tersebut disusun untuk merespons secara komprehensif berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi, serta selaras dengan tugas dan fungsi Badan POM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Adapun tujuan Badan POM untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu;
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu;
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM;
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; dan
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, tujuan pelaksanaan program dan kegiatan Pusdatin diselaraskan dengan Tujuan BPOM Nomor 5, yaitu: **“Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima”**. Penetapan tujuan Pusdatin merupakan upaya untuk menerjemahkan visi dan misi ke dalam arah strategis yang terukur. Tujuan tersebut menjadi landasan dalam perencanaan program dan kegiatan, sekaligus sebagai pedoman dalam penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, serta penerapan tata kelola data dan informasi yang andal guna mendukung efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

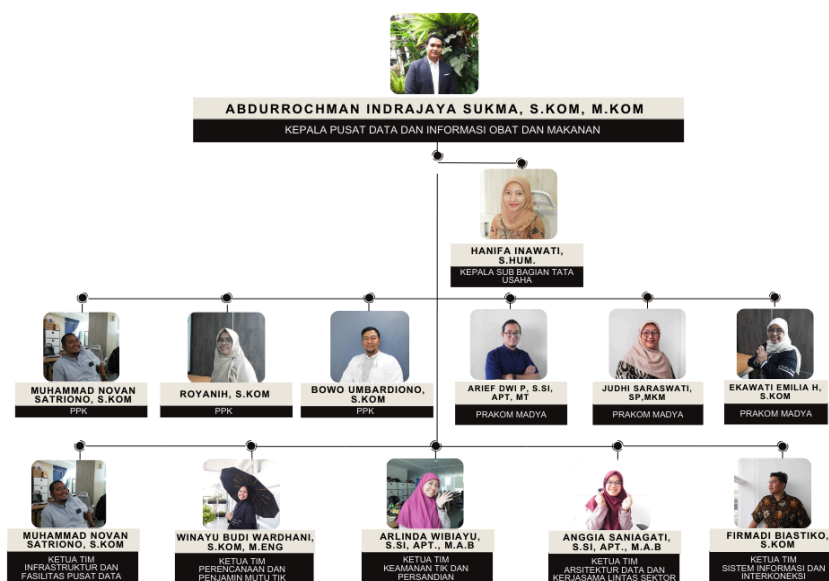
Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Obat dan Makanan memandang budaya organisasi sebagai pilar utama dalam mewujudkan tata kelola data yang berintegritas dan inovatif. Melalui filosofi BerAKHLAK, seluruh insan Pusdatin mengadopsi budaya Berorientasi Pelayanan yang menempatkan kepuasan pemangku kepentingan sebagai prioritas utama melalui penyediaan informasi yang ramah, cepat, dan solutif. Budaya Akuntabel tercermin dalam setiap proses pengelolaan data yang menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab, memastikan setiap aset digital negara dikelola secara efektif guna mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Dalam membangun organisasi pembelajar (*learning organization*), kami memupuk budaya Kompeten yang mendorong setiap pegawai untuk terus meningkatkan kapabilitas diri demi menghadapi dinamika teknologi informasi yang sangat cepat. Lingkungan kerja yang Harmonis senantiasa dijaga melalui sikap saling menghargai dan tolong-menolong tanpa memandang latar belakang, menciptakan suasana kerja kondusif yang mendukung produktivitas. Rasa Loyal diwujudkan melalui dedikasi tinggi dalam menjaga kerahasiaan data strategis negara serta menjaga nama baik instansi di setiap lini pengabdian.

Semangat Adaptif telah menjadi napas organisasi dalam berinovasi dan bersikap proaktif terhadap perubahan standar teknologi global. Budaya ini kemudian diperkuat dengan aspek Kolaboratif, di mana kami membuka ruang seluas-luasnya bagi sinergi lintas unit maupun instansi untuk menggerakkan pemanfaatan sumber daya data secara terpadu. Dengan internalisasi nilai-nilai ini, Pusdatin Obat dan Makanan berkomitmen untuk terus bertransformasi menjadi pusat informasi yang kredibel, modern, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia.

2. Struktur Organisasi Serta Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Pusdatin, Kepala Pusdatin dibantu oleh 1 (satu) orang pejabat struktural sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 5 (lima) ketua tim selaku pelaksana, 3 (tiga) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 4 (empat) Pranata Komputer Madya. Berikut struktur organisasi Pusdatin pada tahun 2025 :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusdatin

Dalam era transformasi digital, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Obat dan Makanan menjadi tulang punggung yang memastikan pengawasan obat dan makanan berjalan secara presisi, cepat, dan transparan. Pusdatin memegang mandat utama untuk melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan guna menciptakan ekosistem data yang terintegrasi dan aman.

Untuk mewujudkan mandat tersebut, Pusdatin menyelenggarakan fungsi-fungsi strategis sebagai berikut:

- 1) Infrastruktur TIK: Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi meliputi tata kelola dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- 2) Sistem Informasi Layanan Internal: Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem informasi layanan internal meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi layanan internal dan informasi publik.
- 3) Sistem Informasi Layanan Eksternal: Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem informasi layanan eksternal meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi layanan eksternal dan integrasi dan interkoneksi sistem informasi.
- 4) Tata Kelola Data dan Informasi: Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola data dan informasi meliputi arsitektur dan layanan berbagi pakai data dan informasi.
- 5) Perencanaan TIK: Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi tata kelola standar kebijakan, penjaminan mutu, monitoring, dan evaluasi standar teknologi informasi dan komunikasi.
- 6) Keamanan TIK: Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan teknologi informasi dan komunikasi meliputi penanganan insiden dan pemenuhan maturitas insiden keamanan siber.

BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

a. Data Kepegawaian

Sumber daya manusia (SDM) merupakan unsur yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan suatu organisasi. SDM memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan organisasi serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berperan sebagai penggerak, pemikir, sekaligus perencana dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), diperlukan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, kompetensi, serta keterampilan profesional yang memadai. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pusdatin dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

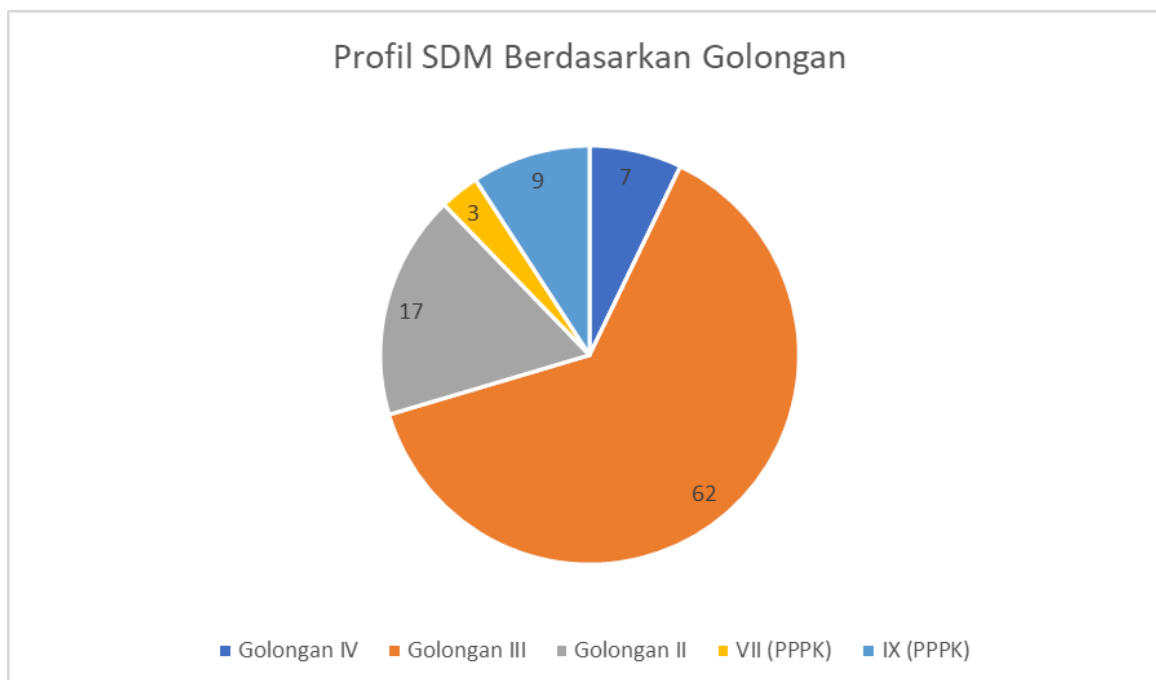
Seiring dengan meningkatnya dinamika kerja serta bertambahnya beban tugas yang diemban oleh Pusdatin, diperlukan dukungan sumber daya manusia tambahan. Oleh karena itu, keberadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) menjadi salah satu upaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin, sehingga kinerja organisasi dapat berjalan secara optimal.

No	Jenis ASN	S2	Apoteker	S1 Lainnya	D3	SLTA	Laki-laki	Perempuan
1	PNS	7	1	34	16	1	32	27
2	CPNS	-	-	19	4	-	18	5
3	PPPK	-	-	9	3	-	8	4
4	PPPK Paruh Waktu	-	-	-	-	1	1	-
Total		7	1	62	23	1	59	36

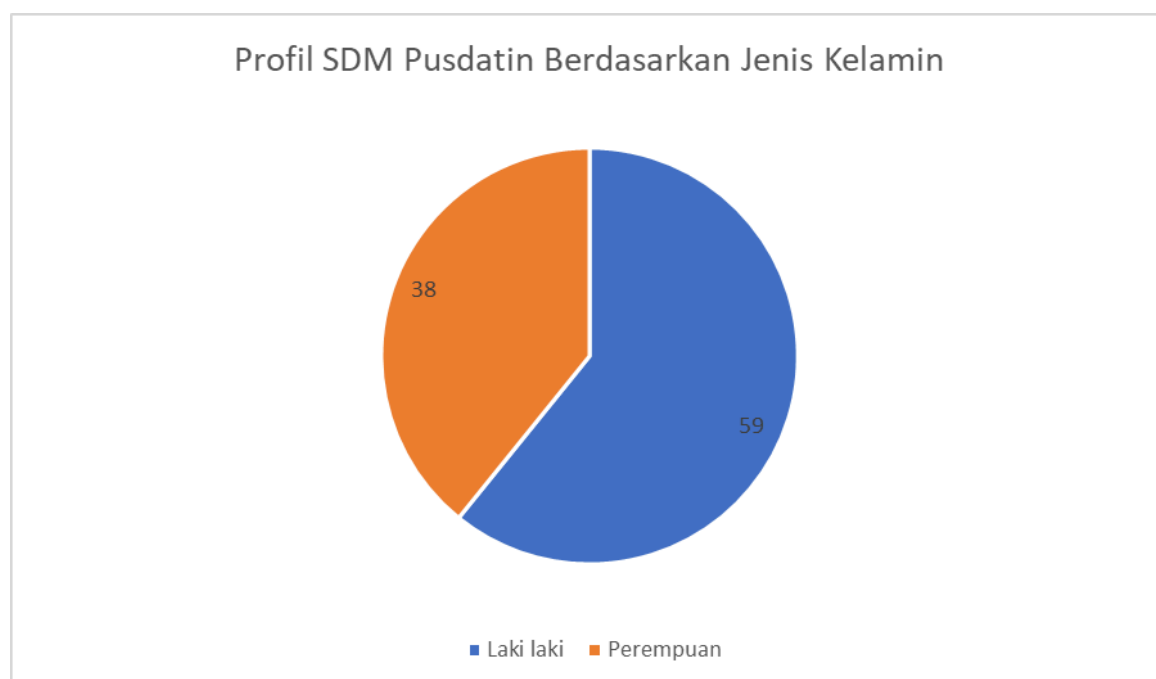
Tabel 2.1 Data Pegawai Pusdatin Tahun 2025

Rincian komposisi pegawai Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sampai dengan 31 Desember 2025 berdasarkan golongan,

jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia, dan jabatan disajikan pada diagram berikut.

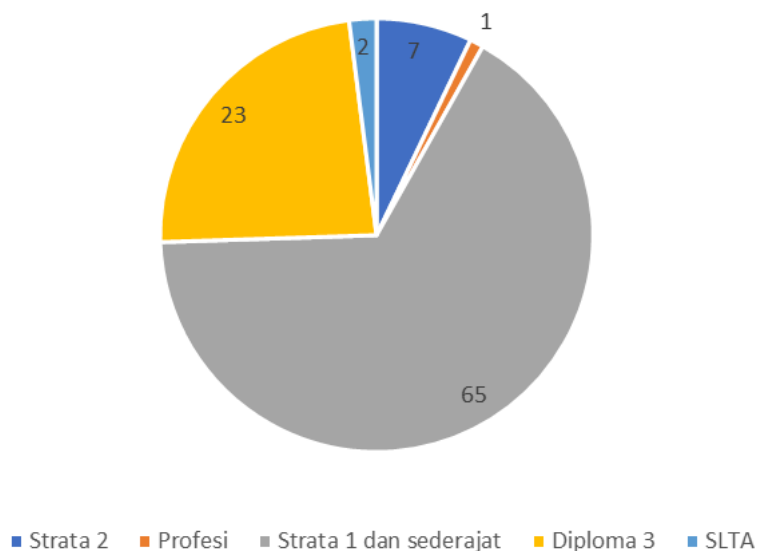


Gambar 2.1 Data pegawai Pusdatin tahun 2025 berdasarkan Golongan



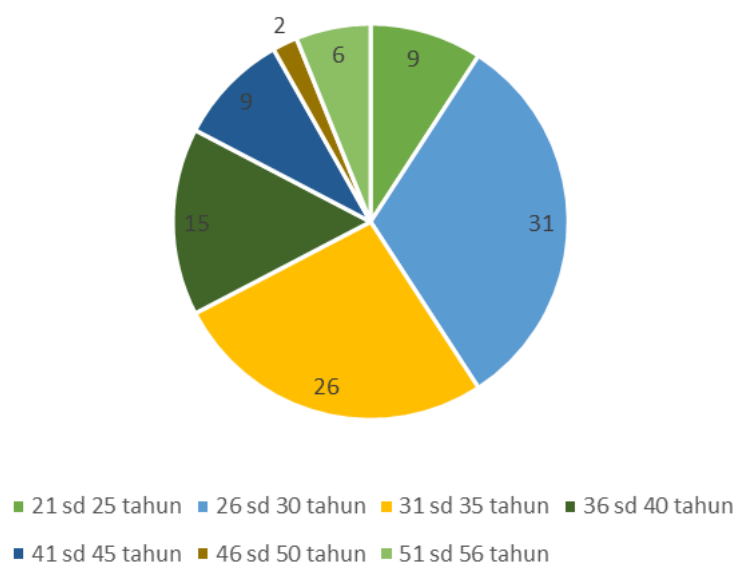
Gambar 2.2 Data pegawai Pusdatin tahun 2025 berdasarkan gender

Profil SDM Pusdatin Berdasarkan Tingkat Pendidikan

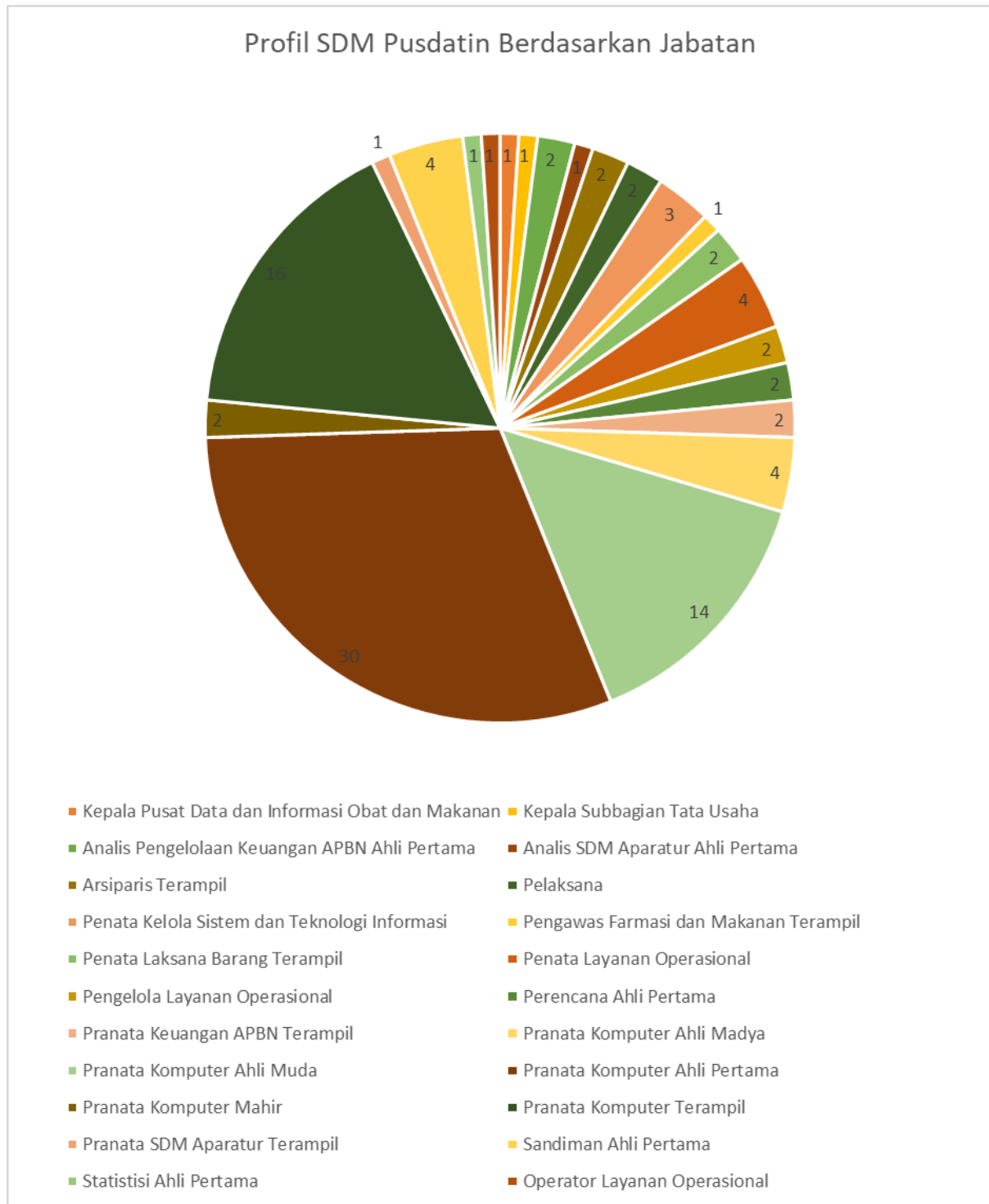


Gambar 2.3 Data pegawai Pusdatin tahun 2025 berdasarkan pendidikan

Profil SDM Berdasarkan Umur



Gambar 2.4 Data pegawai Pusdatin tahun 2025 berdasarkan usia



Gambar 2.5 Data pegawai Pusdatin tahun 2025 berdasarkan jabatan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) terdiri atas jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural yang terdapat di lingkungan Pusdatin meliputi 1 (satu) orang Kepala Pusat (Eselon II), 1 (satu) orang Kepala Bagian Tata Usaha, serta 5 (lima) orang Ketua Tim.

Sementara itu, jabatan fungsional yang terdapat di lingkungan Pusdatin terdiri atas Pranata Komputer, Pengawas Farmasi dan Makanan, Perencana, Arsiparis, Analis Pengelola Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, Statistisi, Penata Laksana Barang, Penata Layanan Operasional, dan Operator Layanan Operasional.

Komposisi jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Pusdatin dapat dilihat pada gambar berikut.

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	1
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	1
3	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2
4	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	1
5	Arsiparis Terampil	2
6	Pelaksana	2
7	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	3
8	Penata Laksana Barang Terampil	2
9	Penata Layanan Operasional	4
10	Pengelola Layanan Operasional	2
11	Perencana Ahli Pertama	2
12	Pranata Keuangan APBN Terampil	2
13	Pranata Komputer Ahli Madya	4
14	Pranata Komputer Ahli Muda	14
15	Pranata Komputer Ahli Pertama	30
16	Pranata Komputer Mahir	2
17	Pranata Komputer Terampil	16
18	Pranata SDM Aparatur Terampil	1
19	Sandiman Ahli Pertama	4
20	Statistisi Ahli Pertama	1
21	Operator Layanan Operasional	1
22	Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil	1

Tabel 2.2 Data pegawai Pusdatin tahun 2025 berdasarkan jabatan

Pada Tahun 2025, di Satuan Kerja Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) terdapat distribusi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, yang terdiri atas 1 (satu) orang Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, 3 (tiga) orang Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, 1 (satu) orang Penata Laksana Barang Terampil, 1 (satu) orang Perencana Ahli Pertama, 10 (sepuluh) orang Pranata Komputer Ahli Pertama, 2 (dua) orang Pranata Komputer Terampil, 1 (satu) orang Pranata SDM Aparatur Terampil, dan 4 (empat) orang Sandiman Ahli Pertama. Selama periode tahun 2025, tidak terdapat pegawai yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP), meninggal dunia, maupun yang mengajukan pensiun atau pensiun dini.

b. Kebutuhan Pegawai

Pada Tahun 2025, pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin) didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri atas berbagai jabatan fungsional tertentu serta jabatan pelaksana. Sumber daya manusia tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan serta pencapaian kinerja organisasi.

Sepanjang tahun 2025, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pusdatin tercatat sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang yang terdiri atas 62 (enam puluh dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 23 (dua puluh tiga) orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan 13 (tiga belas) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Seiring dengan berkurangnya jumlah pegawai serta meningkatnya kebutuhan organisasi dalam mendukung penguatan tata kelola data dan informasi, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi menuju era Revolusi Industri 5.0, dan pada bulan November 2025 telah dilakukan reviu terhadap perhitungan kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan Pusdatin.

Berdasarkan hasil reviu tersebut, diperoleh hasil bahwa kebutuhan ideal sumber daya manusia di lingkungan Pusdatin adalah sebanyak 140 (seratus empat puluh) orang. Sementara itu, dengan mempertimbangkan kondisi eksisting sumber daya manusia yang tersedia saat ini sebanyak 62 (enam puluh dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 23 (dua puluh tiga) orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), masih terdapat kesenjangan (gap) kebutuhan pegawai sebesar 30% atau setara dengan kekurangan sebanyak 42 (empat puluh dua) orang pegawai.

Sebagai tindak lanjut atas kondisi tersebut, diperlukan upaya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia secara bertahap melalui mekanisme perencanaan kebutuhan pegawai, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta dukungan kebijakan penguatan kapasitas organisasi guna memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin dapat berjalan secara efektif dan optimal.

No	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	ABK (Analisis Beban Kerja)	Jumlah Pegawai Eksisting	Gap	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Struktural	1	1	0	100%
2	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Struktural	1	1	0	100%
3	Analisis Anggaran Ahli Pertama	Fungsional	1	0	1	0%
4	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Fungsional	1	0	1	0%
5	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Fungsional	1	0	1	0%
6	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Fungsional	2	2	0	100%
7	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Fungsional	1	0	1	0%
8	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Fungsional	1	1	0	100%

9	Arsiparis Ahli Pertama	Fungsional	3	0	3	0%
10	Arsiparis Mahir	Fungsional	2	0	2	0%
11	Arsiparis Penyelia	Fungsional	1	0	1	0%
12	Arsiparis Terampil	Fungsional	2	2	0	100%
13	Penata Laksana Barang Terampil	Fungsional	2	2	0	100%
14	Perencana Ahli Madya	Fungsional	1	0	1	0%
15	Perencana Ahli Muda	Fungsional	1	0	1	0%
16	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	2	2	0	100%
17	Pranata Keuangan APBN Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
18	Pranata Keuangan APBN Terampil	Fungsional	2	2	0	100%
19	Pranata Komputer Ahli Madya	Fungsional	11	4	7	36%
20	Pranata Komputer Ahli Muda	Fungsional	21	15	6	71%
21	Pranata Komputer Ahli Pertama	Fungsional	31	30	1	97%
22	Pranata Komputer Mahir	Fungsional	11	4	7	36%
23	Pranata Komputer Penyelia	Fungsional	4	0	4	0%
24	Pranata Komputer	Fungsional	19	15	4	79%

	Terampil					
25	Pranata SDM Aparatur Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
26	Pranata SDM Aparatur Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
27	Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil	Fungsional	0	1	-1	100%
28	Sandiman Ahli Madya	Fungsional	1	0	1	0%
29	Sandiman Ahli Muda	Fungsional	5	0	5	0%
30	Sandiman Ahli Pertama	Fungsional	7	4	3	57%
31	Statistisi Ahli Muda	Fungsional	1	0	1	0%
32	Statistisi Ahli Pertama	Fungsional	1	1	0	100%
33	Operator Layanan Operasional	Fungsional	0	1	-1	100%
34	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Fungsional	0	3	-3	100%
35	Penata Layanan Operasional	Fungsional	0	4	-4	100%
36	Pengelola Layanan Operasional	Fungsional	0	2	-2	100%
TOTAL			140	98	42	70%

Tabel 2.3 Data kebutuhan pegawai Pusdatin

Dalam rangka memenuhi kesenjangan (gap) kebutuhan sumber daya manusia tersebut, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin) telah menyusun proyeksi pemenuhan kebutuhan

pegawai secara bertahap hingga tahun 2029. Proyeksi tersebut disusun sebagai acuan dalam perencanaan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara optimal.

Adapun proyeksi pemenuhan kebutuhan pegawai Pusdatin sampai dengan tahun 2029 disajikan sebagai berikut :

No	Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Formasi CASN		BUP					GAP
				CPNS	PPPK	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
8	Arsiparis	3	2	0	0	0	0	1	0	0	2

	Ahli Pertama										
9	Arsiparis Mahir	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
10	Arsiparis Penyelia	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	Arsiparis Terampil	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Penata Laksana Barang Terampil	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
13	Perencana Ahli Madya	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14	Perencana Ahli Muda	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	Perencana Ahli Pertama	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
16	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
17	Pranata Keuangan APBN Terampil	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1
18	Pranata Komputer Ahli Madya	11	3	0	0	0	0	0	0	0	8
19	Pranata Komputer Ahli Muda	21	12	0	0	0	0	1	0	0	10
20	Pranata Komputer Ahli Pertama	31	18	10	3	0	0	2	0	0	2
21	Pranata Komputer Mahir	11	3	0	0	0	0	0	0	0	8
22	Pranata Komputer Penyelia	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
23	Pranata Komputer	19	17	2	0	0	1	0	0	0	1

	Terampil										
24	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25	Pranata SDM Aparatur Terampil	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
26	Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
27	Sandiman Ahli Madya	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
28	Sandiman Ahli Muda	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
29	Sandiman Ahli Pertama	8	0	2	0	0	0	0	0	0	6
30	Statistisi Ahli Muda	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
31	Statistisi Ahli Pertama	1	1	0	0	1	0	0	0		1
32	Operator Layanan Operasional	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-1
33	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-1
34	Penata Layanan Operasional	0	4	0	0	0	0	0	0	0	-4
35	Pengelola Layanan Operasional	0	2	0	0	0	0	0	0	0	-2
TOTAL		140	76	18	3	0	2	5	0	1	52

Tabel 2.4 Data kebutuhan pegawai Pusdatin

Berdasarkan kondisi riil serta hasil analisis beban kerja, diketahui bahwa Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin) masih mengalami kekurangan sumber daya manusia dari

sisi kuantitas pegawai. Selain itu, dari sisi kualitas sumber daya manusia juga masih diperlukan peningkatan kompetensi guna mendukung optimalisasi kinerja organisasi.

Melalui proyeksi pemenuhan kebutuhan pegawai tersebut, diharapkan kesenjangan (gap) sumber daya manusia di lingkungan Pusdatin dapat terpenuhi secara bertahap sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, sehingga mampu menjawab tantangan organisasi serta mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi secara efektif dan berkelanjutan.

c. Peningkatan Kompetensi Pegawai

Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin) secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai melalui berbagai program pelatihan dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya.

Pada Tahun 2025, persentase anggaran pelatihan dibandingkan dengan total anggaran Pusdatin tercatat sebesar **0,19%**. Pada awal Tahun 2025 telah direncanakan sebanyak **9 (sembilan) kegiatan pelatihan** yang didanai melalui anggaran Pusdatin. Seluruh pelatihan yang telah direncanakan tersebut telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2025 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selain pelatihan yang telah direncanakan, dalam rangka memenuhi target pengembangan kompetensi pegawai sebesar **20 Jam Pelajaran (JP) per tahun**, pegawai yang menduduki jabatan pelaksana maupun jabatan fungsional juga melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi di luar perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan data per **31 Desember 2025**, capaian target pengembangan kompetensi sebesar **20 JP per pegawai per tahun** telah tercapai **100%**, yang dilaksanakan dan dilaporkan oleh **96 pegawai** dengan total akumulasi capaian sebesar **8.133 JP**.

Selain itu, terdapat pembaruan data **Jam Pelajaran (JP) Mandiri** dengan status telah diverifikasi yang turut berkontribusi terhadap perolehan JP pegawai sepanjang Tahun 2025. Pembaruan tersebut menambah akumulasi JP pegawai yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara mandiri. Berdasarkan hasil perhitungan, terdapat **105 pembaruan JP Mandiri** yang berasal dari

berbagai kegiatan pengembangan kompetensi, antara lain pelatihan fungsional, pelatihan teknis, bimbingan teknis, seminar/sosialisasi/sarasehan/konferensi, kursus atau magang, workshop/lokakarya, serta kegiatan coaching dan mentoring yang telah dilaksanakan oleh pegawai sepanjang Tahun 2025.

Selanjutnya, sepanjang Tahun 2025 terdapat **3 (tiga) permohonan nomor sertifikat** yang telah diajukan dan diverifikasi oleh **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM)**. Permohonan nomor sertifikat tersebut diajukan karena terdapat pegawai yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh pihak di luar instansi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) serta berada di luar perencanaan kegiatan pengembangan kompetensi pada awal Tahun 2025.

No	Jenis Diklat	Nama Diklat	Materi Pengembangan Kompetensi	Penyelenggara	Jumlah JP	Jumlah Peserta	Status
1	Workshop	Workshop TIK Badan Pengawas Obat dan Makanan	Peran Strategis Pranata Komputer di Era Transformasi dan Pemerintah Digital	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	8 JP	98	Verifikasi
2	Sosialisasi	Sosialisasi Aplikasi dan atau website	Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	2 JP	64	Verifikasi
3	Pelatihan	Pelatihan Manajemen Risiko	Pelatihan Manajemen Risiko	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	9 JP	22	Verifikasi

Tabel 2.5 Data Pengembangan Kompetensi oleh Pusdatin

Adapun kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2025 dan belum tercantum dalam rencana kegiatan pengembangan kompetensi pada awal tahun antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Bulan	Peserta	Keterangan
1	Penguatan Engagement dan Kinerja Pusdatin Melalui Pelatihan Pelayanan Prima	Desember 2025	Seluruh Pegawai Pusdatin	Pengembangan Kompetensi Manajerial Sosio Kultural
2	<i>E-Learning</i> Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital	Agustus 2025	Seluruh Pegawai Pusdatin	Pengembangan Kompetensi Manajerial Sosio Kultural
3	Pelatihan Sistem Manajemen POM Terintegrasi	November 2025	Seluruh Pegawai Pusdatin	Pengembangan Kompetensi Teknis
4	Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP	November 2025	Seluruh Pegawai Pusdatin	Pengembangan Kompetensi Administrasi

Tabel 2.6 Data Pengembangan Kompetensi oleh Pusdatin yang belum tercantum dalam rencana kegiatan pengembangan kompetensi

Selain kegiatan pengembangan kompetensi di luar perencanaan, pada Tahun 2025 Pusdatin juga melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi yang telah direncanakan dalam dokumen rencana pengembangan kompetensi yang disusun pada akhir Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana serta telah memenuhi target capaian pengembangan kompetensi yang telah ditetapkan.

No	Nama Kegiatan Pengembangan Kompetensi	Status
1	Pelatihan Manajemen Risiko Lanjutan	Terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan
2	Workshop Jabatan Fungsional Pranata Komputer Badan POM Peran Strategis Pranata Komputer di Era Transformasi dan Pemerintah Digital	Terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan
3	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1	Terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan
4	<i>Hands On Scraping Data Case</i> Analisis Sentimen pada Kebijakan Pemerintah	Terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan
5	Pengenalan <i>Internet of Things</i> : Konsep, Teknologi, dan	Terlaksana sesuai

	Aplikasinya	dengan target yang telah ditetapkan
6	Pelatihan PPK	Terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan
7	Sertifikasi <i>Incident Response Analyst</i>	Terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan
8	Pelatihan Penyusunan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik Angkatan Ke-4	Terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan
9	RevoU <i>Mini Course: Data Analytics</i>	Terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Tabel 2.7 Data Pengembangan Kompetensi oleh Pusdatin yang tercantum dalam rencana kegiatan pengembangan kompetensi

Pada Tahun 2025, terdapat pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar sebanyak 2 (dua) orang. Kedua pegawai tersebut menjalani tugas belajar dengan status lepas jabatan.

No	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan	Program Studi/Universitas	Status Tugas Belajar
1	Dwi Resmiyarti, S. Farm, Apt	Penata Tk I/III/d	Pranata Komputer Ahli Muda	Kebijakan Publik dan Manajemen /Monash University	Lepas Jabatan
2	Hayati Rohmatika Jufri, A. Md	Pengatur Tk I/II/d	Pranata Komputer Terampil	Teknik Informatika/ Bina Nusantara	Lepas Jabatan

Tabel 2.8 Data Pegawai yang melakukan tugas belajar

Sementara itu, kegiatan sosialisasi dan evaluasi terkait Calon Peserta Tugas Belajar (CPTB) yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

No	Desk Tugas Belajar	Tanggal Kegiatan	Media
1.	Hasil Evaluasi Usulan CPTB Periode I Tahun 2025, serta Pembukaan Usulan CPTB Periode II Tahun 2025	28 Februari 2025	Daring dan Luring
2.	Hasil Evaluasi Usulan CPTB Periode II Tahun 2025, serta Pembukaan Usulan CPTB Periode III Tahun 2025	27 Mei 2025	Daring dan Luring
3.	Hasil Evaluasi Usulan CPTB Periode III Tahun 2025, serta Pembukaan Usulan CPTB Periode IV Tahun 2025	26 Agustus 2025	Daring dan Luring
4.	Hasil Evaluasi Usulan CPTB Periode IV Tahun 2025, serta Pembukaan Usulan CPTB Periode I Tahun 2026	20 November 2025	Daring dan Luring

Tabel 2.9 Data Kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi terkait Calon Peserta Tugas Belajar

Pada Tahun 2025, terdapat beberapa pegawai yang telah lulus uji kompetensi dan selanjutnya diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi melalui mekanisme kenaikan jenjang jabatan maupun perpindahan jabatan. Rincian pegawai yang mengalami peningkatan jabatan tersebut disajikan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Sebelum	Jabatan Sesudah	Mekanisme	Terhitung Masa Tugas (TMT)
1.	Widi Mardianto, ST	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pranata Komputer Ahli Muda	Kenaikan Jenjang Jabatan	29 Desember 2025
2.	Vinsca Pramesthi, A. Md	Pranata Komputer Terampil	Pranata Komputer Mahir	Kenaikan Jenjang Jabatan	3 Oktober 2025
3.	Rakhman Hakim, S. Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pranata Komputer Ahli Muda	Kenaikan Jenjang Jabatan	20 Agustus 2025
4.	Artomo, S. Kom	Pranata	Pranata	Alih Jenjang	1 November

		Komputer Mahir	Komputer Ahli Pertama	Jabatan	2025
5.	Arif Widakdo, S. Kom	Pranata Komputer Mahir	Pranata Komputer Ahli Pertama	Alih Jenjang Jabatan	1 November 2025
6.	Royanih, S. Kom	Pranata Komputer Ahli Muda	Pranata Komputer Ahli Madya	Kenaikan Jenjang Jabatan	15 Februari 2025

Tabel 2.10 Data Pegawai yang Melakukan Uji Kompetensi tahun 2025

d. Kenaikan Pangkat dan/atau Jabatan

Dalam rangka mendukung pengembangan karier dan jabatan pegawai di lingkungan Pusdatin, sepanjang Tahun 2025 terdapat **30 (tiga puluh) pegawai** yang mengalami perubahan administrasi kepegawaian. Adapun perubahan administrasi kepegawaian tersebut antara lain sebagai berikut:

No	Perubahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Nama Pegawai	Status
1	Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jabatan Fungsional	3 pegawai	Royanih, S. Kom Vinsca Pramesthi, A. Md Widi Mardianto, S.T.	Selesai
2	Kenaikan Pangkat Fungsional	6 pegawai	Sannie Ragistia, A. Md Lamhot Alfianto Destian, A. Md Dimas Setiawan Afis, S. Kom Arif Widakdo, S. Kom Raki Anwar Ekaniza, S. Kom N-Noormandiyanti, S.S.T.Ars	Selesai
3	Alih Jenjang Terampil ke Ahli	2 pegawai	Arif Widakdo, S. Kom Artomo, S. Kom	Selesai
4	Pemberhentian dari Jabatan karena Tugas Belajar	2 pegawai	Dwi Resmiyarti, S. Farm, Apt Hayati Rohmatika Jufri, A. Md	Selesai
5	Kenaikan Pangkat Tugas Belajar	1 pegawai	Dwi Resmiyarti, S. Farm, Apt	Selesai
6	Pengangkatan Melalui Perpindahan Jabatan	1 pegawai	Ana Perwitasari, S. Farm, Apt, M. Sc	Selesai
7	Uji Kompetensi JF non PFM (Kenaikan Jenjang Jabatan)	5 pegawai	Rakhman Hakim, S. Kom Vinsca Pramesthi, A.Md Ricky Kurnia Lestari, A.Md. Muhamad Wahyu Kurniawan, A.Md	Selesai

			Widi Mardianto, S.T.	
8	Pencantuman Gelar	2 pegawai	Artomo, S. Kom Arif Widakdo, S. Kom	Selesai
9	Usulan Penugasan	4 pegawai	N-Noormandiyanti, S.S.T.Ars Rakhman Hakim, S. Kom Artomo, S. Kom Arif Widakdo, S. Kom	Selesai
10	Pengunduran Diri/Resign dari PNS	1 pegawai	Muhammad Sofyan Syaori, A. Md	Selesai
11	Pengangkatan Kembali	1 pegawai	N-Noormandiyanti, S.S.T.Ars	Selesai
12	Kenaikan Jabatan Fungsional	1 pegawai	Rakhman Hakim, S. Kom	Selesai
13	Mutasi Internal	1 pegawai	Riani Fajar Sari, S.Farm	Selesai

Tabel 2.11 Data Pegawai yang Melakukan Perubahan Administrasi Kepegawaian

2. Sarana dan Prasarana

a. Lingkungan Eksternal

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan memiliki tugas untuk menyelenggarakan pengelolaan sekaligus penerapan Teknologi informasi dan Komunikasi di Lingkungan kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mendukung pengawasan obat dan makanan yang terintegrasi, efektif dan mutakhir dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel sekaligus menghadirkan layanan atau media informasi dengan data terkini yang mudah diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pusat data dan Informasi Obat dan makanan menyelenggarakan fungsi atau layanan TIK yang meliputi : layanan di bidang Infrastruktur dan Fasilitas Pusat Data, Sistem Informasi dan Interkoneksi, Arsitektur Data dan Kerjasama Lintas Sektor, Keamanan TIK dan Persandian, dan Perencanaan dan Penjamin Mutu TIK, dengan cakupan Layanan Kerja TIK Pusdatin sebagai berikut:

- 1) Seluruh unit dan satuan kerja di Lingkungan Badan POM, baik ditingkat Pusat, Balai Besar POM, Balai POM hingga Loka POM yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia;
- 2) Perusahaan atau pihak ketiga, yang memanfaatkan aplikasi untuk proses registrasi/ layanan Badan POM lainnya;
- 3) Kementerian/Lembaga lain yang terlibat dalam proses bisnis dan kerja sama dengan Badan POM/Pusdatin; serta
- 4) Pihak Perguruan Tinggi/Universitas yang terlibat dalam proses bisnis dan kerja sama dengan Badan POM/Pusdatin.

b. Lingkungan Internal

1) Tanah dan Bangunan

Status tanah yang di atasnya berdiri bangunan tempat dilaksanakannya kegiatan administrasi dan ruang jaringan Badan POM adalah hibah dari Kementerian Kesehatan RI menjadi aset Badan POM. Luas bangunan adalah 1.932 m² dan terdiri dari 7 lantai bangunan.

2) Sumber Daya Listrik

Pasokan daya listrik utama bersumber dari jaringan distribusi PLN, dengan kapasitas 197 KVA dan sebagai sumber daya cadangan disuplai dari 1 unit generator dengan kapasitas 350 KVA.

3) Sarana Komunikasi

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan di antara unit kerja baik di pusat dan daerah, dukungan sarana komunikasi yang terpelihara dengan baik sangat dibutuhkan. Komunikasi dapat diselenggarakan terintegrasi dengan sistem telekomunikasi Badan POM.

Jaringan komunikasi secara digital dapat diselenggarakan lebih luas menggunakan sarana VPN yang dikelola terpusat oleh Badan POM atau WI-FI yang dikelola oleh Pusdatin sendiri. Penerimaan dan pengiriman surat secara digital dapat diselenggarakan melalui alamat PUSDATIN.

4) Sumber Air

Sebagai sarana dan prasarana kebutuhan pegawai, Pusdatin memerlukan pasokan air bersih yang tidak terputus, sehingga pasokannya diadakan melalui jaringan Perusahaan Air Minum milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota dan pasokan air sumur dalam.

5) Kendaraan Bermotor

Sarana transportasi didukung oleh 2 unit kendaraan bermotor roda empat dengan rincian 1 untuk operasional Kepala Pusdatin dan 1 untuk operasional staff.

Merk/Type	Nomor Polisi	Status	Tahun	Kondisi
Toyota All New Kijang Innova 2.0CC	B 1017 PQT	Milik Pusdatin	2017	Baik
Toyota Innova Zenix 2.0 V	B 1776 DOP	Sewa	2024	Baik

Tabel 2.12 Data Kendaraan Operasional Pusdatin tahun 2025

3. Anggaran

a. Realisasi Anggaran

Berdasarkan DIPA Petikan 17 Nomor SP DIPA-063.01.1.632458/2025 tanggal 2 Desember 2025 satuan kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan mengelola anggaran sebesar Rp.45.468.340.000,00. Selama tahun 2025 terdapat perubahan pagu anggaran melalui 6 (enam) kali Revisi DIPA, terdiri atas:

- 1) Revisi DIPA 01 pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), tanggal 22 Februari 2025 berupa revisi Automatic Adjustment.
- 2) Revisi DIPA 02 pada pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), tanggal 21 Maret 2025 berupa revisi Pemenuhan Honor Pramubakti s.d Akhir TA 2025.
- 3) Revisi DIPA 03 pada Kanwil DJPb, tanggal 18 Juni 2025 berupa revisi Pergeseran Antar Jenis Belanja Modal Ke Belanja Barang dalam hal pagu anggaran tetap.
- 4) Revisi DIPA 04 pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), tanggal 7 Juli 2025 berupa Penambahan Gaji CPNS dan PPPK sebesar Rp. 496.406.000,00.
- 5) Revisi DIPA 05 pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), tanggal 26 Agustus 2025 berupa Penambahan Alokasi Anggaran dari Deputy II untuk Pengadaan Tools Aplikasi Berbasis AI (Artificial Intelligence) sebesar Rp. 450.000.000,00.
- 6) Revisi DIPA 06 pada Kanwil DJPb, tanggal 1 Oktober 2025 berupa Pergeseran Antar Jenis Belanja Modal Ke Belanja Barang dalam hal pagu anggaran tetap.

Pengelolaan anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dilakukan dengan tetap mengutamakan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan adanya blokir anggaran sebesar Rp17.052.812.000,00 sehingga anggaran yang dapat digunakan hingga akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp. 28.415.528.000,00 dengan penyerapan anggaran selama TA 2025 sebesar Rp. 28.415.280.433,00 (99,999%)

Target			Realisasi		Persentase		
Kegiatan	Anggaran	Anggaran setelah pemblokiran	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Kegiatan	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran setelah pemblokiran
26	45,468,340,000	28,415,528,000	26	28,415,280,433	100%	62.49%	99.999%

Tabel 2.13 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Terdapat 26 kegiatan yang dilakukan oleh Pusdatin untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama, dengan rincian output dan juga anggaran sebagai berikut :

No	Kegiatan	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	13	14	107.69%	113,218,000	113,218,000	100.00%
2	Perencanaan dan Penata Kelolaan BMN	1	1	100.00%	7,956,000	7,956,000	100.00%
3	Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pusdatin	64	105	164.06%	448,174,000	448,169,266	100.00%
4	Perkuatan Implementasi SAKIP Pusdatin 2025	5	5	100.00%	148,193,000	148,192,500	100.00%
5	Peningkatan Kompetensi SDM TIK	5	5	100.00%	34,250,000	34,250,000	100.00%
6	Penyediaan Layanan Sistem Informasi Layanan Interkoneksi	22	22	100.00%	3,542,611,000	3,542,610,600	100.00%
7	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	14	14	100.00%	5,548,729,000	5,548,511,950	100.00%
8	Pemeliharaan Sistem Informasi Layanan Interkoneksi	5	5	100.00%	710,500,000	710,500,000	100.00%
9	Pemeliharaan Sistem Informasi Layanan Internal	1	1	100.00%	185,000,000	185,000,000	100.00%
10	Dukungan Keamanan TIK	4	4	100.00%	578,045,000	578,044,173	100.00%
11	Pengadaan peralatan perlengkapan perkantoran dan penambah daya tahan tubuh	12	12	100.00%	327,572,000	327,571,421	100.00%
12	Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4//6/10	12	12	100.00%	37,000,000	36,999,049	100.00%
13	Administrasi Kegiatan	12	12	100.00%	1,231,996,000	1,231,993,371	100.00%
14	Langganan Daya dan Jasa	12	12	100.00%	761,082,000	761,080,423	100.00%
15	Perawatan Gedung dan	12	12	100.00%	1,053,819,000	1,053,815,100	100.00%

No	Kegiatan	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
	Bangunan						
16	Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	1	1	100.00%	193,412,000	193,412,000	100.00%
17	Jasa Keamanan dan Pengamanan	12	12	100.00%	254,740,000	254,739,888	100.00%
18	Penataan dan Pengamanan Arsip PUSDATIN	1	1	100.00%	4,997,000	4,997,000	100.00%
19	Sewa Kendaraan bermotor PUSDATIN	1	1	100.00%	159,000,000	159,000,000	100.00%
20	Layanan Koneksi Jaringan	12	12	100.00%	4,179,292,000	4,179,292,000	100.00%
21	Pemeliharaan infrastruktur TIK	12	12	100.00%	7,141,505,000	7,141,502,183	100.00%
22	Pemenuhan Sarana Gedung Phinisi	41	44	107.32%	513,673,000	513,666,190	100.00%
23	Manajemen Sistem Informasi Layanan Eksternal	1	1	100.00%	1,693,000	1,692,169	99.95%
24	Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	30	44	146.67%	53,290,000	53,289,500	100.00%
25	Keterpaduan Layanan Digital Sistem Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	331	331	100.00%	940,258,000	940,254,650	100.00%
26	Penyusunan Matriks Peran hasil dan Kinerja individu Pusdatin	3	3	100.00%	245,523,000	245,523,000	100.00%

Tabel 2.14 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas diperoleh kesimpulan bahwa seluruh kegiatan memiliki capaian 100%, dengan 4 kegiatan yang memiliki volume capaian lebih tinggi dari 100% diantaranya:

- 1) Kegiatan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan capaian volume 107.69%
- 2) Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pusdatin dengan capaian volume 164.06%
- 3) Kegiatan Pemenuhan Sarana Gedung Phinisi dengan volume capaian 107.32%
- 4) Kegiatan Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan volume capaian 146.67%.

4. Implementasi PUG

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang dilakukan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan. Tujuan utama PUG adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, sehingga baik perempuan maupun laki-laki memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam pembangunan.

Di Indonesia, pelaksanaan PUG didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 yang mengamanatkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan gender dalam setiap kebijakan dan program. Selain itu, PUG juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.

Dengan adanya regulasi tersebut, menjadi landasan penting bagi Tim PUG BPOM dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, responsif gender, serta berkelanjutan di Indonesia.

Pusat Data dan Informasi ikut aktif dalam pembangunan bagi kelompok inklusif dan responsif gender pada pelayanan di BPOM. Beberapa layanan sistem informasi, data dan informasi sudah dilaksanakan di tahun 2025 yaitu:

1. Pusdatin membuat Data statistik pegawai Pusdatin sebagai data terpilah yang telah disampaikan pada subsite Pusdatin
2. Menambahkan fitur aksesibilitas pada website Badan POM, Subsite Badan POM, JDIH, dan PPID yang ramah bagi penyandang disabilitas dengan bentuk *text to speech*
3. Sosialisasi awareness pengarusutamaan gender kepada seluruh pegawai Pusdatin.
4. Pusdatin menyediakan data terpilah pada aplikasi tools kegiatan Pusdatin <https://link.pom.go.id/> sehingga pada setiap kegiatan yang dilakukan dapat dilihat persentase dan jumlah partisipasi berdasarkan gender pada daftar hadir. Selain itu Pusdatin memfasilitasi data terpilah pada aplikasi PPID Badan POM di Badan POM *Command Center* <https://bcc.pom.go.id/>

Dalam kegiatan PUGIS untuk sarana dan prasarana juga sudah dilakukan pada gedung Pusdatin sebagai berikut:

1. Telah tersedia Ruang Laktasi yang dilengkapi dengan Freezer untuk penyimpanan ASI

2. Telah tersedia toilet untuk disabilitas pada Lt.1 Gedung Phinisi
3. Telah tersedia akses jalan masuk ke Gedung Phinisi untuk disabilitas
4. Telah tersedia kursi roda di Loby Gedung Phinisi
5. Tersedia toilet perempuan yang berbeda dengan toilet laki-laki.

Pada 3 Oktober 2025 terbit rencana aksi kegiatan PUG Pusdatin dengan beberapa kegiatan sesuai dengan terbitnya Surat Keputusan Sestama terkait kegiatan PUG/PUGIS Kesektamaan. Berikut rencana aksi kegiatan PUG Pusdatin 2025 - 2026 adalah:

No	Kegiatan	Unit Pelaksana	Waktu
1.	Pengumpulan Data Statistik Pegawai Pusdatin sebagai Data Terpilah	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Triwulan 3 2025
2.	Sosialisasi Internal Pegawai Pusdatin	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Triwulan 4 2025
3.	Medical Check Up Pegawai Pusdatin	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	2026
4.	Pengembangan Fitur Disabilitas Aplikasi BPOM Mobile	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	2026
5.	Pengadaan Tangga Yang Difasilitasi <i>Ramp</i> (bidang miring) dengan <i>Guiding Block</i>	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	2026
6.	Pengadaan Pegangan Toilet dan tombol darurat untuk Disabilitas	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	2026
7.	Pengadaan Alat Fitur Suara Pada Lift Pusdatin	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	2026
8.	Pengadaan Kursi Lipat Sholat	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	2026

Tabel 2.15 Rencana aksi kegiatan PUG Pusdatin 2025 - 2026

BAB III HASIL KEGIATAN

Sasaran Kegiatan 1

Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi

IK 1. Nilai Indeks SPBE

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemerintah didorong untuk menerapkan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Dalam rangka memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berjalan selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, diperlukan penerapan unsur-unsur SPBE yang mengacu pada kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE. Dengan demikian, implementasi SPBE diharapkan dapat berlangsung secara efektif, efisien, berkesinambungan, serta mampu menghasilkan layanan yang berkualitas dan optimal.

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan setiap tahun, baik melalui evaluasi oleh tim asesor yang ditunjuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) maupun melalui penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Asesor Badan POM. Kegiatan ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, yang mencakup 47 indikator penilaian yang harus dipenuhi oleh Badan POM.

Pada tahun 2025 target kinerja Indeks SPBE BPOM ditetapkan 4,59 namun sehubungan dengan surat dari Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah nomor B/66/PD.02/2025 tanggal 21 April 2025 perihal Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE, maka **BPOM masuk dalam Kategori Pembinaan Indeks Pemerintah Digital**. Maka berdasarkan surat dari Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah nomor B/40/PD.03/2025 tanggal 08 Juli 2025 perihal Pelaksanaan Pembinaan Pemerintah Digital dan Pemantauan SPBE, sehingga Badan POM tidak masuk dalam kategori Pemantauan SPBE Tahun 2025, **oleh karena itu BPOM tidak memperoleh hasil penilaian SPBE dari Kementerian PANRB**. Untuk memastikan ketercapaian target sesuai pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE, BPOM melalui Tim Asesor internal melaksanakan penilaian mandiri. Berdasarkan hasil penilaian mandiri memperoleh **Indeks SPBE sebesar 4,59** sebagai gambaran capaian internal pelaksanaan SPBE Tahun 2025. Target kinerja Indeks SPBE yang ditetapkan telah tercapai sepenuhnya dengan

realisasi sebesar 4,59 atau setara dengan 100%, sehingga berada pada kriteria **“BAIK”**.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indeks SPBE sekaligus sebagai bagian dari implementasi SPBE di Badan POM sampai dengan bulan Desember 2025 telah dilakukan berbagai kegiatan yang berkontribusi terhadap peningkatan indeks SPBE antara lain:

1. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Badan POM, meliputi:
 - a. Penyusunan SK Tim Kerja SPBE yang terdiri dari SK Tim Asesor, Tim Koordinasi dan Tim Teknis Reviu Arsitektur SPBE yang memiliki tugas masing-masing dalam melaksanakan koordinasi terkait penerapan SPBE di lingkungan BPOM.
 - b. Penilaian Mandiri Implementasi SPBE di lingkungan BPOM yang dilaksanakan secara berkala per triwulan.
 - c. Sosialisasi Keputusan Kepala Badan Nomor 185 Tahun 2024 tentang Manajemen SDM SPBE kepada seluruh unit kerja BPOM. Kebijakan Manajemen SDM menjadi acuan pengelolaan atau manajemen talenta dalam menjalankan SPBE di BPOM.



Gambar 3.1 Dokumentasi Sosialisasi Keputusan Kepala Badan Nomor 185 Tahun 2024 tentang Manajemen SDM SPBE

- d. Sosialisasi Standar Prosedur Operasional (SOP) Makro Manajemen Layanan Berbasis Elektronik. Sosialisasi dilaksanakan bagi seluruh unit kerja, SOP ini merupakan acuan dalam melaksanakan layanan publik maupun internal yang berbasis elektronik. SOP ini sejalan

dengan amanat dalam SPBE dalam melaksanakan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan terpadu.

2. Tindak lanjut hasil Rancangan Keputusan Kepala BPOM tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang telah disusun pada 2024 menjadi Surat Keputusan yang disahkan oleh Kepala Badan POM. Keputusan Kepala BPOM Nomor 335 Tahun 2025 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan BPOM sebagai pedoman penerapan Arsitektur SPBE BPOM;



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 335 TAHUN 2025

TENTANG

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

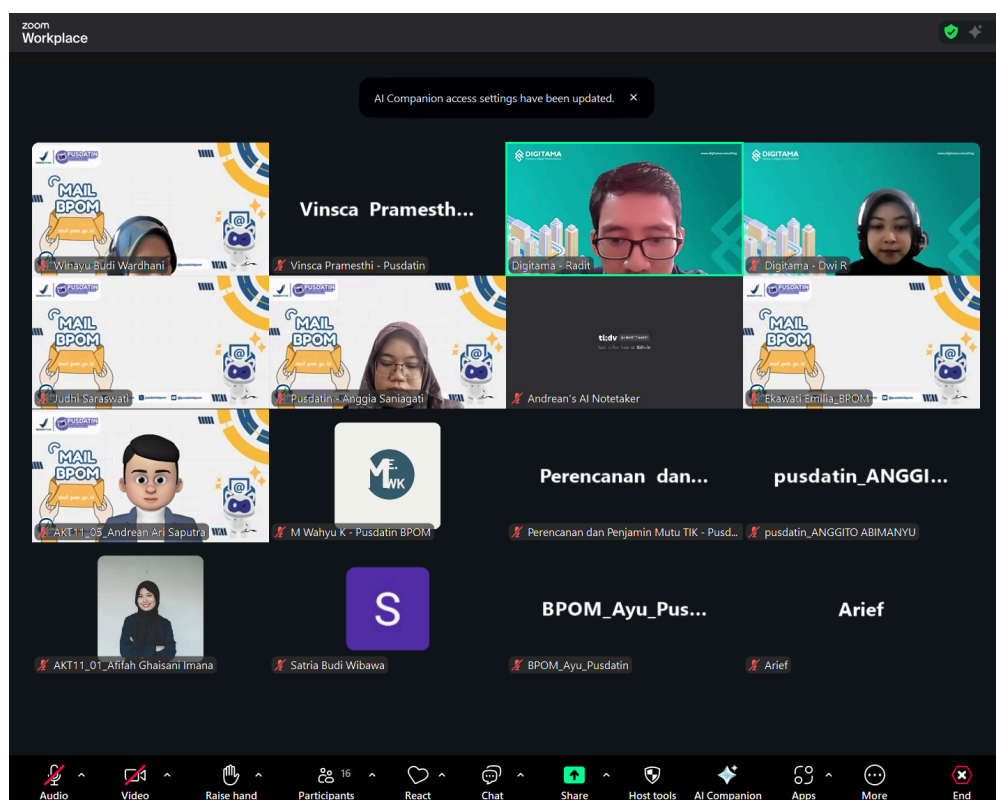
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, maka diperlukan akselerasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. bahwa penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Arsitektur dan Peta Rencana Penyelenggara Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang

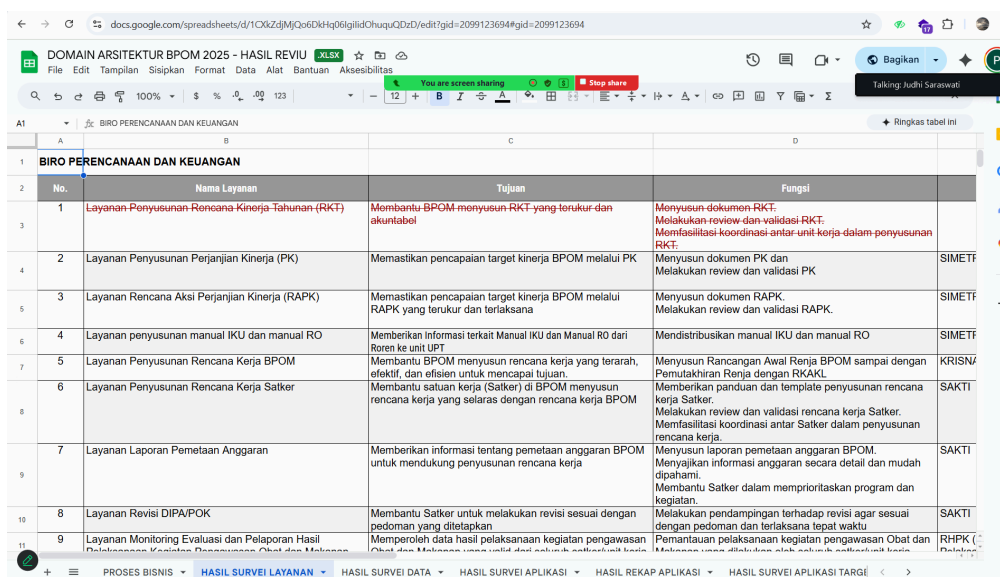
Gambar 3.2 Keputusan Kepala Kepala BPOM Nomor 335 Tahun 2025 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan BPOM

3. Melaksanakan reviu Kebijakan/Pedoman/Standar SPBE terkait pengelolaan TIK di Lingkungan BPOM melalui beberapa kali pertemuan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyesuaikan substansi Keputusan Kepala BPOM dengan dinamika perkembangan teknologi informasi serta memperhatikan kesesuaian dengan dasar hukum terkini. Reviu meliputi:
 - a. Reviu terhadap SOP Makro dan SOP Mikro terkait Pengelolaan TIK dan SPBE di BPOM. SOP ini menjadi pedoman kerja dalam melaksanakan kegiatan TIK.

- b. Melakukan sosialisasi hasil reviu SOP Makro yang telah disahkan kepada seluruh unit kerja di BPOM.
 - c. Reviu Pedoman Standar Layanan TIK yang menjadi acuan layanan TIK yang diterapkan pada KATALISTIK BPOM.
 - d. Reviu Keputusan Kepala BPOM tentang Standarisasi Sistem Informasi, Infrastruktur TIK dan Pedoman Manajemen Keamanan Informasi.
4. Melaksanakan pemantauan dan reviu terhadap penerapan Keputusan Kepala BPOM Nomor 335 Tahun 2025 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan BPOM yang selanjutnya menyusun rancangan kebijakan Arsitektur dan Peta Rencana baru sesuai hasil penerapan dan reviu kebutuhan. Kegiatan ini juga dilakukan selaras dengan perubahan Renstra BPOM 2025-2029;



Gambar 3.3 Dokumentasi Pembahasan Reviu dan Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana 2025-2029



No.	Nama Layanan	Tujuan	Fungsi	
1	Layanan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	Membantu BPOM menyusun RKT yang terukur dan akuntabel	Menyusun dokumen RKT. Melakukan review dan validasi RKT. Memfasilitasi koordinasi antar-unit kerja dalam penyusunan RKT.	
2	Layanan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)	Memastikan pencapaian target kinerja BPOM melalui PK	Menyusun dokumen PK dan Melakukan review dan validasi PK	SIMETIF
3	Layanan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	Memastikan pencapaian target kinerja BPOM melalui RAPK yang terukur dan terlaksana	Menyusun dokumen RAPK. Melakukan review dan validasi RAPK.	SIMETIF
4	Layanan penyusunan manual IKU dan manual RO	Memberikan informasi terkait Manual IKU dan Manual RO dari Roreen ke unit UPT	Mendistribusikan manual IKU dan manual RO	SIMETIF
5	Layanan Penyusunan Rencana Kerja BPOM	Membantu BPOM menyusun rencana kerja yang terarah, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan.	Menyusun Rancangan Awal Renja BPOM sampai dengan Pemutakhiran Renja dengan RKAKL	KRISNA
6	Layanan Penyusunan Rencana Kerja Satker	Membantu satuan kerja (Satker) di BPOM menyusun rencana kerja yang selaras dengan rencana kerja BPOM	Memberikan panduan dan template penyusunan rencana kerja Satker. Melakukan review dan validasi rencana kerja Satker. Memfasilitasi koordinasi antar Satker dalam penyusunan rencana kerja.	SAKTI
7	Layanan Laporan Pemetaan Anggaran	Memberikan informasi tentang pemetaan anggaran BPOM untuk mendukung penyusunan rencana kerja	Menyusun laporan pemetaan anggaran BPOM. Menyajikan informasi anggaran secara detail dan mudah dipahami. Membantu Satker dalam memprioritaskan program dan kegiatan.	SAKTI
8	Layanan Revisi DIPAP/POK	Membantu Satker untuk melakukan revisi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan	Melakukan pendampingan terhadap revisi agar sesuai dengan pedoman dan terlaksana tepat waktu	SAKTI
9	Layanan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan	Memperoleh data hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang valid dan akurat untuk mendukung kerja	Pemantauan pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh seluruh wilayah kerja	RHPK

Gambar 3.4 Pembahasan Reviu dan Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana 2025-2029

- Pendaftaran terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk seluruh Sistem Elektronik yang dimiliki dan dikelola oleh BPOM melalui aplikasi <https://pse.layanan.go.id/login> yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi);
- Melakukan reviu terhadap permohonan pengajuan pengembangan Aplikasi sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 445 tahun 2023 tentang Standar Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Melakukan reviu terhadap pengajuan pengadaan Alat Pengolah Data sesuai ketentuan yang diatur dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor 211 tahun 2024 tentang Standar Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Melakukan penjaminan mutu dan kualitas pengelolaan TIK melalui penerapan ISO 9001:2015 tentang *Quality Management System*, ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan ISO 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi;



Gambar 3.5 Dokumentasi Audit Internal ISO 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi



Gambar 3.6 Dokumentasi Audit Eksternal ISO 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi



Gambar 3.7 Dokumentasi Audit Internal ISO 9001:2015 tentang Quality Management System, ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan

9. Telah dilaksanakan pembahasan draft Keputusan Kepala Badan POM tentang Standar Infrastruktur TIK, guna memperkuat kebijakan dan standarisasi infrastruktur TIK.
10. Telah dilaksanakan reviu dan evaluasi SOP mikro fungsi infrastruktur dan fasilitas pusat data, guna meningkatkan efektivitas dan kualitas operasional.
11. Telah dilaksanakan sosialisasi SOP makro Manajemen Layanan Berbasis Elektronik, guna meningkatkan pemahaman dan implementasi tata kelola layanan SPBE.
12. Telah dilaksanakan reviu pedoman manajemen konfigurasi dan prosedur operasional kendali keamanan informasi, guna memperkuat pengendalian keamanan sistem.
13. Telah dilaksanakan pembahasan lembar isian peta arsitektur SPBE, guna mendukung penyelarasan arsitektur SPBE.
14. Telah dilaksanakan pembahasan rencana kegiatan Tim Infrastruktur dan Fasilitas Pusat Data Tahun 2026, guna mendukung perencanaan kegiatan yang terarah.
15. Telah dilaksanakan koordinasi pemanfaatan PDN, PDNS, JIP, dan *Government Cloud* dengan Komdigi, guna memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional.
16. Telah dilaksanakan kunjungan dan audiensi terkait pengembangan ekosistem PDN, guna memperkuat sinergi antar instansi.
17. Telah dilaksanakan reviu daftar risiko Pusdatin dan infrastruktur TIK, guna memastikan pengelolaan risiko yang optimal.
18. Telah dilaksanakan rapat manajemen risiko infrastruktur TIK, guna meningkatkan mitigasi risiko layanan TIK.
19. Telah dilaksanakan rapat internal terkait manajemen risiko, guna memperkuat pengendalian internal organisasi.
20. Telah dilakukan pengisian formulir SPIP-T Tahun 2025, guna memenuhi aspek pengendalian intern pemerintah.
21. Telah dilaksanakan audit internal dan eksternal SMKI ISO/IEC 27001:2022, guna memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan informasi.

22. Telah dilaksanakan pembahasan tindak lanjut hasil audit melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), guna mendukung perbaikan berkelanjutan.\
23. Telah dilaksanakan persiapan audit internal dan eksternal SMK ISO/IEC 27001:2022, guna memastikan kesiapan pelaksanaan audit.
24. Telah dilaksanakan pembahasan data dukung audit IKASANDI, guna memenuhi kebutuhan audit keamanan informasi.
25. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi PDNS dan JIP Tahun 2025, guna memastikan optimalisasi layanan infrastruktur nasional.
26. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan internet Triwulan III Tahun 2025, guna meningkatkan efisiensi penggunaan jaringan.
27. Telah dilaksanakan pembahasan kegiatan prioritas pengembangan e-Pantau, guna mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan.
28. Telah dilaksanakan pemanfaatan server lama sebagai server pengembangan (development server), guna optimalisasi pemanfaatan aset TIK.
29. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan standar infrastruktur, guna memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan.
30. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan infrastruktur (triwulanan), guna memastikan capaian kegiatan sesuai target.
31. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi pengadaan alat pengolah data Triwulan IV, guna memastikan kesesuaian pelaksanaan pengadaan.
32. Telah dilaksanakan pembahasan analisis kebutuhan sewa peralatan infrastruktur, guna mendukung perencanaan kebutuhan yang efisien.
33. Telah dilaksanakan pembahasan penerapan *Network Access Control* (NAC) pada koneksi WiFi, guna meningkatkan keamanan dan pengendalian akses jaringan.
34. Telah dilaksanakan pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan infrastruktur Tahun 2026, guna mendukung perencanaan pengadaan yang efektif.
35. Telah dilaksanakan pembahasan persiapan pelaksanaan pengadaan Tahun 2026, guna memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan.

36. Telah dilaksanakan *Proof of Concept* (PoC) *Privileged Access Management* (PAM), guna memperkuat pengendalian akses pengguna.
37. Telah dilaksanakan *Proof of Concept* (PoC) dan implementasi pemantauan sistem menggunakan *Dynatrace*, guna meningkatkan keandalan dan kinerja sistem.
38. Telah dilaksanakan pembahasan persiapan dan pelaksanaan audit keamanan informasi (ISO dan IKASANDI), guna memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan.
39. Telah dilaksanakan rapat update teknologi dengan berbagai mitra penyedia layanan TIK, guna memperoleh informasi teknologi terkini.
40. Telah dilaksanakan eksplorasi dan pembahasan teknologi Kubernetes dan cloud, guna mendukung pengembangan infrastruktur modern.
41. Telah dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi Tim Infrastruktur dan Fasilitas Pusat Data terkait pending issue, guna percepatan penyelesaian permasalahan.
42. Telah dilaksanakan pembahasan dan evaluasi realisasi pembelian APD Tahun Anggaran 2025, guna memastikan kesesuaian dengan perencanaan.
43. Telah disusun surat tanggapan kepada KOMDIGI terkait pengelolaan infrastruktur pusat data, guna memenuhi kebutuhan koordinasi dan penyampaian informasi.
44. Implementasi indikator SPLP, manajemen data dan layanan data terbuka dalam rangka penerapan SPBE pada tahun 2025 sebagai berikut:
 - A. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)

Kegiatan yang dilaksanakan terkait SPLP pada tahun 2025 meliputi kegiatan sebagai berikut:

 - 1) Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan setiap triwulan untuk memastikan kelancaran proses integrasi data serta mengevaluasi kendalanya.
 - 2) Koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait rencana penguatan mekanisme integrasi data dari lingkungan BPOM, Portal Satu Data ke SPLP. Pembahasan difokuskan pada penyelarasan pendekatan integrasi dengan memperhatikan karakteristik arsitektur sistem masing-masing pihak serta kesiapan teknis yang ada, sebagai dasar perumusan langkah integrasi berikutnya secara bertahap.

- 3) Penguatan peran Portal Satu Data BPOM dalam alur SPBE, di mana Portal Satu Data BPOM berfungsi sebagai produsen data BPOM, SPLP sebagai sistem penghubung, dan Satu Data Indonesia (SDI) sebagai platform data nasional yang dikelola oleh Kementerian PPN/Bappenas. Berdasarkan hasil pemantauan, dataset yang tersedia di Portal Satu Data BPOM telah tercermin pada daftar data yang ditampilkan di SDI, menunjukkan keterhubungan aliran data antar platform telah berjalan secara konseptual dan operasional.



Gambar 3.8 Dokumentasi

- 4) Keikutsertaan Pusdatin dalam Rapat WGRD Seri VII: Rakortek Penajaman DP 2026 dan Pemetaan Kebutuhan Data Dukung Daerah pada Selasa, 16 Desember 2025, yang diselenggarakan oleh Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintah Digital, Kementerian PPN/Bappenas. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam penajaman Daftar Data Prioritas Tahun 2026 serta memperkuat sinkronisasi kebutuhan data antara pemerintah pusat dan daerah.
- 5) Penyusunan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pengusulan Data Prioritas BPOM Tahun 2026 kepada seluruh unit produsen data sebagai wadah pengusulan data prioritas, baik internal maupun eksternal. Proses pengusulan data dilaksanakan pada periode 28 November 2025 hingga 10 Desember 2025 untuk selanjutnya diusulkan melalui aplikasi perencanaan data milik Bappenas.
- 6) Pelaksanaan pembahasan dan konfirmasi Usulan Data Prioritas BPOM Tahun 2026 bersama unit pengusul pada 17 Desember 2025 dan 19 Desember 2025, guna memastikan

kesesuaian usulan data dengan kebutuhan perencanaan nasional serta prinsip Satu Data Indonesia.

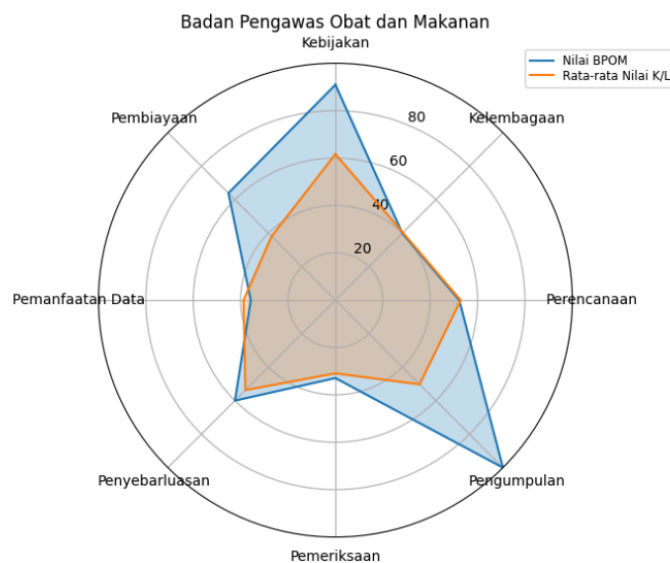
- 7) Pada triwulan IV 2025 telah dilaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dan Daerah yang merupakan penilaian pelaksanaan SDI di lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Daerah dalam penyelenggaraan kualitas data untuk mendukung perencanaan pembangunan. Penilaian dilakukan untuk tahun $n-1$ sehingga data dukung yang disampaikan adalah seluruh kegiatan di tahun 2024. Periode penilaian Evaluasi Penyelenggaraan SDI 2025 dilaksanakan dalam rentang waktu 14 Oktober - 30 November 2025. Hasil evaluasi **SDI yang dilaksanakan tahun 2025** sebesar **80,08 dengan predikat BAIK**. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Nilai Indeks Domain dan Indeks SDI			
No	Indeks	Bobot	Nilai
1	Domain Kebijakan dan Kelembagaan	34%	65.45
2	Domain Penyelenggaraan SDI	43%	55.40
3	Domain Data Leadership	23%	46.74
Indeks Satu Data Indonesia			56.92

Tabel 3.1 Nilai Indeks Domain dan Indeks SDI

Nilai Indeks Aspek			
No	Aspek	Bobot	Nilai
1	Aspek Kebijakan	17%	90.95
2	Aspek Kelembagaan	17%	39.94
3	Aspek Perencanaan	11%	52.27
4	Aspek Pengumpulan	6%	100.00
5	Aspek Pemeriksaan	18%	32.90
6	Aspek Penyebarluasan	8%	60.00
7	Aspek Pemanfaatan Data	14%	35.71
8	Aspek Pembiayaan	9%	63.89

Tabel 3.2 Nilai Indeks Aspek

**Gambar 2**

Hasil Penilaian Evaluasi SDI

Gambar 3.9 Hasil Penilaian Evaluasi SDI

Adapun rekomendasi dari SDI terkait hasil evaluasi SDI di lingkungan BPOM yang dinilai pada tahun 2025 antara lain:

No	Domain	Rekomendasi
1	Kebijakan dan Kelembagaan	• Perlunya menyesuaikan peraturan mengacu kepada Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.91/M.PPN/HK/10/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia • Perlunya menyelenggarakan Forum SDI untuk menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Rencana Aksi SDI
2	Penyelenggaraan SDI	• Walidata mengumpulkan usulan Data Prioritas dari produsen data • Menyusun Standar data dan metadata Statistik serta berkoordinasi dengan pembina data statistik dalam penyusunan • Dapat mengintegrasikan Kode Referendi/data Induk ke dalam Portal SDI • Dapat menggunakan dan menerapkan data induk yang telah ditetapkan oleh forum SDI, dan mengusulkan kode

No	Domain	Rekomendasi
		referensi yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM Dapat menyebarluaskan seluruh data prioritas ke Portal SDI dan melakukan uji konsekuensi untuk menentukan data yang dapat diakses oleh publik
3	Data Leadership	- Dapat memanfaatkan data dalam dokumen Perencanaan Pembangunan - Dapat mengintegrasikan Portal dengan layanan lainnya melalui SPLP - Dapat menyusun metadata dari kegiatan pendataan - Dapat menyusun Arsitektur Domain Data dan Informasi Pemerintah Digital - Dapat menggunakan source code atau konfigurasi sistem dengan memastikan adanya validasi referential integrity - Dapat menyusun SOP Operator Administrasi Bisnis Data atau dashboard monitoring API terupdate

Tabel 3.3 Rekomendasi SDI

- 8) Interoperabilitas data bersama Kementerian ataupun Lembaga lain yang salah satunya adalah kegiatan interoperabilitas data antara BPOM dengan BGN, BPS, BPJPH, KPI, serta BPOM dengan Kemenkes yang tertuang dalam *project charter* dalam rangka kegiatan KKSK.



Gambar 3.10 Dokumentasi Kegiatan interoperabilitas data dengan Kemenkes

B. Manajemen Data

Kegiatan manajemen data selama tahun 2025 meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan reviu terhadap pedoman manajemen data di lingkungan BPOM berdasarkan hasil Evaluasi Satu Data Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 2024



Gambar 3.11 Dokumentasi Kegiatan reviu pedoman manajemen satu data di lingkungan BPOM

- 2) Pembahasan SOP yang terkait penyelenggaraan Satu Data di lingkungan BPOM dilaksanakan pada tanggal 14, 19 dan 20 November 2025 dengan hasil diskusi sebagai berikut:
 - a. Pembahasan terkait SOP Satu Data di lingkungan BPOM menghasilkan 3 rancangan SOP Makro yang sebelumnya pada diskusi awal masih terdapat 8 rancangan SOP.
 - b. SOP Penyelenggaraan Satu Data BPOM, SOP yang terdiri dari alur perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data.
 - c. SOP Pengusulan Kode Referensi/Kode Induk, merupakan SOP Makro yang membahas alur pengajuan Kode Referensi/Kode Induk dari BPOM ke Sekretariat Satu Data Indonesia
 - d. SOP Forum Satu Data BPOM, SOP yang mengakomodir penyelenggaraan Satu Data di lingkungan BPOM berkaitan dengan kebijakan, penetapan, pengendalian dan monitoring peraturan yang berlaku

C. Layanan Data Terbuka

Layanan data terbuka merupakan kegiatan penyajian data dan informasi. Salah satunya adalah BPOM *Command Center* (BCC) dan WebGIS BPOM. Kegiatan selama tahun 2025 antara lain:

- 1) Monitoring dan evaluasi pemanfaatan akun di BCC



Gambar 3.12 Dokumentasi Kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan akun di BCC

- 2) Pemutakhiran dashboard BCC. Beberapa contoh pemutakhiran dashboard antara lain:

- Dashboard Piagam Program Manajemen Risiko
- Dashboard E-Payment (Simponi)
- Dashboard Monitoring Pengajuan Pengembangan Aplikasi 2025
- Dashboard Profil Peraturan, Standar dan Pedoman Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- Dashboard Peta GKPD
- Dashboard Rekomendasi Kebijakan Standar Pangan Olahan
- Dashboard Manajemen Risiko Pusdatin
- Dashboard Persebaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN)

- 3) Penambahan dan pemutakhiran *layer* pada WebGIS BPOM. Beberapa contoh penambahan *layer* pada WebGIS BPOM antara lain:

- Peta Sebaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
- Peta Profil UPT - Anggaran UPT 2025
- Lokasi Absen Pegawai
- Peta Distribusi Laporan Kasus Keracunan
- Peta Distribusi Laporan Kasus Keracunan KLB-KP
- Peta Sebaran Pelaku Usaha Bersertifikasi BPOM (CPOB, CDOB, CPKB, CPPOB, CPOTB)

- 4) Kunjungan di BCC dalam rangka pemanfaatan informasi terbagi menjadi beberapa kategori yaitu Instansi pendidikan, Instansi pemerintah, Media, Masyarakat dan Pelaku Usaha. Selama tahun 2025 terdapat beberapa kunjungan dari instansi pendidikan, media ataupun pemerintahan seperti:

- Kunjungan Kantor Kepresidenan ke BCC Tanggal 13 Februari 2025



Gambar 3.13 Dokumentasi Kunjungan Kantor Kepresidenan ke BCC Tanggal 13 Februari 2025

- Kunjungan Tamu Acara International Symposium on Dissolution Science & Quality Drug Development pada tanggal 29 Juli 2025



Gambar 3.14 Dokumentasi Kunjungan Tamu Acara International Symposium on Dissolution Science & Quality Drug Development pada tanggal 29 Juli 2025

- Kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik pada Tanggal 31 Oktober 2025



Gambar 3.15 Dokumentasi Kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik pada Tanggal 31 Oktober 2025

- Kunjungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada Tanggal 13 Oktober 2025



Gambar 3.16 Dokumentasi Kunjungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada Tanggal 13 Oktober 2025

- Kunjungan Ghana Food and Drugs Authority pada Tanggal 5 November 2025



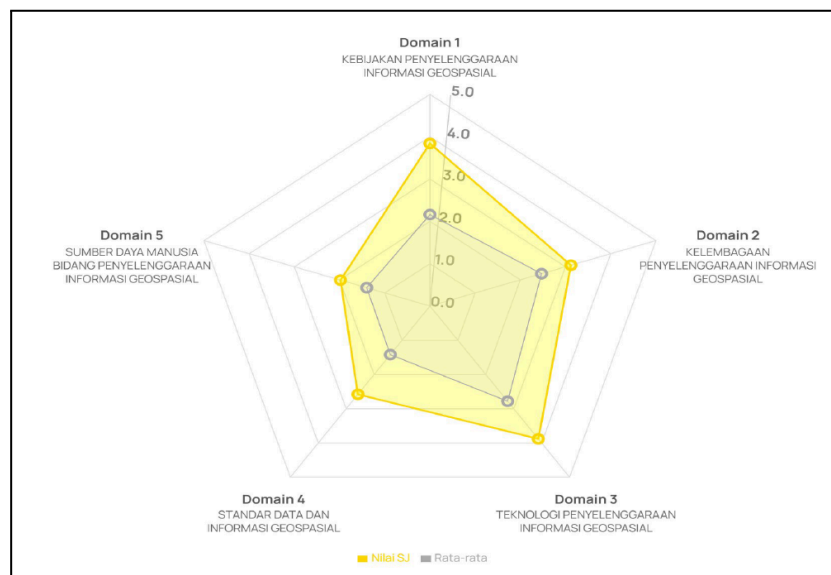
Gambar 3.17 Dokumentasi Kunjungan Ghana Food and Drugs Authority pada Tanggal 5 November 2025

- 5) Pada triwulan IV 2025 telah dilakukan pengisian form Penilaian Kinerja Simpul Jaringan yang merupakan penilaian pelaksanaan Simpul Jaringan di lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Daerah yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Penilaian dilakukan untuk tahun 2025. Periode pengisian form penilaian Simpul Jaringan dilaksanakan dalam rentang waktu Januari - 28 November 2025. Tahap Verifikasi oleh BIG telah dilakukan pada tanggal 29 November

2025 - 13 Januari 2026. Hasil penilaian kinerja simpul jaringan pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 2,96 dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 2,57 dengan predikat **BERKEMBANG**. Adapun rincian penilaian tersebut sebagai berikut:

Nama Indeks	Nilai Tahun 2025
Domain 1 - Kebijakan Penyelenggaraan IG	3.84
Aspek 1 - Peraturan / dasar hukum	2.64
Aspek 2 - Rencana Kerja dan Penganggaran	1.20
Domain 2 - Kelembagaan Penyelenggaraan IG	3.12
Aspek 1 - Pengelola Simpul Jaringan	2.10
Aspek 2 - Koordinasi dan Kerjasama	1.02
Domain 3 - Teknologi Penyelenggaraan IG	3.88
Aspek 1 - Perangkat keras dan lunak	0.68
Aspek 2 - Aplikasi Penyebarluasan DG IG	3.20
Domain 4 - Standar Data IG	2.58
Aspek 1 - Ketersediaan DG IG	1.08
Aspek 2 - Manajemen dan kualitas DG IG	1.50
Domain 5 - Sumber daya Manusia bidang IG	1.98
Aspek 1 - Pemenuhan SDM IG	1.28
Aspek 2 - Pengembangan Kapasitas	0.70

Tabel 3.4 Rincian Penilaian Kinerja Simpul Jaringan Tahun 2025



Gambar 3.18 Rincian Penilaian Kinerja Simpul Jaringan Tahun 2025 berdasarkan Domain

Rekomendasi penilaian kinerja simpul jaringan tahun 2025 sebagai berikut:

- Menetapkan daftar data (spasial dan statistik) beserta unit kerjanya, serta menyelesaikan penyusunan roadmap dan SOP penyelenggaraan informasi geospasial.

- b. Memperkuat kelembagaan melalui penetapan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sebagai walidata serta pelaksanaan forum koordinasi secara berkala dan kolaboratif.
 - c. Berdasarkan pelaporan yang ada, saat ini yang terdaftar pada tanahair.indonesia.go.id adalah Selanjutnya dapat diregistrasikan geoportal geonode apabila telah selesai pengembangan.
 - d. Menyusun spesifikasi produk data geospasial, menerapkan manajemen kualitas pada setiap tahapan penyelenggaraan IG, serta mengoptimalkan penggunaan KUGI untuk interoperabilitas data.
 - e. Sumber daya manusia perlu ditingkatkan melalui pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan penyusunan peta jabatan fungsional surveyor pemetaan, serta penguatan program peningkatan kapasitas SDM bidang informasi geospasial melalui pelatihan dan beasiswa pendidikan tinggi secara terarah dan berkelanjutan.
- 6) Persiapan serta koordinasi terkait pemanfaatan AI dalam analisis data di BPOM.



Gambar 3.19 Dokumentasi Persiapan serta koordinasi terkait pemanfaatan AI dalam analisis data di BPOM.



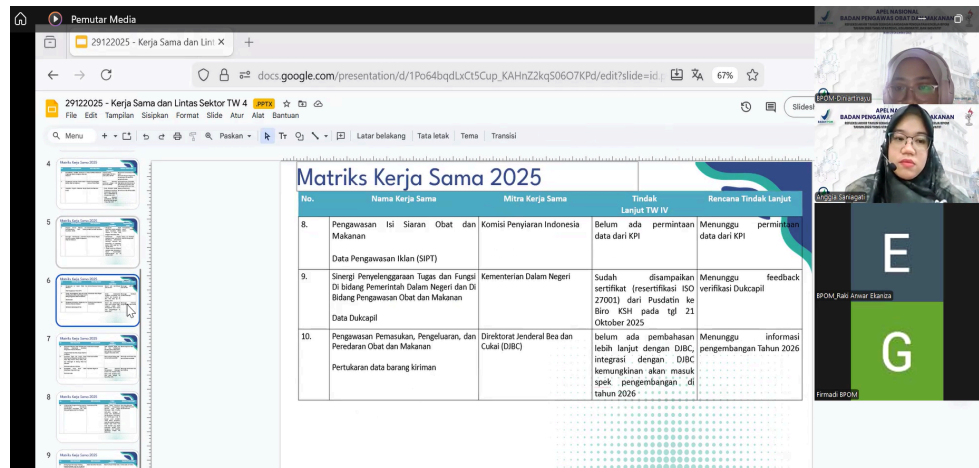
Gambar 3.20 Dokumentasi Persiapan serta koordinasi terkait pemanfaatan AI dalam analisis data di BPOM.

D. Kerjasama Lintas Sektor

Pada tahun 2025, kegiatan kerjasama lintas sektor meliputi:

- 1) Kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi pertukaran data yang dilakukan setiap triwulan sebagai salah satu bentuk kerjasama lintas sektor
- 2) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin) secara proaktif meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan melalui penguatan sinergi dan kolaborasi digital dengan berbagai lembaga strategis. Upaya ini difokuskan pada tiga pilar utama: penguatan keamanan siber melalui kerja sama dengan BSSN dan BIN , percepatan interoperabilitas data untuk layanan publik yang lebih terintegrasi bersama Kementerian Kesehatan (melalui platform SatuSehat), BPJPH (data halal), dan Ditjen Bea Cukai (data pengawasan impor) , serta dukungan terhadap program prioritas nasional seperti pertukaran data dengan Badan Gizi Nasional untuk Program Makanan Bergizi Gratis. Selain itu, Pusdatin juga terus mengimplementasikan sertifikat elektronik secara masif yang kini telah mencapai 1.023 sertifikat aktif di 15 sistem elektronik , serta memajukan pertukaran data dengan Kemendagri untuk pemanfaatan data kependudukan dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk pengawasan iklan. Rangkaian inisiatif ini menunjukkan komitmen Pusdatin dalam membangun ekosistem pengawasan digital yang andal dan terpadu untuk memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat.

- 3) Sejumlah isu tertunda dari tahun 2024 telah ditindaklanjuti, termasuk kerja sama dengan BPJPH terkait aliran data halal, BIN terkait perlindungan keamanan informasi layanan digital, Kemenkes mengenai integrasi layanan dan interoperabilitas data kesehatan (KKSK), BGN terkait sinergitas Program Makanan Bergizi Gratis, dan KPI terkait pengawasan isi siaran iklan obat dan makanan. Perkembangan ini menunjukkan komitmen kuat dalam menyelesaikan hambatan dan mempercepat sinergi antar lembaga.
- 4) Kerja sama dengan BSSN mengenai Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik telah mencakup kehadiran dalam Forum Analisis dan Berbagi Informasi TTIS serta kegiatan Pengukuhan Bersama Tim Tanggap Insiden Siber.
- 5) Hingga akhir tahun 2025, berbagai inisiatif pertukaran data terus dimatangkan, termasuk dukungan data untuk Kementerian PPPA terkait pangan jajanan aman bagi anak sekolah dan koordinasi data Bantuan Operasional Kesehatan dengan Kementerian Keuangan. Meski beberapa kerja sama seperti dengan Bea Cukai dan KPI masih dalam tahap menunggu pengembangan teknis atau permintaan data formal, Badan POM telah memetakan rencana tindak lanjut untuk tahun 2026. Hal ini mencakup perluasan sertifikasi elektronik dan optimalisasi Satu Data guna mendukung daya saing produk UMKM serta penegakan hukum bersama Kepolisian RI.



No.	Nama Kerja Sama	Mitra Kerja Sama	Tindak Lanjut TW IV	Rencana Tindak Lanjut
8.	Pengawasan Isi Siaran Obat dan Makanan Data Pengawasan Iklan (SIPT)	Komisi Penyiaran Indonesia	Belum ada permintaan data dari KPI	Menunggu permintaan data dari KPI
9.	Sinergi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Di bidang Pemerintah Dalam Negeri dan Di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan Data Dukcapil	Kementerian Dalam Negeri	Sudah disampaikan sertifikat (sertifikasi ISO 27001) dari Pusdatin ke Biro KSH pada tgl 21 Oktober 2025	Menunggu verifikasi Dukcapil feedback
10.	Pengawasan Pemassukan, Pengeluaran, dan Peredaran Obat dan Makanan Pertukaran data barang kiriman	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)	belum ada pembahasan lebih lanjut dengan DJBC, integrasi dengan DJBC kemungkinan akan masuk spek pengembangan di tahun 2026	Menunggu informasi pengembangan Tahun 2026

Gambar 3.21 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Lintas Sektor yang dikelola oleh Pusdatin Tahun 2025

45. Indeks Kematangan keamanan siber

Telah dilaksanakan asesmen Indeks Keamanan Informasi dan Persandian (IKASANDI) Tahun 2025 dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan capaian Indeks Keamanan Siber Level 5 (Inovatif) dan Indeks Penyelenggara Persandian Level 4 (Terkelola), berikut *timeline* kegiatannya :



Gambar 3.22 Dokumentasi asesmen Indeks Keamanan Informasi dan Persandian (IKASANDI) Tahun 2025



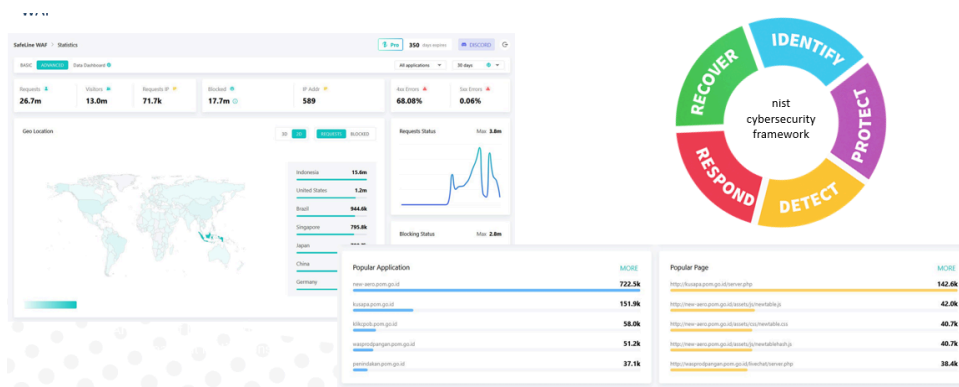
Gambar 3.23 Sertifikat hasil asesmen Indeks Keamanan Informasi dan Persandian (IKASANDI) Tahun 2025

- a. Pada tanggal 13 Agustus 2025, Badan POM diundang untuk mengikuti kegiatan Focus Group Discussion - Sosialisasi dan Asistensi Instrumen pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor administrasi pemerintah yang diselenggarakan oleh Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat - BSSN
- b. Pada tanggal 17 September 2025 telah dilaksanakan kegiatan rapat internal Pusdatin, yaitu Koordinasi Persiapan Penilaian IKASANDI 2025 pada Aplikasi e-Sertifikasi dan Notifikos
- c. Pada tanggal 1 Oktober 2025 telah dilaksanakan Reviu hasil Self Assessment IKASANDI dan pembahasan tindak lanjut
- d. Pada tanggal 23 Oktober 2025 telah dilakukan rapat internal pusdatin, yaitu Pembahasan lanjutan hasil reviu Self Assessment IKASANDI
- e. Tanggal 27 Oktober 2025 dilakukan Kick Off Meeting IKASANDI dengan mengundang Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat BSSN

- f. Tanggal 28-30 Oktober 2025 telah dilaksanakan kegiatan Penilaian IKASANDI Tahun 2025
- g. Pada tanggal 15 Desember 2025 Badan POM telah menghadiri undangan diseminasi hasil pengukuran tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Sektor Pemerintah Pusat, Pertahanan, dan Penegakan Hukum Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh BSSN.

46. Monitoring Keamanan Informasi di lingkungan BPOM

Dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko terjadinya serangan siber di lingkungan BPOM, Pusdatin telah melakukan langkah strategis dengan pemasangan beberapa teknologi keamanan yang selalu dilakukan pemantauan atau monitoring pada aplikasi tersebut. Berdasarkan hal tersebut berikut kegiatan yang mendukung rencana hasil kerja sebagai berikut:



Gambar 3.24 Tampilan Aplikasi Safeline WAF

- a. Pada bulan Juni telah dilakukan pembelian lisensi *Web Application Firewall (WAF) Safeline* untuk mendukung monitoring keamanan aplikasi. Kemudian secara rutin dilakukan monitoring pada WAF yang telah dipasang pada aplikasi berbasis web di lingkungan BPOM, guna mencegah terjadinya serangan siber.
- b. Pada tahun 2025 juga dilakukan perubahan lisensi yang digunakan untuk melindungi perangkat. Hal ini berdasarkan hasil kajian dan tahap *proof of concept (POC)* pada tahun 2024. Selanjutnya dilakukan monitoring pada *Antivirus End User Coro* yang telah terpasang pada endpoint berupa laptop pegawai di lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
- c. Sebagai rekomendasi audit ISO 27001 pada tahun 2024 juga telah dilakukan perubahan lisensi yang digunakan pada server aplikasi yang memiliki kemampuan sebagai *Extended Detection dan Response*. Selanjutnya dilakukan monitoring pada *Antivirus Server (Trend Micro)* yang telah terpasang pada server-server aplikasi milik BPOM. Karena keterbatasan sumber daya, pembelian dapat dilakukan pada 13 server

sedangkan sisanya masih menggunakan lisensi yang disediakan oleh Komdigi.

- d. Telah dilaksanakan kerjasama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) terkait monitoring keamanan siber melalui perangkat Trellix guna memperkuat perlindungan *endpoint* dan meningkatkan ketahanan sistem informasi di lingkungan BPOM. Pada tahun 2025 juga dilakukan rekonfigurasi perangkat dari yang semula mode *mirror* menjadi mode *inline* yang memudahkan dalam proses merespon anomali.



Gambar 3.25 Koordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) terkait monitoring keamanan siber melalui perangkat Trellix

- e. Telah dilaksanakan kerjasama monitoring *leaked credential* dengan Badan Intelijen Negara (BIN) terkait kebocoran data yang tersebar di *dark web*. Informasi terkait akun yang bocor kemudian disampaikan pada pengelola aplikasi untuk dilakukan pengamanan.

47. Penanganan Insiden Siber

Laporan terkait insiden yang terjadi serta penanganannya selama periode bulan Januari – Desember 2025, sebagai berikut:

- a. Ringkasan Insiden Selama tahun 2025, jumlah insiden yang dilaporkan sebanyak 31 insiden dengan rincian sebagai berikut:
 - Total Insiden dilaporkan: 31
 - Insiden terselesaikan: 30
 - Insiden dalam proses: 1
 - Insiden ditolak/tidak valid: 0
- b. Kategori Insiden Insiden yang dilaporkan diklasifikasikan berdasarkan kategori berikut:

No.	Kategori Insiden	Jumlah Insiden
1.	Backdoor	28
2.	SQL Injection	2
3.	Data Leak	1

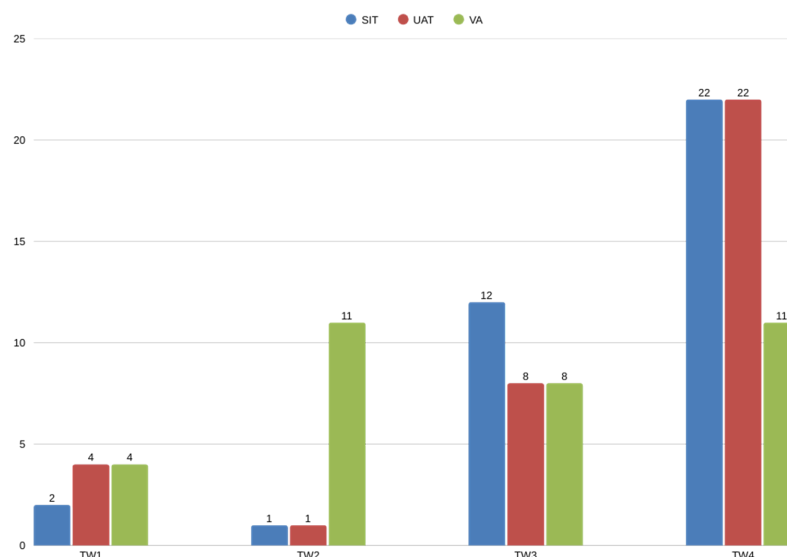
Tabel 3.5 Jumlah Insiden berdasarkan Kategori

c. Rata-rata waktu tindak lanjut untuk penyelesaian insiden berdasarkan kategori:

- Insiden kategori kritikal: 5 hari
- Insiden kategori tinggi: 3 hari
- Insiden kategori menengah: 2 hari
- Insiden kategori rendah: -

48. Pengujian Keamanan

Dalam rangka pembangunan/pengembangan aplikasi yang sesuai Standar Sistem Informasi yang telah ditetapkan, maka perlu dilaksanakan pengujian keamanan terhadap aplikasi/sistem informasi, baik yang sudah berjalan maupun yang telah selesai pembangunan/pengembangan. Pelaksanaan pengujian keamanan bertujuan untuk memastikan sistem terintegrasi dengan baik, aman dan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan fungsi.



Gambar 3.26 Grafik asesmen keamanan aplikasi per TW

Berkaitan hal tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Telah dilaksanakan *Penetration Testing* (pentest) pada 5 aplikasi BPOM (BCC, Asrot, Notifkos, e-sertifikasi, dan Simpelpk) sebagai upaya pengujian keamanan untuk mengidentifikasi kerentanan, mengevaluasi potensi risiko, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan keamanan dan ketahanan sistem informasi.
- b. Selain itu telah dilakukan juga pengujian keamanan melalui *Vulnerability Assessment* (VA) terhadap empat puluh dua (42) aplikasi BPOM. Beberapa celah keamanan yang masih sering ditemukan pada aplikasi seperti *TLS Certificate*, *TLS cookie without secure flag set*, *SQL Injection*, *Cross-Site Scripting* (XSS) dan lain-lain.

49. Business Continuity Plan

Dalam upaya mendukung implementasi ISO 20000 dan ISO 27001, sekaligus memperkuat kesiapan organisasi dalam menghadapi potensi gangguan layanan, Pusdatin telah melaksanakan kegiatan simulasi *Business Continuity Plan* (BCP) melalui Pelaksanaan *Backup* dan *Restore* Sistem Aplikasi.

Bussines Continuity Planning (BCP)



1. Reviu Dokumen Pedoman BCP
2. Implementasi Business Continuity Plan (BCP), Simulasi Insiden *data corrupt* terhadap Aplikasi Badan POM Command Center (BCC), TTE Gateway, E-Sertifikasi, Notifkos dan Email Corporate.

Gambar 3.27 Dokumentasi kegiatan simulasi Business Continuity Plan (BCP) melalui Pelaksanaan Backup dan Restore Sistem Aplikasi

Berikut ini kami laporkan ringkasan pelaksanaan dan hasil kegiatan tersebut:

- 1) Kegiatan simulasi dilaksanakan pada hari Sabtu, 12 Juli 2025 pukul 08.00-12.00 WIB, bertempat di Gedung Phinisi Lantai 6, Pusdatin. Simulasi dilakukan terhadap lima aplikasi Badan POM dengan skenario insiden *data corrupt*, sebagai bentuk pengujian kesiapan sistem dan tim dalam menghadapi situasi gangguan layanan.
- 2) Seluruh tim teknis di Pusdatin terlibat dalam kegiatan tersebut. Koordinasi dan pelaporan insiden dilakukan melalui grup Telegram BCP 2025 dan Aplikasi Helpdesk Pusdatin, sementara informasi kepada publik disampaikan melalui media sosial (Instagram) resmi Pusdatin.
- 3) Aplikasi yang Disimulasikan dan Tabel Terdampak

No	Aplikasi	URL	Tabel Corrupt	Waktu Pemulihan	Total Durasi
1	Email	mail.pom.go.id	mailbox	16 menit	1 jam 38 menit
2	TTE Gateway	ttegate.pom.go.id	officer_tm	17 menit	1 jam 31 menit
3	Badan POM Command Center (BCC)	bcc.pom.go.id	tm_dashbo ard	18 menit	1 jam 34 menit
4	E Sertifikasi	e-sertifikasi.pom.go.id	tb_menu	16 menit	1 jam 21 menit
5	Notifikos	registrasi.pom.go.id	tbl_pengumuman	30 menit	1 jam 28 menit

Tabel 3.6 Aplikasi yang disimulasikan dan tabel terdampak

- 4) Simulasi pemulihan layanan terhadap lima aplikasi Badan POM berhasil dilaksanakan dengan baik. Seluruh insiden *data corrupt* dapat ditangani dalam waktu yang jauh lebih cepat dari target *Recovery Time Objective* (RTO), yaitu maksimal 5 (lima) hari. Waktu pemulihan berkisar antara 16 hingga 30 menit. Kegiatan ini menunjukkan kesiapan tim dan efektivitas prosedur pemulihan yang dimiliki organisasi.

50. Awareness Keamanan Informasi

Dalam rangka meningkatkan Kesadaran Keamanan Informasi serta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman siber, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- 1) Pada TW1 dilakukan pertemuan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Badan POM untuk memberikan gambaran terkait pembangunan aplikasi secara aman dan juga pemanfaatan *tools* Pemindai *Secure Coding*.
- 2) Media sosial adalah salah satu media penyebaran informasi terkait keamanan informasi. Pusdatin juga memanfaatkan media tersebut.



Kampanye Media Sosial "Cegah Serangan Deface Judi Online!"

13 Juni 2025

Gambar 3.28 Postingan media sosial Pusdatin terkait Awareness Keamanan Informasi



5 Juni 2025

Kampanye Media Sosial "Lindungi Dirimu di Dunia Digital!"

13 Juni 2025

Gambar 3.29 Dokumentasi rapat koordinasi Keamanan Informasi bersama BSSN

- 3) Telah dilaksanakan rapat koordinasi Keamanan Informasi bersama BSSN menjelang periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 sebagai upaya untuk memastikan kesiapan sistem, mitigasi risiko, serta keberlangsungan layanan publik. Hasil koordinasi dituangkan dalam infografis untuk seluruh pegawai Badan POM sebagai berikut.



Gambar 3.30 Infografis Imbauan Keamanan Informasi Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

- 4) Telah dilaksanakan kegiatan pembinaan Kesadaran Keamanan Informasi dan peningkatan kompetensi SDM bersama Badan Siber dan Sandi Negara di BBPOM Denpasar secara *hybrid* sebagai upaya meningkatkan kemampuan pegawai Badan POM dalam mengenali, mencegah, dan merespons ancaman siber secara efektif guna menjaga keamanan layanan digital serta meningkatkan kepercayaan publik.

51. Monitoring dan Evaluasi Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS/CSIRT) BPOM
 Perkembangan teknologi informasi memberikan manfaat besar bagi kinerja instansi pemerintah, termasuk BPOM, namun juga meningkatkan resiko ancaman keamanan siber dari segi frekuensi, kompleksitas, dan dampaknya. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga keamanan infrastruktur TI.

Sebagai bagian dari komitmen untuk menghadapi tantangan ancaman siber, Berikut kami laporkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025:

- a. Telah dilaksanakan koordinasi Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS/CSIRT) BPOM 2025 pada bulan Mei, yang berlangsung secara *hybrid* di Gedung Batik lantai 6 dan secara daring. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Unit Kerja Pusat, Balai Besar/Balai POM, serta Loka POM di seluruh Indonesia.
- b. Pada bulan Juli 2025 telah dilaksanakan pengukuhan Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Kesehatan/*Health Sector Computer Security Incident Response Team (Health CSIRT)*, yang merupakan wujud kolaborasi antara Badan POM bersama Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dan BSSN tergabung dalam CSIRT Sektor Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/542/2025.

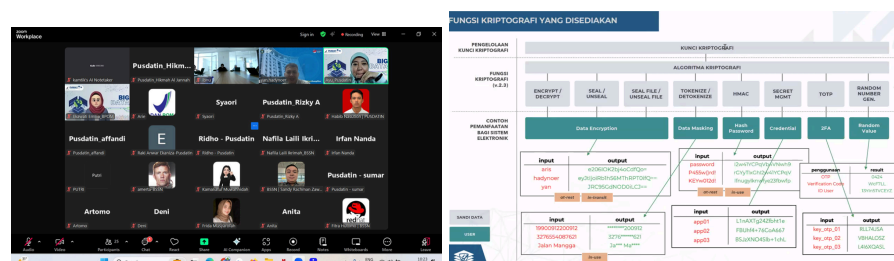
52. Kerjasama Lintas Sektor

Dalam rangka memperkuat Kerja Sama Lintas Sektor guna memperkuat koordinasi antar instansi dan mengintegrasikan peran dan fungsi masing-masing sektor, telah dilaksanakan kerja sama bersama Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

- 1) Melakukan Pembentukan CSIRT Sektor Kesehatan melalui keterlibatan Badan POM bersama Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan BSSN berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/542/2025.
- 2) Melaksanakan kegiatan Pembinaan Kesadaran Keamanan Informasi (*security awareness*) dan Peningkatan Kompetensi SDM bekerja sama dengan BSSN di BBPOM Denpasar secara hybrid.
- 3) Melaksanakan rapat antisipasi insiden siber layanan publik menjelang Nataru 2025 bersama BSSN guna memastikan kesiapan dan keberlangsungan layanan.
- 4) Melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam penanganan domain ilegal yang menyerupai domain resmi BPOM (pom.go.id) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, serta unit terkait di lingkungan BPOM guna memperkuat identifikasi, pelaporan, dan penindakan penyalahgunaan domain.
- 5) Melaksanakan kegiatan Forum Analisis dan Berbagi Informasi CSIRT Sektor Administrasi Pemerintahan Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh BSSN sebagai upaya memperkuat kolaborasi antar-CSIRT, termasuk pemaparan penguatan sistem keamanan informasi BPOM melalui implementasi standar ISO 27001, pengembangan BPOM-CSIRT, serta analisis trend dan penanganan insiden siber.

53. Pengelolaan Persandian

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada Oktober 2024 maka BPOM sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik harus semakin hati-hati dalam mengelola Data Pribadi. Maka pada 14 Maret 2025 Pusdatin mulai melakukan Asistensi Layanan Sandi Data untuk dapat memanfaatkan layanan yang sudah dimiliki oleh BSSN.



Gambar 3.31 Dokumentasi Asistensi Layanan Sandi Data

54. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Peningkatan kompetensi SDM di bidang keamanan TIK dan persandian dilakukan sebagai upaya memperkuat ketahanan sistem informasi dan perlindungan data di lingkungan BPOM. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pelatihan teknis, sertifikasi, serta bimbingan teknis terkait keamanan informasi dan penanganan insiden siber, yang mengacu pada kebijakan nasional dari Badan Siber dan Sandi Negara. Hasil yang diharapkan dari peningkatan kompetensi ini adalah meningkatnya kemampuan SDM dalam mengelola risiko keamanan informasi, menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, serta mendukung keberlangsungan layanan digital yang aman dan andal.



Gambar 3.32 Dokumentasi Asistensi Layanan Sandi Data

Berikut pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh SDM Pusdatin yang diselenggarakan oleh BSSN:

- 1) Pelatihan Penyusunan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi bagi PSE Publik Angkatan ke-4
- 2) Pelatihan Cyber Security Incident Response Angkatan ke-1
- 3) Pelatihan Persandian Dasar
- 4) Pelatihan dan Sertifikasi Level 1 Security Operations Center Analyst

55. Aktivitas dan Fitur Baru pada BPOM Mobile

Berdasarkan data aktivitas BPOM Mobile dari tahun 2018 hingga Desember 2025, aplikasi ini telah diunduh oleh 3.025.936 pengguna, dengan total aktivitas pemindaian atau pemakaian fitur scan 2D barcode mencapai 28.603.939 kali, serta menerima 13.037 laporan pengaduan atau permintaan informasi dari masyarakat.



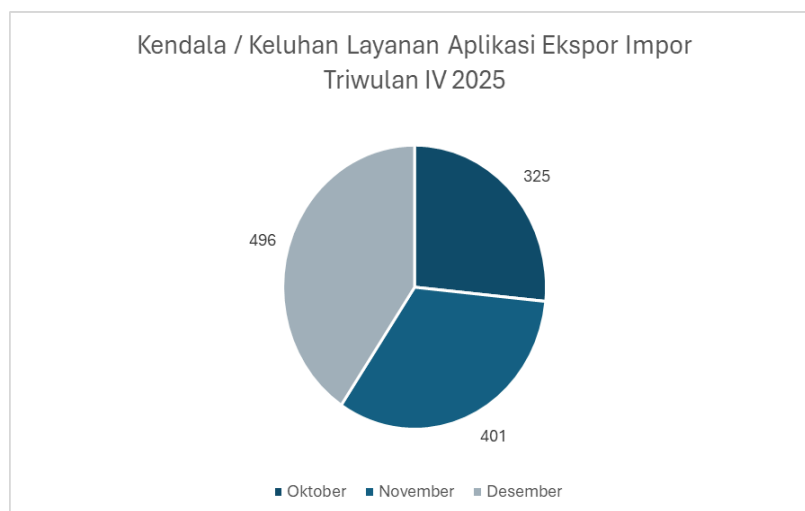
Gambar 3.33 Aktivitas BPOM Mobile 2018-Desember 2025

BPOM Mobile telah memperbarui aplikasi dengan menambahkan beberapa menu baru, yaitu Info Alur Registrasi Produk, Info BPOM di Indonesia, PPID BPOM, dan JDIH BPOM. Bukan hanya menu saja yang diperbarui, ada juga fitur notifikasi, penambahan survei setelah mengakses e-labeling, dan pengaduan efek samping untuk akun tenaga kesehatan (nakes). Versi terbaru BPOM Mobile telah tersedia di *Play Store* dan *App Store*

56. Aplikasi Ekspor Impor (e-BPOM)

e-BPOM adalah platform digital terintegrasi yang diselenggarakan oleh Badan POM sebagai wujud sistem pelayanan publik satu pintu. Platform ini secara spesifik dirancang untuk memfasilitasi proses rekomendasi dan perizinan di bidang Obat dan Makanan, yang mencakup penerbitan Surat Keterangan Ekspor (SKE), Surat Keterangan Impor (SKI), dan *Special Access Scheme* (SAS).

Sebagai bagian dari evaluasi kinerja selama periode Triwulan IV tahun 2025, telah menunjukkan responsivitas yang tinggi dengan berhasil menyelesaikan keluhan yang masuk. Tercatat sebanyak 1.222 aduan yang diterima melalui kanal email telah ditindaklanjuti dan diselesaikan pada Triwulan IV tahun 2025. Berikut adalah diagram yang merinci data keluhan selama periode Triwulan IV tahun 2025:



Gambar 3.34 Grafik Kendala/Keluhan Layanan Aplikasi Ekspor Impor TW IV 2025

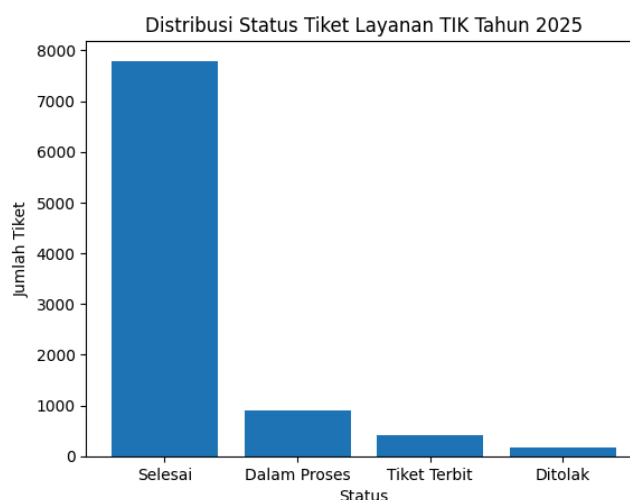
Guna meningkatkan kualitas pelayanan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan terhadap aplikasi ekspor impor tersebut, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan meliputi koordinasi dengan kementerian lembaga terkait. Melalui koordinasi dan sinergi yang kuat, diharapkan dapat tercipta integrasi sistem yang lebih baik sehingga proses perizinan ekspor impor menjadi lebih efisien dan transparan.

57. Pemanfaatan Layanan TIK (KATALISTIK)

Sepanjang Tahun Anggaran 2025, layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan menunjukkan tren peningkatan kinerja dan volume layanan yang signifikan. Total tiket layanan yang tercatat melalui Aplikasi Help Pusdatin/ITSM dan pengembangannya menjadi KATALISTIK mencapai 9.299 tiket, yang terdiri atas permohonan (*request*) dan pengaduan (*incident*). Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.792 tiket atau sekitar 83,8% telah berhasil diselesaikan, sementara sisanya berada dalam proses, tiket terbit, dan sebagian kecil ditolak. Capaian ini mencerminkan tingkat efektivitas pengelolaan layanan yang baik di tengah meningkatnya kebutuhan dukungan TIK di lingkungan kerja.

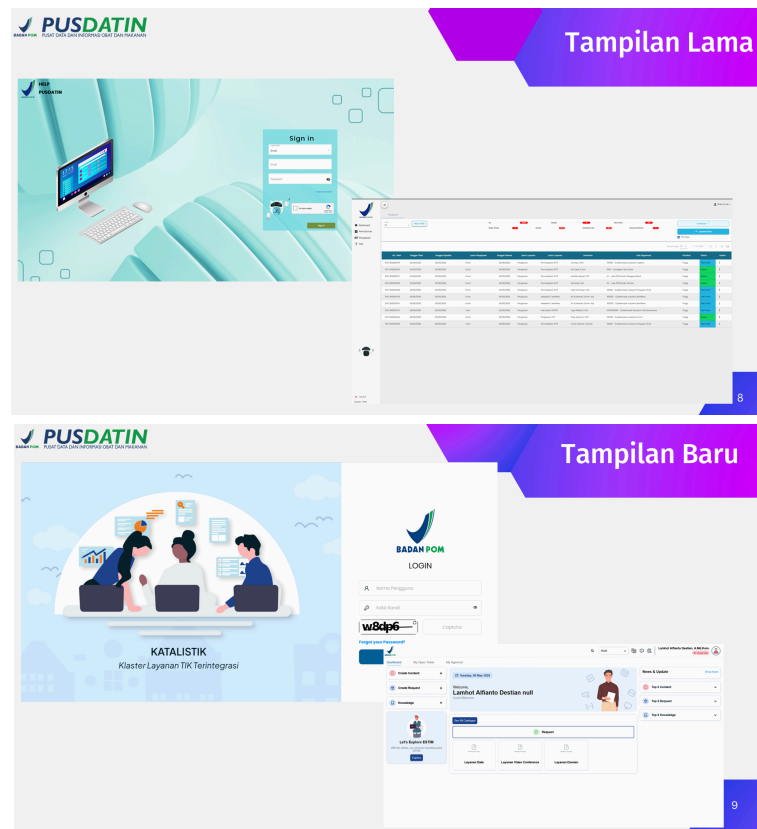
Secara tren triwulanan, volume layanan mengalami dinamika yang cukup signifikan. Pada Triwulan I tercatat 2.025 tiket, kemudian mengalami penurunan pada Triwulan II menjadi 1.294 tiket seiring dengan proses *re-design* dan implementasi sistem layanan berbasis ESTIM. Setelah fase stabilisasi, jumlah tiket kembali meningkat pada Triwulan III menjadi 2.823 tiket dan mencapai angka tertinggi pada Triwulan IV sebesar 3.157 tiket. Peningkatan ini menunjukkan meningkatnya pemanfaatan sistem layanan serta kepercayaan pengguna terhadap kanal layanan TIK yang tersedia.

Dari sisi kinerja waktu tindak lanjut (*service level*), terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada akhir tahun. Jika pada Triwulan I hingga III rata-rata waktu respons berada pada rentang 2–4 hari, maka pada Triwulan IV berhasil ditingkatkan menjadi rata-rata 3–5 jam. Perbaikan ini menunjukkan adanya optimalisasi proses bisnis, peningkatan koordinasi internal, serta kematangan sistem layanan pasca transformasi. Dengan demikian, secara umum layanan TIK tahun 2025 dapat dinilai progresif, adaptif terhadap peningkatan beban kerja, serta menunjukkan perbaikan kualitas layanan yang terukur dan berkelanjutan sebagai bagian dari dukungan transformasi digital unit kerja.



Gambar 3.35 Distribusi Status Tiket Layanan TIK Tahun 2025

Pada bulan Mei 2025 telah dilakukan sosialisasi perubahan dan pengembangan aplikasi layanan TIK kepada seluruh pengguna sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan dan optimalisasi proses pengelolaan tiket. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan fitur, alur layanan, serta penyesuaian mekanisme pengajuan permohonan dan pengaduan pada sistem yang telah diperbarui. Selanjutnya, aplikasi versi baru tersebut mulai diimplementasikan dan digunakan secara resmi pada tanggal 1 Juni 2025, menandai dimulainya operasional layanan dengan platform yang lebih terintegrasi, responsif, dan mendukung percepatan waktu tindak lanjut layanan.



Gambar 3.36 Tampilan KATALISTIK

IK 2. Persentase data dan sistem informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal dan Terintegrasi, telah dilaksanakan sejumlah program dan kegiatan strategis yang berfokus pada penguatan arsitektur sistem, integrasi data, serta peningkatan keamanan informasi.

Salah satu langkah penting yang telah dilakukan adalah benchmarking teknologi *Single Sign-On* (SSO) ke Perum Peruri sebagai institusi yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan sistem keamanan digital dan identitas elektronik skala nasional. Benchmarking ini bertujuan untuk memperoleh pembelajaran terkait arsitektur autentikasi terpusat, pengelolaan identitas digital (*identity management*), serta penerapan standar keamanan yang mendukung prinsip *high availability* dan *business continuity*.

Selain itu, benchmarking juga dilakukan ke beberapa lembaga pendidikan/universitas yang telah mengimplementasikan SSO terintegrasi dalam ekosistem layanan digitalnya. Praktik baik dari perguruan tinggi memberikan referensi terkait pengelolaan multi-aplikasi, federasi identitas, integrasi sistem

berbasis API, serta penerapan protokol autentikasi modern yang adaptif terhadap kebutuhan pengguna.

Sebagai tindak lanjut konkret dari hasil benchmarking, telah dilakukan *Proof of Concept* (POC) terhadap 2 (dua) aplikasi yang ditetapkan sebagai pilot project implementasi SSO terpusat. POC ini bertujuan untuk:

1. Menguji kompatibilitas protokol autentikasi dengan arsitektur aplikasi eksisting.
2. Mengidentifikasi potensi kendala teknis integrasi dan keamanan.
3. Mengukur performa autentikasi, stabilitas sistem, dan pengalaman pengguna (*user experience*).
4. Menyusun skema replikasi dan roadmap implementasi ke aplikasi lainnya.



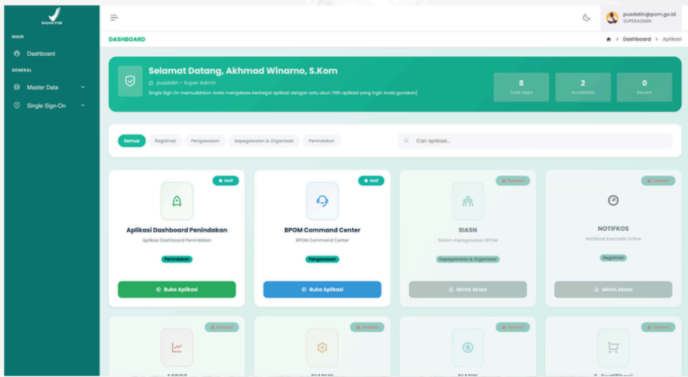
Gambar 3.37 Pelaksanaan Pembahasan teknologi dalam Single Login

Hasil POC menunjukkan bahwa pendekatan autentikasi terpusat mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan akun pengguna, memperkuat kontrol akses, serta mendukung integrasi lintas sistem secara lebih terstruktur. Temuan teknis dari pilot project juga menjadi dasar penyempurnaan standar implementasi sebelum dilakukan perluasan ke seluruh sistem pengawasan.



Gambar 3.38 Pelaksanaan Pembahasan teknologi dalam Single Login

Dengan demikian, rangkaian kegiatan benchmarking dan POC tersebut tidak hanya bersifat konseptual, tetapi telah menghasilkan validasi teknis dan rekomendasi implementatif. Langkah ini secara langsung mendukung peningkatan keandalan, interoperabilitas, dan keamanan sistem informasi pengawasan, serta berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target kinerja organisasi.



Dashboard menyajikan daftar aplikasi BPOM yang dapat diakses oleh pengguna berdasarkan hak akses. Pengguna disambut dengan informasi profil serta statistik jumlah aplikasi yang tersedia, dapat diakses, dan riwayat akses.

Poin Utama untuk Slide:

- Tampilan aplikasi berdasarkan kategori (Registrasi, Pengawasan, Organisasi, Penindakan)
- Fitur pencarian aplikasi
- Indikator status aplikasi (Aktif / Terkunci)
- Navigasi dashboard yang intuitif dan terstruktur

Gambar 3.39 Hasil Portal Single Sign On yang mengintegrasikan ke Aplikasi

Proof of Concept (POC) terhadap implementasi SSO dengan melibatkan dua aplikasi percontohan, yaitu **BPOM Command Center (BCC)** dan **Aplikasi Penindakan Kedeputian IV**. Hasil POC menunjukkan bahwa mekanisme autentikasi terpusat dapat berjalan dengan baik, serta mampu mendukung integrasi akses lintas aplikasi secara optimal.

Melalui dashboard SSO, pengguna dapat mengakses berbagai aplikasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, memantau status akses, serta melakukan permintaan hak akses secara mandiri. Fitur ini memberikan kemudahan dalam pengelolaan akun sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sistem.

Keberhasilan pelaksanaan POC ini menjadi landasan penting bagi pengembangan lebih lanjut implementasi SSO secara menyeluruh di lingkungan Badan POM. Ke depan, integrasi akan diperluas ke seluruh aplikasi strategis guna mewujudkan ekosistem sistem informasi yang terintegrasi, andal, dan real-time, sejalan dengan visi pembangunan digital Badan POM.

IK 3. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) merupakan suatu penilaian yang dihasilkan dari Evaluasi Penyelenggaraan Statistik (EPSS) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral, keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

Mengacu pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022, terdapat tiga tahapan penilaian EPSS, yaitu penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI), penilaian dokumen, serta penilaian interviu, dan/atau penilaian visitasi oleh Tim Penilai Badan (TPB). Nilai diperoleh berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) oleh Badan Pusat Statistik mengacu pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral atau dari Hasil Penilaian Mandiri Tim Penilai Internal BPOM.

Berdasarkan Surat Dinas Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor B-236/02000/TS.160/2025 tanggal 7 Mei 2025 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral TA 2025 tidak dilaksanakan. Penilaian EPSS dilaksanakan dua tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, sehingga **hasil penilaian tahun 2025 menggunakan hasil EPSS tahun 2024 dengan nilai indeks sebesar 2,61 dengan predikat “Baik”**. Upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan EPSS yaitu

1. Pembinaan Statistik Sektoral oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan Pembinaan Statistik Sektoral sepanjang bulan Mei 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara *hybrid*, memadukan metode luring di Gedung Phinisi lantai 6 dengan partisipasi daring melalui Zoom, dan diikuti oleh berbagai kementerian dan lembaga seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Mahkamah Konstitusi, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan instansi lainnya. Kegiatan pembinaan terbagi dalam enam pertemuan berdasarkan domain penyusun Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) meliputi: Prinsip Satu Data Indonesia, Proses Bisnis Statistik, Kualitas Data, Kelembagaan Statistik, Sistem Statistik Nasional (SSN), serta Standar Data Statistik (SDS). Pada pembinaan ini BPS menekankan pentingnya menerapkan prinsip Satu Data Indonesia (SDI), Proses Bisnis Statistik berbasis *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM) dalam menjamin data yang berkualitas serta Sistem Statistik Nasional (SSN) untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia optimal dengan menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi statistik dan menciptakan sistem statistik yang andal, efektif dan efisien. Harapan dari pembinaan statistik sektoral ini untuk peningkatan kualitas dan kesiapan dalam evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral yang mendatang.

Pada pembinaan ini dilakukan diskusi terkait cara meningkatkan statistik sektoral berdasarkan dari hasil evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2024. Adapun Hasil diskusi sebagai berikut:

- a. Usulan kegiatan yang akan diajukan BPOM dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral tahun 2026 yaitu: Survei Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu dan Kompilasi Data Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- b. Melakukan pengajuan standar data statistik terhadap data prioritas RPJMN 2025 - 2029.
- c. BPOM perlu melakukan perbaikan dan melengkapi standar data dan metadata statistik yang telah diajukan terhadap kegiatan statistik di aplikasi Indonesia Data HUB (INDAH) BPS
- d. Untuk meningkatkan Kualitas Data, PUSDATIN selaku Walidata perlu menyusun Petunjuk Teknis terkait perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan, hingga penyebarluasan data statistik yang dapat menjadi acuan oleh seluruh produsen data di BPOM
- e. Peningkatan dalam domain Kelembagaan yang bertujuan melakukan penjaminan transparansi informasi statistik dilakukan dengan menyusun dan melakukan reviu ABK untuk SDM bidang manajemen data (JF Prakom) dan bidang statistik (JF Statistisi) secara berkala

- f. Melakukan reviu Kebijakan Manajemen Data di BPOM khususnya terkait data statistik dan data spasial serta Petunjuk Teknis yang dibutuhkan.
- g. Mendorong produsen data di BPOM untuk melakukan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik terutama kegiatan yang menjadi Data Prioritas RPJMN 2025-2029 yang ada di BPOM melalui aplikasi romantik.web.bps.go.id.



Gambar 3.40 Dokumentasi Kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral



Gambar 3.41 Dokumentasi Kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral

2. Penyusunan Metadata Statistik

Kegiatan ini bertujuan untuk melengkapi metadata dari data-data prioritas yang telah ditetapkan oleh Bappenas sesuai dengan RPJMN. Penyusunan metadata statistik ini merupakan salah satu Prinsip Satu Data Indonesia. Pengisian metadata statistik terdiri dari 3 aspek yaitu Metadata kegiatan, Metadata indikator dan Metadata variabel. Metadata merupakan rincian dari proses suatu data dibuat dan disebarluaskan. Adapun indikator yang disusun berdasarkan data prioritas RPJMN yaitu Persentase Sediaan Farmasi Aman dan Bermutu, Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik, Persentase obat Aman dan Bermutu, Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu, Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu, Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu, Persentase Fasilitas yang Dibina untuk Melakukan Pendampingan Kepada UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik, Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu, Persentase Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu, dan Persentase Kabupaten Kota Pangan Aman

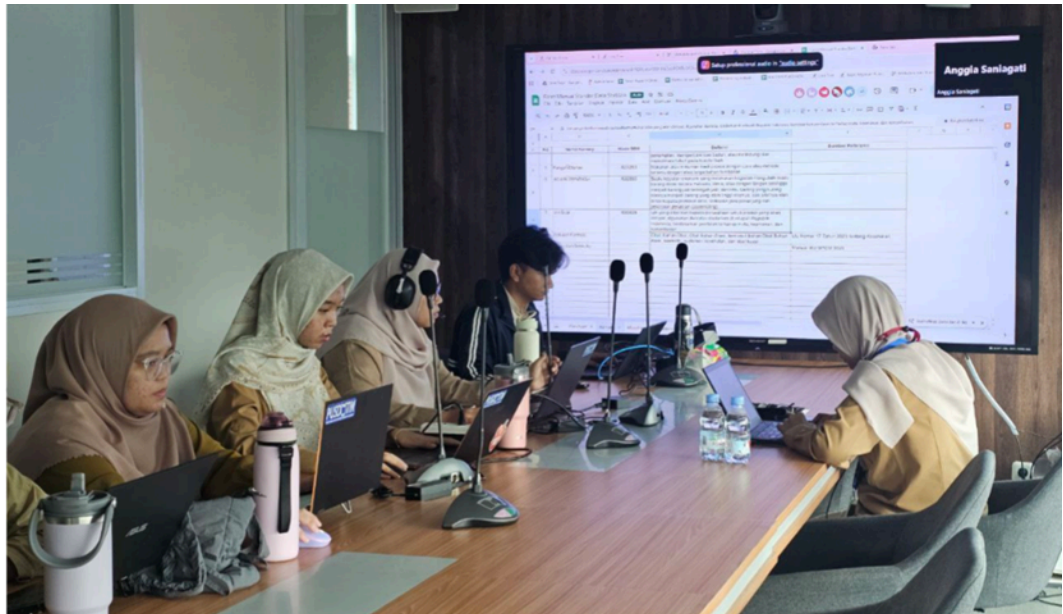


Gambar 3.42 Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Metadata Statistik

3. Penyusunan Standar Data Statistik

Selain Metadata Statistik, Standar Data Statistik juga merupakan Prinsip Satu Data Indonesia. Penyusunan standar data statistik juga dilakukan bersama produsen data terhadap data prioritas RPJMN 2025 - 2029. Penyusunan dilakukan secara berjenjang dari konsep, variabel /

klasifikasi hingga indikator data prioritas. Jika konsep sudah tersedia pada aplikasi Indonesia Data Hub (INDAH) milik BPS dan masih sesuai maka tidak perlu disusun kembali. Rapat Penyusunan Standar Data Statistik Nasional dilakukan pada tanggal 18 November 2025 dan 25 November 2025.



Gambar 3.43 Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Standar Data Statistik

Sasaran Kegiatan 2

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

IK 1. Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2025; Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

Pembangunan ZI di Pusdatin telah dilakukan evaluasi, dimana tujuan evaluasi dimaksud adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil evaluasi PMPZI Pusdatin memperoleh nilai total sebesar 86,60 dari target 86,52, sehingga persentase capaian kinerja tercatat sebesar 100,09%, dengan kriteria **“SANGAT BAIK”** dan mengalami kenaikan jika dibanding tahun sebelumnya sebesar 86,31. Nilai RB Pusdatin mengalami kenaikan dan melampaui target yang telah ditetapkan namun tetap harus terus melakukan perbaikan karena Pusdatin telah mendapat predikat WBK pada Tahun 2017 dan telah melaksanakan kegiatan pembangunan ZI berkesinambungan.

Rekomendasi hasil evaluasi tahun 2025 oleh TPI telah ditindaklanjuti oleh Pusdatin sebagai berikut:

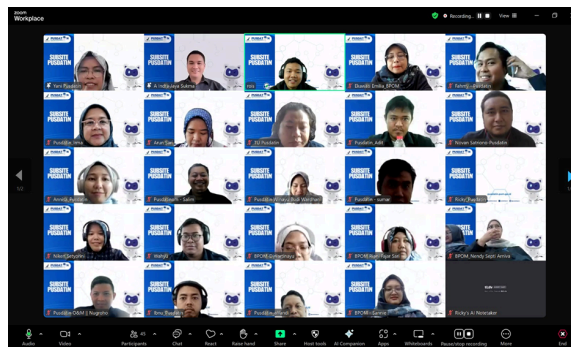
1. Proses pemilihan Tim pembangunan ZI berdasarkan penugasan dan rekam jejak setiap pegawai.
2. Melakukan sosialisasi pembangunan ZI kepada pelanggan seluruh unit teknis dan UPT.
3. Pimpinan terlibat pada rapat penyusunan perencanaan kegiatan, kinerja dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap triwulanan.
4. Kendala dan tindak lanjut dalam mencapai nilai indeks RB telah dilengkapi pada setiap laporan pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi pembangunan ZI.

5. Pengembangan kompetensi pegawai telah sesuai dengan pemenuhan *Trend Need Analysis* (TNA).
6. Pemberian *reward* dan *punishment* sudah berdasarkan Hasil penilaian kinerja individu yang sudah ditetapkan sesuai dengan pedoman pemberian rewards punishment.
7. Penambahan channel kanal pengaduan berkadar pengawasan pada aplikasi help Pusdatin (KATALISTIK).

Upaya yang telah dilakukan Pusdatin sehingga mendorong peningkatan capaian Nilai Pembangunan ZI sebagai berikut:

1. Melakukan pembangunan ZI secara konsisten dan berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN dan RB pada tahun 2017.
2. Dalam rangka meningkatkan implementasi pembangunan ZI di Pusdatin, telah dilakukan kegiatan *benchmarking* ke unit kerja dengan capaian nilai ZI terbaik, yaitu Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta Direktorat Registrasi Pangan Olahan.
3. Melakukan berbagai upaya peningkatan pelayanan antara lain:
 - a. Telah dilakukan reviu kebijakan standar layanan sesuai dengan inovasi layanan publik dan penyesuaian dengan aplikasi layanan KATALISTIK (itsm.pom.go.id)
 - b. Melakukan perubahan tools pemberian *reward* dan *punishment*
 - c. Seluruh staf Pusdatin telah mengikuti pelatihan literasi digital yang terdapat pada ideas.pom.go.id dengan judul E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital.
 - d. Telah dibangun aplikasi e-pantau yaitu sebagai tools monitoring pengelolaan keuangan di Pusdatin.
 - e. Telah dikembangkan modul pengaduan berkadar pengawasan pada aplikasi layanan KATALISTIK
 - f. Melaksanakan internalisasi pemahaman terkait gratifikasi dan benturan kepentingan secara berkala pada setiap triwulan.

Dalam mengukur keberhasilan terhadap layanan Pusdatin, secara berkala Pusdatin melakukan survei Pelayanan Publik dan Persepsi Anti Korupsi yang dilakukan setiap bulan. Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,53 (syarat 3,6) tidak memenuhi persyaratan minimal dan Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK) sebesar 3,67 (syarat 3,6) diatas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.



Gambar 3.44 Dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulanan



Gambar 3.45 Dokumentasi Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi bersama dengan Inspektorat



Gambar 3.46 Dokumentasi Rapat Pembahasan Progress Program Prioritas

IK 2. Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk menetapkan, mengukur, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah. Sistem ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi penggunaan anggaran serta berorientasi pada hasil nyata (result-oriented) bagi masyarakat. Implementasi SAKIP mencakup seluruh proses manajemen kinerja, meliputi:

- 1) Perencanaan Kinerja: Penyusunan Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
- 2) Pengukuran Kinerja: Pengumpulan data, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran kinerja.
- 3) Pelaporan Kinerja: Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- 4) Evaluasi Kinerja: Evaluasi internal/eksternal untuk menilai pencapaian sasaran dan perbaikan kinerja

Sebagai Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin) memiliki komitmen penuh dalam mengimplementasikan SAKIP sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Implementasi ini merupakan instrumen pertanggungjawaban atas pemanfaatan anggaran yang dilakukan secara efektif dan efisien guna mencapai target strategis organisasi dalam memberikan pelayanan publik di bidang data dan informasi.

Pelaksanaan SAKIP di Pusdatin mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025, dengan fokus utama pada transformasi birokrasi yang bersih, profesional, dan transparan. Berikut adalah rangkaian capaian dan kegiatan strategis implementasi SAKIP Pusdatin sepanjang tahun 2025:

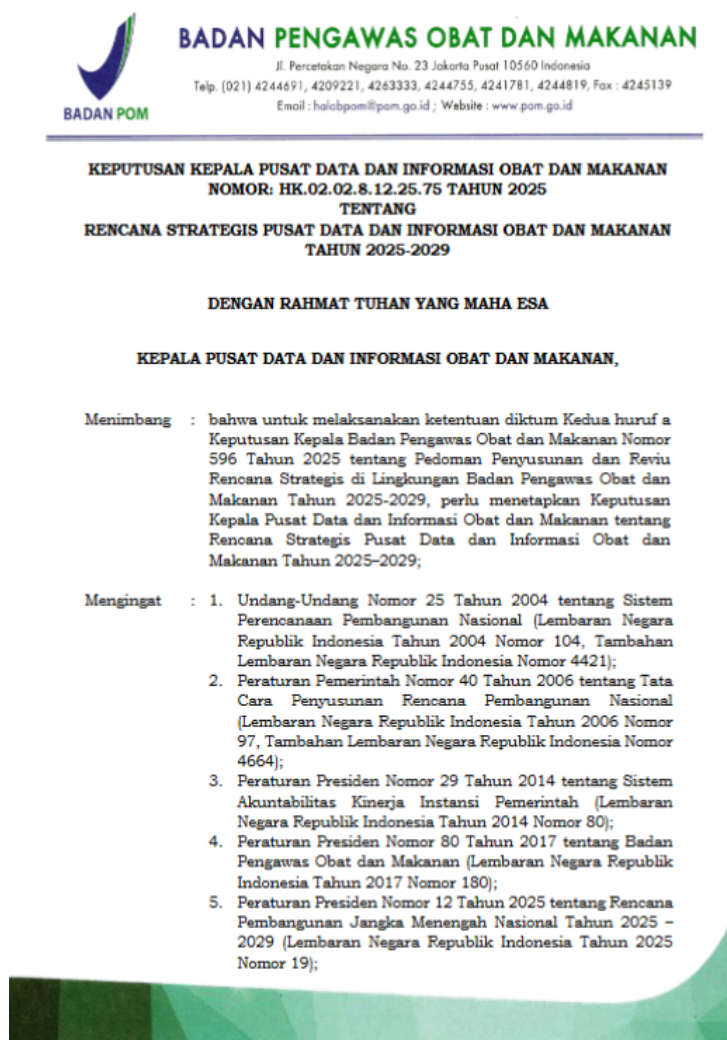
1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja (IK) yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Penyusunan rencana kinerja mempertimbangkan evaluasi atas pencapaian kinerja periode sebelumnya untuk memastikan perbaikan berkelanjutan dalam menjaga kesinambungan arah dan tujuan organisasi.

Selama tahun 2025, Pusdatin telah melakukan perencanaan kinerja dengan menyusun beberapa dokumen perencanaan seperti :

1) Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Pusdatin merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun untuk acuan kerja Pusdatin selama tahun 2025-2029. Renstra ini disahkan pada tanggal 5 Desember 2025 dan secara garis besar berisikan analisis SWOT, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama, target serta kerangka pendanaan yang dibutuhkan Pusdatin selama 5 tahun kedepan. Untuk Rencana Strategis Pusdatin tahun 2025-2029 dapat diakses melalui subsite Pusdatin pada link <https://pusdatin.pom.go.id/>



Gambar 3.47 Rencana Strategis Pusdatin 2025-2029

2) Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan kinerja untuk tahun $n+1$ yang disusun sebagai panduan awal dalam menentukan target organisasi di tahun selanjutnya. RKT Pusdatin tahun 2026 telah disahkan pada tanggal 7 Oktober 2025.

RENCANA KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	Persentase data dan sistem informasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang andal dan terintegrasi	40%
		Indeks Pemerintah Digital	2,00
		Indeks Pembangunan Statistik	3,00
2	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	86,73
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81,89
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	5
		Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	2,97
3	Terwujudnya Pelayanan Publik BPOM Berbasis Digital yang Terintegrasi	Persentase Pemenuhan Layanan Publik yang Terintegrasi dengan Nasional	31%
4	Terwujudnya Tatakelola Manajemen TIK yang Profesional	Persentase Pemenuhan Tata Kelola TIK BPOM yang Terstandar	100%

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN,



ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA

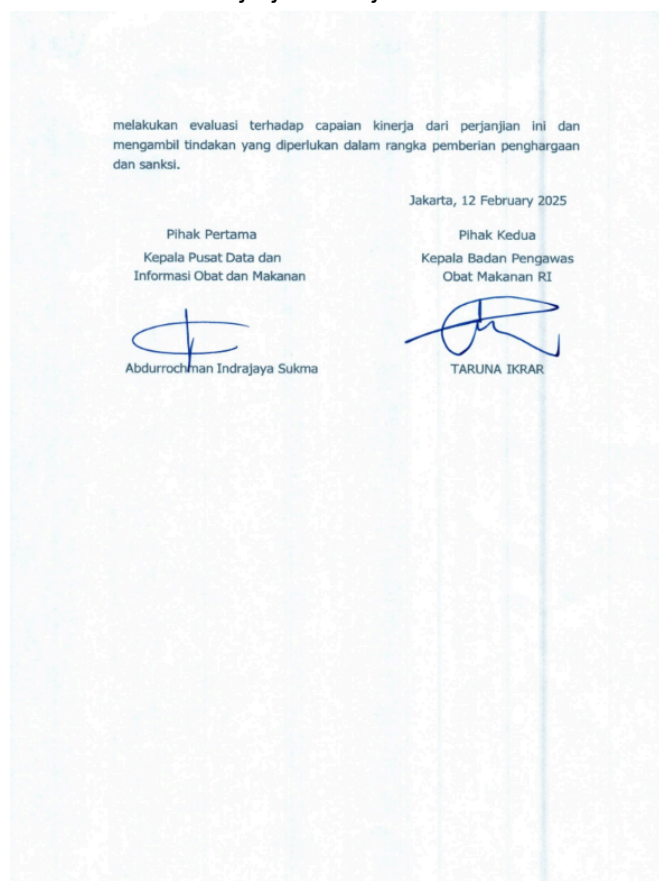
Gambar 3.48 Rencana Kinerja Tahunan 2026

3) Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Pusdatin ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2025. Perjanjian kinerja ini dimanfaatkan oleh pimpinan unit kerja sebagai instrumen untuk memantau capaian kinerja secara berkala serta sebagai alat pengendalian dalam pencapaian kinerja organisasi.



Gambar 3.49 Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2025



Gambar 3.50 Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2025

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	01 - Nilai Indeks SPBE	4,59 Nilai
		02 - Persentase data dan sistem informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi	20 %
		03 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,8 Nilai
2.	02 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	01 - Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	86,52 Nilai
		02 - Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81,88 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	97,47 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	2,94 Nilai

Gambar 3.51 Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2025

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 44.521.934.000 (Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.4114 - Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	44.521.934.000

Jakarta, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan



Abdurrochman Indrajaya Sukma

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI



TARUNA IKRAR

Gambar 3.52 Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2025

Sehubungan dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis Badan POM Tahun 2025-2029 yang berdampak pada perubahan prioritas dan asumsi strategis, sehingga berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, maka berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM, diperlukan penyesuaian terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Pusdatin tahun 2025. Revisi Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2025 dilakukan dengan penyesuaian target pada indikator Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Kinerja Anggaran, tanpa mengubah nomenklatur Sasaran Kegiatan maupun Indikator Kinerja Kegiatan lainnya. Dokumen revisi Perjanjian Kinerja tersebut telah disahkan pada tanggal 29 Agustus 2025.



Gambar 3.53 Revisi Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2025

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	01 - Persentase data dan sistem informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi	20 %
		02 - Indeks SPBE	4.59 Nilai
		04 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.61 Indeks
2.	02 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	86.52 Nilai
		02 - Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81.88 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	2.94 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 45,468,340,000 (Empat Puluh Lima Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.4114 - Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	45,468,340,000

JAKARTA, 29 August 2025

Pihak Pertama
KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN



ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA

Pihak Kedua
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN RI



TARUNA IKRAR

Gambar 3.54 Revisi Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2025

4) Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, turut disusun rencana aksi perjanjian kinerja sebagai pedoman pelaksanaan untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan dinamika pelaksanaan kegiatan, telah dilakukan penyesuaian target triwulanan terhadap rencana aksi perjanjian kinerja pada indikator Indeks SPBE sebanyak satu kali. Rencana aksi sebelum dilakukan penyesuaian tersebut disahkan pada tanggal 12 Februari 2025

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET											ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		
1.	01 - Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	01 - Nilai Indeks SPBE												4.59	25,785,944,000
		02 - Persentase data dan sistem informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi												20	4,934,400,000
		03 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)												2.8	2,266,266,000
2.	02 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	01 - Nilai Pembangunan TI Pusat Data dan Informasi												86.52	106,533,000
		02 - Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi												81.88	1,194,499,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi												97.47	10,082,714,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi												2.94	151,578,000
Total														44,521,934,000	

JAKARTA, 12 February 2025

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN


ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA

Gambar 3.55 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2025

Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dilakukan guna memastikan penilaian kinerja organisasi triwulanan Kepala Pusdatin dapat dilaksanakan secara optimal oleh pejabat penilai. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 15 April 2025 telah dilakukan penyesuaian target triwulanan pada indikator Indeks SPBE.

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN											
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	01 - Nilai Indeks SPBE			4.53			4.53			4.53			4.59	25.785.944.000
		02 - Persentase data dan sistem informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi												20	4.934.400.000
		03 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)												2.8	2.266.266.000
2.	02 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	01 - Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi												86.52	106.533.000
		02 - Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi												81.88	1.194.499.000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi												97.47	10.082.714.000
		04 - Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi												2.94	151.578.000
Total															44.521.934.000

Jakarta, 15 April 2025

Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Abdurrochman Indrajati Sukma, S.Kom, M.Kom

Gambar 3.56 Revisi 1 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2025

Selain melakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja, Pusdatin juga melakukan revisi dokumen RAPK pada tanggal 29 Agustus 2025. Revisi tersebut mencakup penyesuaian target pada indikator Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Kinerja Anggaran, serta penyesuaian alokasi anggaran pada masing-masing indikator.

Perubahan target pada nilai Indeks Pembangunan Statistik disebabkan adanya Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS), khususnya Pasal 7, yang menyebutkan bahwa EPSS dilaksanakan setiap **dua tahun sekali** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Selain itu, dengan mempertimbangkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024, rencana *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2025–2045, serta Roadmap RB 2025–2029, kegiatan EPSS

Tahun 2025 **tidak dilaksanakan**. Ketentuan tersebut sebagaimana disampaikan dalam Surat Plt.Sestama BPS Nomor B-236/02000/TS.160/2025 tanggal 7 Mei 2025 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan EPSS TA 2025 di Instansi Pusat. Oleh karena itu pengukuran capaian kinerja IPS tahun 2025 menggunakan hasil resmi EPSS tahun 2024 sebagai dasar penilaian, dan target disesuaikan dengan capaian tahun 2024 sebesar 2,61.

Sedangkan untuk perubahan target Nilai Kinerja Anggaran disebabkan oleh adanya konversi penilaian dari Nilai 1-100 menjadi Indeks 1-5, sehingga target disesuaikan menjadi angka 5.


RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	01 - Persentase data dan sistem informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi												20	4,186,151,000
		02 - Indeks SPBE			4.53			4.53			4.53			4.59	336,661,000
		04 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)												2.61	12,337,836,000
2.	02 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi												86.52	1,969,979,000
		02 - Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi												81.88	12,365,724,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi												5	13,687,239,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi												2.94	584,750,000
Total															45,468,340,000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interim dan Tahunan).

Jakarta, 29 August 2025

Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan



Abdurrobbil Indraja Sukma

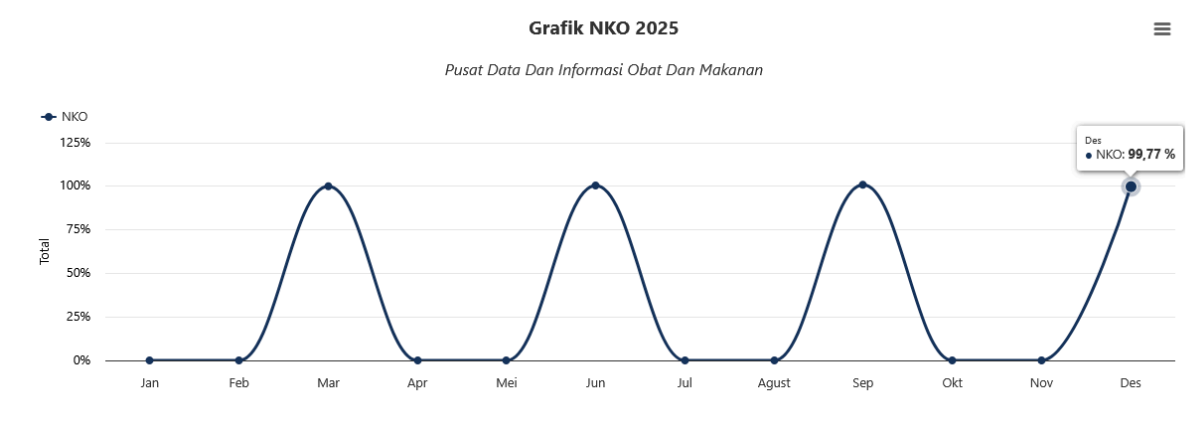
Gambar 3.57 Revisi 2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2025

2. Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja (IK) yang telah ditetapkan dan disahkan.

Pengukuran kinerja di Pusdatin, dilakukan dengan melihat capaian yang diperoleh oleh Pusdatin lalu dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada tahun 2025 hampir seluruh target Indikator Kinerja Utama Pusdatin tercapai, sehingga Nilai Kinerja Organisasi yang diperoleh oleh Pusdatin mencapai 99,77% dengan kategori “**BAIK**”.

Data Update 09 Februari 2026 10:02



Gambar 3.58 Grafik Nilai Kinerja Organisasi Pusdatin tahun 2025

3. Pelaporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Sepanjang tahun 2025 Pusdatin telah menyusun beberapa laporan kinerja yang disusun tiap triwulan sebagai monitoring dari capaian kinerja Pusdatin sepanjang tahun 2025, berikut laporan yang telah dibuat:

- 1) Laporan Kinerja Interim Triwulan I
- 2) Laporan Kinerja Interim Triwulan II

- 3) Laporan Kinerja Interim Triwulan III
- 4) Laporan Kinerja Tahun 2024

Dalam laporan tersebut, berisikan penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Pusdatin, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Selain itu, Laporan Kinerja juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Analisis/Evaluasi atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

4. Evaluasi Kinerja

Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dan sesuai dengan rencana, serta untuk mengetahui dampak dari pencapaian tujuan tersebut. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan SAKIP, evaluasi kinerja internal merupakan evaluasi kinerja yang dilaksanakan untuk menilai efektivitas program/kegiatan yang dilaksanakan, mengidentifikasi kendala/hambatan, dan menyusun rekomendasi perbaikan serta memastikan pengelolaan risiko untuk memastikan pencapaian tujuan. Dengan penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan yang terintegrasi, maka evaluasi kinerja internal merupakan bentuk tinjauan manajemen, yang dapat dilakukan baik sebagai tinjauan manajemen secara parsial maupun secara menyeluruh.

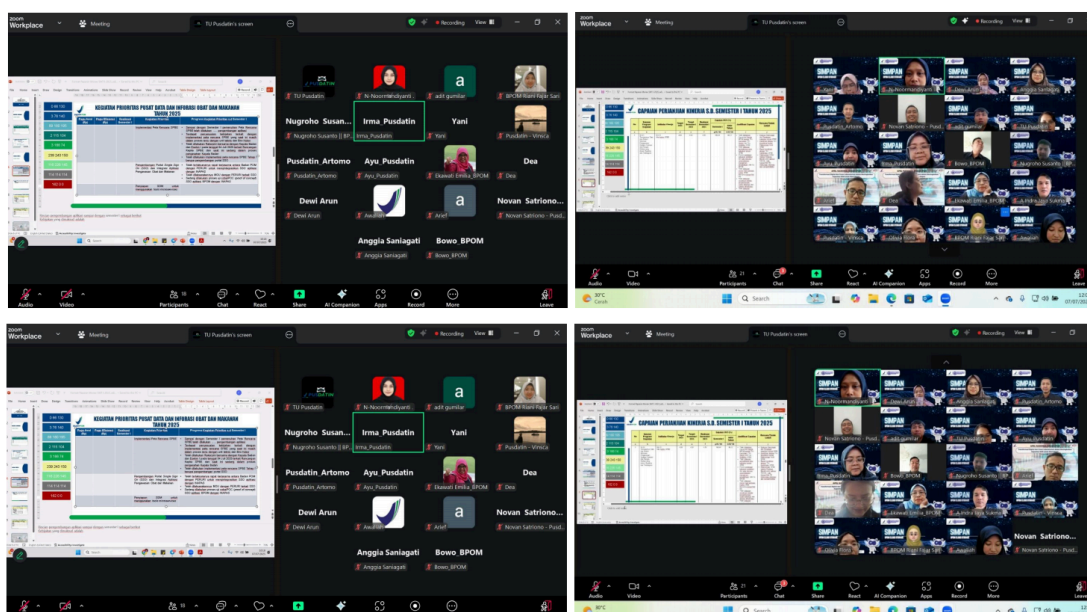
Pada tahun 2025, Pusdatin melakukan evaluasi kinerja secara berkala yang dilaksanakan setiap bulan dan triwulanan. Evaluasi tersebut membahas kegiatan kegiatan yang telah dilakukan selama bulan berjalan, kendala yang dihadapi, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi, sehingga target yang ditentukan dapat tercapai. Selain itu juga terdapat pembahasan terkait anggaran untuk memastikan anggaran sudah terealisasi sesuai dengan rencana penarikan dana (RPD).

Evaluasi bulanan dilakukan dengan cara melakukan pengisian monev pada aplikasi e-performance dan juga e-monev Bappenas pada setiap bulannya. Masing masing fungsi menginformasikan capaian dari masing masing Indikator Kinerja Utama beserta dengan kendala yang dihadapi serta rencana tindak lanjutnya.

Sedangkan evaluasi yang dilakukan secara Triwulan dilakukan di bulan selanjutnya setelah triwulan itu berakhir, Kegiatan evaluasi ini dilakukan secara langsung, yang dihadiri oleh seluruh karyawan Pusdatin dan dihadiri oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan



Gambar 3.59 Dokumentasi Evaluasi Internal TW I



Gambar 3.60 Dokumentasi Evaluasi Internal TW II

DOKUMENTASI



Gambar 3.61 Dokumentasi Evaluasi Internal TW III

DOKUMENTASI



Gambar 3.62 Dokumentasi Evaluasi Internal TW IV

IK 3. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker yang terdiri dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (EKA) dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dengan proporsi penilaian 50% Nilai EKA dan 50% Nilai IKPA. Sebagai upaya peningkatan Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusdatin dilakukan pembahasan rutin untuk melakukan monitoring dan evaluasi setiap capaian indikator. Sesuai dengan hasil yang diperoleh pada aplikasi MONEV KEMENKEU TA 2025, Satker Pusdatin berhasil meraih Nilai Kinerja Anggaran sempurna yaitu 100 dan dikategorikan menjadi indeks 5.



No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	063.01.632455	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	100,00	100,00	100,00

Gambar 3.63 Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusdatin TA 2025

Sebagai langkah meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2025, maka:

1. Dilakukan monitoring terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran dengan target pencairan anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana yang telah ditetapkan sebelumnya;
2. Revisi DIPA maksimal 2 (dua) kali dalam satu semester;
3. Kontrak Pra DIPA 2025 dilakukan untuk menambah nilai akselerasi pada komponen penilaian pelaksanaan kontraktual;
4. Memaksimalkan UP dan TUP Tunai sehingga tidak ada pengembalian sisa TUP ke Negara serta pelaporan LPJ GUP/GUP Nihil dilakukan tepat waktu;
5. Memaksimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sesuai dengan target yang telah ditetapkan setiap triwulan;
6. Penyampaian SPM dilakukan tepat waktu;
7. Memaksimalkan pemanfaatan anggaran pada tagging RO SBK Layanan BMN;
8. Tercapainya realisasi kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran.

IK 4. Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi

Dalam rangka implementasi manajemen risiko di Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin) Tahun 2025, Pusdatin telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan indeks Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di lingkungan Pusdatin. Sebagai langkah awal dalam implementasi manajemen risiko di Pusdatin pada tanggal 5 Februari 2025 telah disusun SK Tim Penyelenggara Manajemen Risiko di Satuan Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2025 melalui Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.8.02.25.18. Dalam perjalanannya, SK Tim tersebut telah mengalami satu kali perubahan yang disebabkan oleh adanya perubahan personel tim manajemen risiko.



Gambar 3.64 SK Tim Manajemen Risiko Pusdatin Tahun 2025

Sebagai tindak lanjut hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Pusdatin Tahun 2024, pada tanggal 12 Februari 2025 Pusdatin telah melakukan koordinasi dengan inspektorat untuk mengetahui hal-hal yang belum dilaksanakan secara sempurna dan upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam proses implementasi manajemen risiko Pusdatin.



Gambar 3.65 Dokumentasi Koordinasi Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Pusdatin Tahun 2024 Tanggal 12 Februari 2025

Untuk meningkatkan *knowledge* Tim Manajemen Risiko Pusdatin, pada tanggal 27 Februari 2025 dan 11 Maret 2025 dilaksanakan *Refreshment* Manajemen Risiko dengan mengundang Narasumber Ahli terkait ISO 3000 : 2009. Dalam kegiatan ini Tim Manajemen Risiko Pusdatin juga dilatih untuk dapat melihat, menyusun, memahami, menyikapi, dan mengendalikan risiko yang sudah ada dan kemungkinan timbul dalam pelaksanaan proses bisnis di Pusdatin.

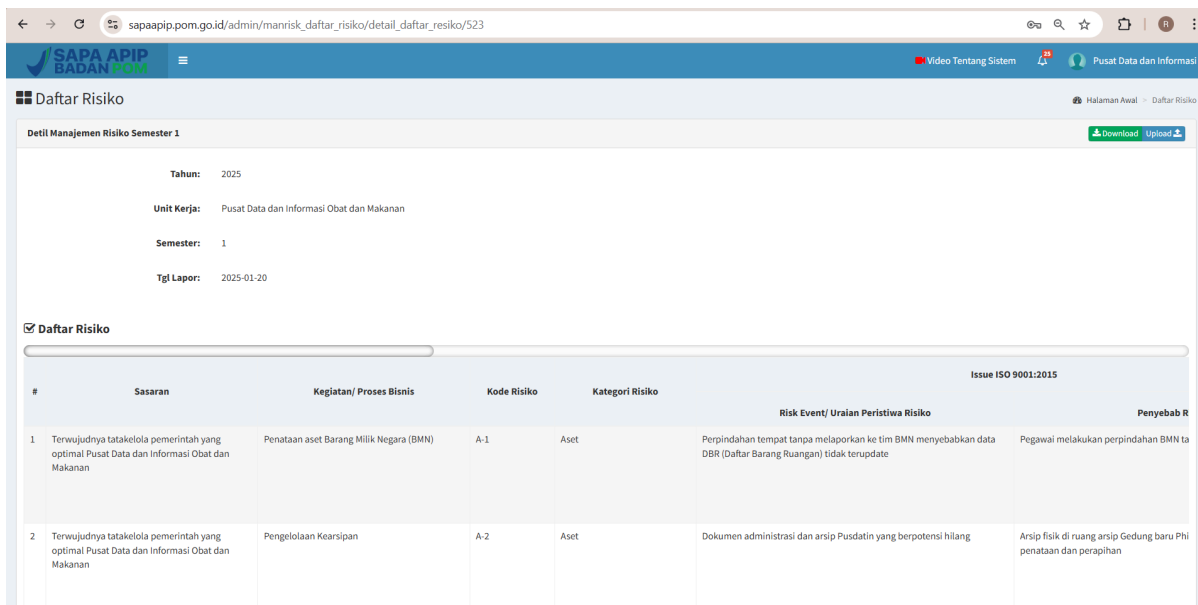


Gambar 3.66 Dokumentasi Refreshment Manajemen Risiko Tanggal 27 Februari 2025



Gambar 3.67 Dokumentasi Refreshment Manajemen Risiko Tanggal 11 Maret 2025

Sebagai *monitoring* dan evaluasi awal terhadap implementasi manajemen risiko, Tim Manajemen Risiko Pusdatin melakukan reviu daftar risiko Pusdatin Semester 1 Tahun 2025, dari hasil reviu tersebut diperoleh 64 daftar risiko Pusdatin. Daftar risiko ini telah dilaporkan melalui SAPAAPIP pada tanggal 20 Januari 2025.



Daftar Risiko

Detail Manajemen Risiko Semester 1

Tahun: 2025

Unit Kerja: Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Semester: 1

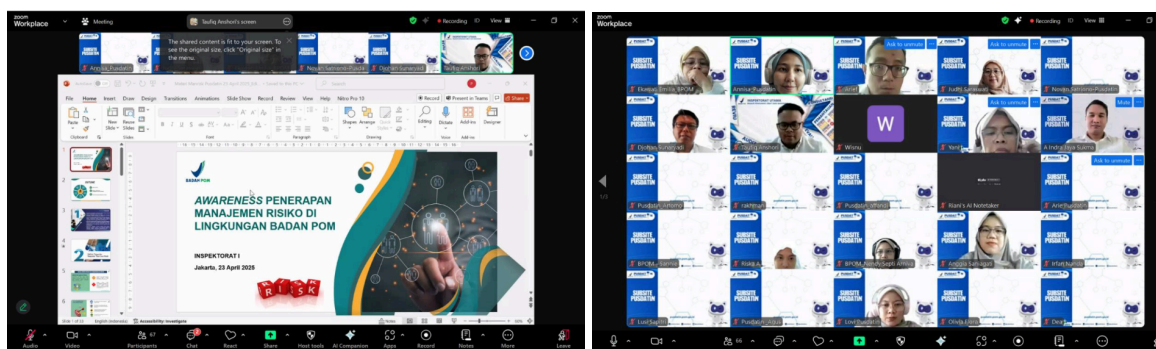
Tgl Laporan: 2025-01-20

☒ Daftar Risiko

#	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab R
1	Terwujudnya tatakelola pemerintah yang optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Penataan aset Barang Milik Negara (BMN)	A-1	Aset	Perpindahan tempat tanpa melaporkan ke tim BMN menyebabkan data DBR (Daftar Barang Ruangan) tidak terupdate	Pegawai melakukan perpindahan BMN ta
2	Terwujudnya tatakelola pemerintah yang optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Pengelolaan Kearsipan	A-2	Aset	Dokumen administrasi dan arsip Pusdatin yang berpotensi hilang	Arsip fisik di ruang arsip Gedung baru Phi penataan dan perpindahan

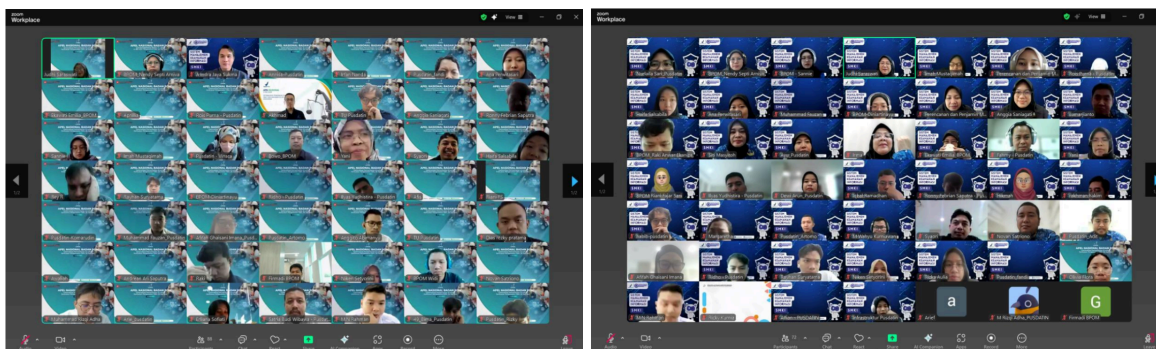
Gambar 3.68 Daftar Risiko Pusdatin Semester 1 Tahun 2025 di SAPAAPIP

Sebagai bentuk komitmen pegawai di lingkungan Pusdatin dan dalam rangka peningkatan kualitas implementasi manajemen risiko pada tanggal 23 April 2025 dilakukan *awareness* manajemen risiko kepada seluruh pegawai Pusdatin. Kegiatan ini melibatkan Tim Inspektorat sebagai Narasumber yang menjelaskan implementasi manajemen risiko di BPOM. *Awareness* ini sebagai penyegaran pengetahuan bagi pegawai Pusdatin serta upaya peningkatan pemahaman pegawai Pusdatin dalam mengimplementasikan manajemen risiko di lingkungan Pusdatin.



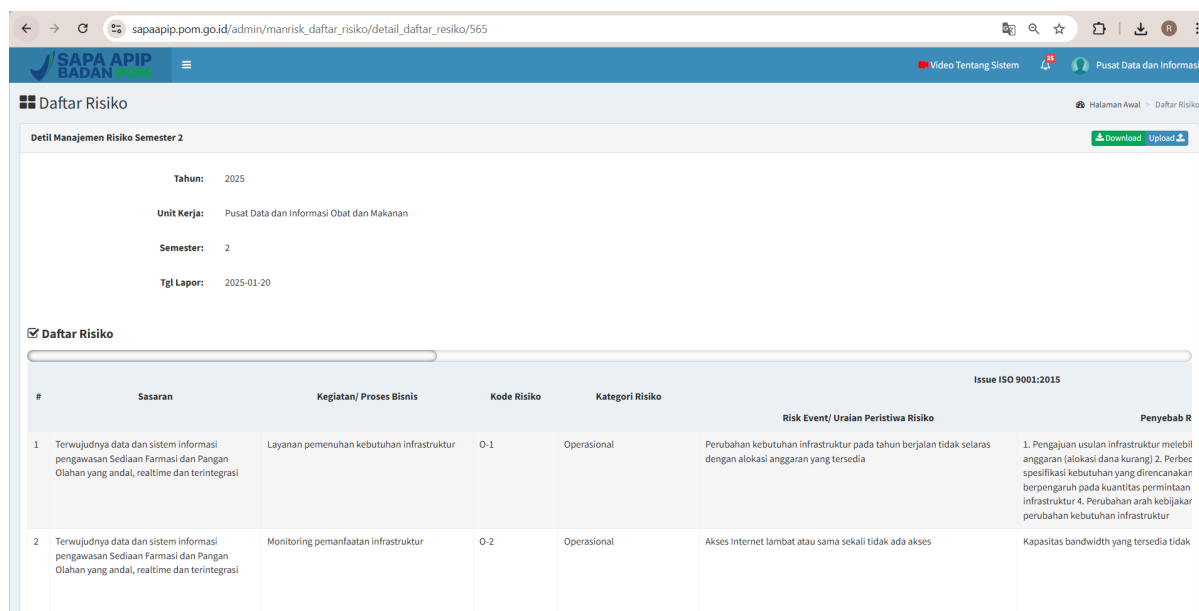
Gambar 3.69 Awareness Manajemen Risiko Tanggal 23 April 2025

Untuk meningkatkan pemahaman pegawai Pusdatin terhadap risiko di Pusdatin, dilakukan Sosialisasi Daftar Risiko di Lingkungan Pusdatin Tahun 2025 pada tanggal 16 Juni 2025.



Gambar 3.70 Sosialisasi Daftar Risiko Pusdatin Tanggal 16 Juni 2025

Sebagai salah satu upaya kepatuhan Pusdatin dalam melakukan pelaporan pelaksanaan manajemen risiko di BPOM, telah dilaporkan daftar risiko semester 2 melalui aplikasi SAPAAPIP pada tanggal 2 Juli 2025.



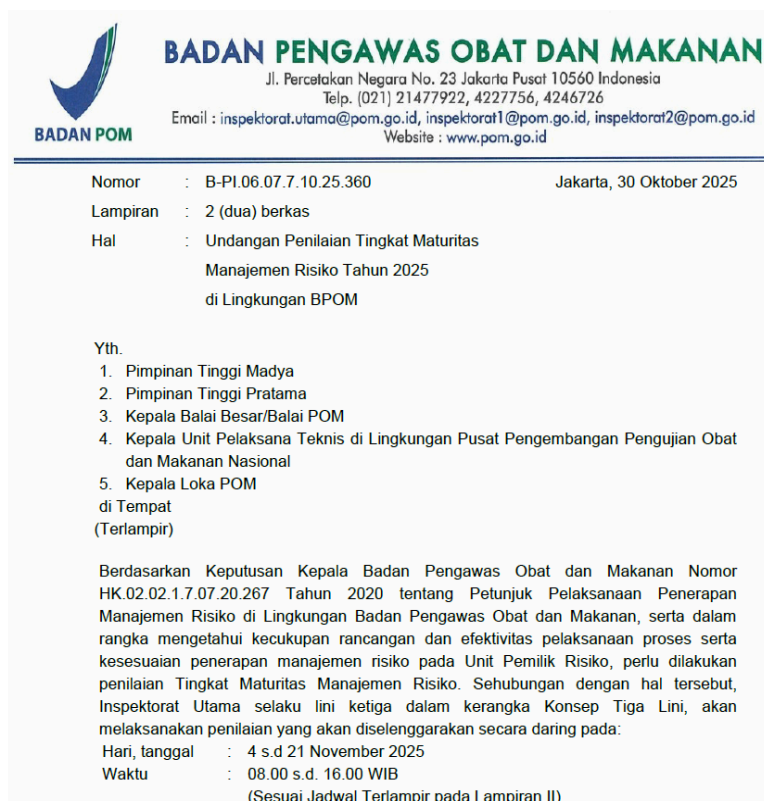
#	Sasaran	Kegiatan/ Proses Bisnis	Kode Risiko	Kategori Risiko	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Penyebab R
1	Terwujudnya data dan sistem informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal, realtime dan terintegrasi	Layanan pemenuhan kebutuhan infrastruktur	O-1	Operasional	Perubahan kebutuhan infrastruktur pada tahun berjalan tidak selaras dengan alokasi anggaran yang tersedia	1. Pengajuan usulan infrastruktur melebihi anggaran (alokasi dana kurang) 2. Perbec spesifikasi kebutuhan yang direncanakan berpengaruh pada kuantitas permintaan infrastruktur 4. Perubahan arah kebijakan perubahan kebutuhan infrastruktur
2	Terwujudnya data dan sistem informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal, realtime dan terintegrasi	Monitoring pemanfaatan infrastruktur	O-2	Operasional	Akses internet lambat atau sama sekali tidak ada akses	Kapasitas bandwidth yang tersedia tidak

Gambar 3.71 Daftar Risiko Pusdatin Semester 2 Tahun 2025 di SAPAAPIP

Sebagai tindak lanjut surat dari Inspektur Utama Nomor BPI.06.07.7.09.25.335 tentang Penilaian Mandiri dan Penyampaian Data Dukung Pelaksanaan Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM tahun 2025, Tim Manajemen Risiko Pusdatin telah menyelesaikan penilaian mandiri melalui <https://sites.google.com/view/penilaianmanrisk2025> sebelum batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 30 September 2025.

Sesuai dengan surat undangan Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2025 di Lingkungan BPOM dari Inspektur Utama Nomor B-PI.06.07.7.10.25.360, pada tanggal 12 November 2025 telah dilakukan Desk Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di Pusdatin Tahun 2025. Beberapa data dukung tambahan yang diminta auditor telah ditindaklanjuti melalui link :

<https://drive.google.com/drive/folders/1SJROaQA7oPqp315CvaUnCbHj8zY2MfCo>



Gambar 3.72 Undangan Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2025 di Lingkungan BPOM dari Inspektur Utama

Dari hasil implementasi manajemen risiko di Pusdatin tahun 2025, Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Pusdatin menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 2,960 pada tahun 2024 menjadi 2,969 pada tahun 2025, sesuai dengan nota dinas dari Inspektur Utama Nomor PI.06.07.71.02.26.81 tentang Laporan Koordinasi terkait Hasil Penilaian Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2025 pada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
INSPEKTORAT I

NOTA DINAS
NOMOR : PI.06.07.71.02.26.81

Yth. : Inspektur Utama
 Dari : Inspektur I
 Lampiran : 2 (dua) berkas
 Hal : Laporan Koordinasi terkait Hasil Penilaian Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2025 pada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
 Tanggal : 05 Februari 2026

Sehubungan dengan surat dari Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor PI.06.07.8.01.26.63 tanggal 27 Januari 2026 perihal Undangan Koordinasi Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan laporan sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Kegiatan Koordinasi terkait Hasil Penilaian Maturitas Manajemen Risiko pada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin) telah dilaksanakan secara luring pada tanggal 03 Februari 2026. Pada kegiatan ini dilakukan pemaparan mengenai hasil penilaian manajemen risiko tahun 2025 sesuai dengan permintaan dan kebutuhan Pusdatin.

2. Pelaksanaan

- a. Kegiatan dibuka oleh Ibu Judhi Saraswati, S.P., M.K.M, dan diikuti tim pengelola manajemen risiko di lingkungan Pusdatin.
- b. Selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai hasil penilaian maturitas manajemen risiko, catatan kelemahan pada pelaporan manajemen risiko Pusdatin tahun 2025, rekomendasi atas catatan kelemahan tersebut, dan catatan atas laporan manajemen risiko Pusdatin Semester I Tahun 2026.
- c. Nilai maturitas manajemen risiko Pusdatin tahun 2025 yaitu sebesar 2,969 (mengalami kenaikan sebesar 0,063 dibanding tahun 2024) dengan kategori *Risk Aware*. Rincian hasil penilaian maturitas manajemen risiko disajikan pada tabel berikut:

Uraian	Nilai 2024	Nilai 2025	Naik/(Turun)
Jumlah Nilai	46,50	47,50	1,00
Nilai Maturitas	2,960	2,969	0,063
Tingkat Maturitas	<i>Risk Aware</i>	<i>Risk Aware</i>	

- d. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab, beberapa poin hasil diskusi sebagai berikut:

Gambar 3.73 Nota Dinas Laporan Koordinasi terkait Hasil Penilaian Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2025 pada Pusdatin

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Tahunan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin) Tahun 2025 disusun sebagai wujud akuntabilitas atas implementasi berbagai program dan kegiatan strategis sepanjang tahun anggaran berjalan. Secara komprehensif, laporan ini merekam pencapaian sasaran kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Pusdatin periode Januari – Desember 2025, yang secara umum telah terealisasi dengan capaian yang sangat baik.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pusdatin berpedoman pada Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja, khususnya dalam tata kelola data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan. Kami menyadari bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan pilar utama dalam mengakselerasi transformasi digital serta memperkuat layanan internal BPOM, dengan tetap mengedepankan integrasi aspek *people*, *process*, *technology*, serta aspek keamanan informasi yang mumpuni.

Sepanjang tahun 2025, Pusdatin telah melaksanakan 26 kegiatan strategis guna mendukung 7 Indikator Kinerja Kegiatan. Dari sisi fiskal, Pusdatin menunjukkan performa yang sangat impresif dengan realisasi anggaran mencapai Rp28.415.280.433 atau sebesar 99,99%.

Ditinjau dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), hasilnya menunjukkan distribusi predikat sebagai berikut:

- 2 (dua) IKU berada pada kategori **Sangat Baik**.
- 5 (lima) IKU berada pada kategori **Baik**.

Meskipun mayoritas sasaran tercapai, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang belum memenuhi target secara maksimal, yaitu pada komponen nilai AKIP. Hal ini menjadi catatan penting bagi organisasi untuk dilakukan penguatan di masa mendatang.

Pusdatin telah berhasil mengimplementasikan prinsip efisiensi melalui optimalisasi penggunaan anggaran dan sumber daya organisasi. Keberhasilan ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas integritas data, yang pada gilirannya memperkuat kualitas pelayanan publik. Salah satu output nyata adalah kemudahan akses informasi bagi masyarakat melalui platform BPOM Mobile yang kian akurat dan terpercaya. Upaya ini secara signifikan telah memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik (*public trust*) terhadap BPOM.

Pusdatin tetap teguh pada komitmen untuk meningkatkan kinerja secara berkelanjutan demi mendukung pencapaian tujuan strategis BPOM. Kami akan

terus berupaya melahirkan inovasi guna meningkatkan standar pelayanan, baik di lingkup internal maupun publik. Namun demikian, kami menyadari bahwa proses digitalisasi bisnis BPOM memerlukan monitoring dan evaluasi secara periodik di berbagai lini.

Laporan Tahunan Pusdatin Tahun 2025 ini terbuka bagi kritik dan saran konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan. Masukan tersebut akan menjadi basis bagi kami untuk terus berakselerasi dan berinovasi dalam mewujudkan visi dan misi BPOM yang unggul.

2. Saran

Dalam rangka akselerasi kualitas tata kelola Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) guna memperkuat pengawasan Obat dan Makanan, di susunlah sejumlah rekomendasi strategis sebagai berikut

a. **Penguatan Integrasi dan Interoperabilitas Data**

Mendorong percepatan integrasi sistem dan implementasi *Single Sign-On* (SSO) serta pertukaran data berbasis API guna mendukung peningkatan indikator *persentase sistem informasi yang terintegrasi dan andal serta nilai SPBE*.

b. **Peningkatan Kualitas Tata Kelola Satu Data**

Memperkuat implementasi Satu Data Indonesia melalui penyusunan standar data, metadata, dan penggunaan data induk secara konsisten untuk meningkatkan capaian *Indeks Pembangunan Statistik (IPS)* dan kualitas perencanaan berbasis data.

c. **Optimalisasi Keamanan Informasi dan Manajemen Risiko**

Menindaklanjuti hasil *penetration testing* dan *vulnerability assessment* secara sistematis serta memperkuat kapabilitas CSIRT guna meningkatkan indikator keamanan SPBE dan menjaga keberlanjutan layanan digital.

d. **Peningkatan Kualitas Layanan TIK Berbasis Kinerja**

Mengoptimalkan sistem manajemen layanan (ITSM/KATALISTIK) untuk meningkatkan kecepatan respon dan penyelesaian layanan, yang berdampak pada peningkatan kepuasan pengguna dan capaian indikator kualitas layanan publik (ZI/WBBM).

e. **Penguatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja (SAKIP)**

Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi *performance gap* dan menyusun rencana tindak lanjut yang lebih terukur guna meningkatkan nilai SAKIP dan efektivitas pencapaian IKU.

f. **Pengembangan SDM Digital dan Data-Driven Organization**

Meningkatkan kompetensi SDM di bidang analitik data, AI, dan keamanan siber untuk mendukung transformasi digital serta pencapaian indikator kinerja berbasis outcome.

g. **Penguatan Kolaborasi dan Pertukaran Data Lintas Sektor**

Mempercepat tindak lanjut kerja sama lintas K/L untuk mendukung efisiensi

pertukaran data dan peningkatan kualitas kebijakan berbasis data, yang berdampak pada capaian indikator kinerja strategis organisasi.

h. **Perkuatan Infrastruktur TIK**

- Perlu dilakukan penguatan sistem backup dan pengembangan Disaster Recovery Center (DRC) yang terintegrasi guna menjamin ketersediaan layanan publik secara berkesinambungan serta memastikan proses pemulihan layanan dapat berjalan cepat dan efektif dalam kondisi gangguan.
- Perlu ditingkatkan kualitas jaringan dan konektivitas melalui penambahan bandwidth (WAN), penerapan redundansi jaringan intranet (LAN), serta pemanfaatan konektivitas alternatif untuk memfasilitasi keterbatasan akses, guna memastikan layanan digital dapat diakses secara stabil dan merata.

i. **Fokus perbaikan Pusdatin ke depan diarahkan pada:**

- Integrasi sistem & data (core enabler kinerja)
- Keamanan informasi (risk control)
- Kualitas layanan digital (public value)
- Pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan (outcome-based)

Sehingga Pusdatin tidak hanya berperan sebagai *supporting unit*, tetapi menjadi **enabler utama pencapaian kinerja organisasi BPOM secara keseluruhan**.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Pegawai Pusdatin 2025

No	Nama Lengkap	Nama Jabatan	Pendidikan	Jenis Kelamin	Status Pegawai
1	Abdurrochman Indrajaya Sukma, S.Kom, M.Kom	Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	S2	Laki-Laki	PNS
2	Hanifa Inawati, S.Hum.	Kepala Subbagian Tata Usaha	S1	Perempuan	PNS
3	Andrea Anggrianti, S.E	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	S1	Perempuan	PNS
4	Dewi Arun Sari, S.Ak	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	S1	Perempuan	PNS
5	Muhammad Fauzan, S.M.	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	S1	Laki-Laki	CPNS
6	Habib Akmal Nasution, S.S.I	Arsiparis Terampil	S1	Laki-Laki	PNS
7	N - Noormandiyanti, S.S.T.Ars	Arsiparis Terampil	D4	Perempuan	PNS
8	Komarudin	Operator Layanan Operasional	SLTA Sederajat	Laki-Laki	PPPK
9	Dwi Resmiyarti, S.Farm, Apt	Pelaksana	Profesi	Perempuan	PNS
10	Hayati Rohmatika Jufri, A.Md	Pelaksana	D3	Perempuan	PNS
11	Afifah Ghaisani Imana, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	S1	Perempuan	CPNS
12	Andrean Ari Saputra, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	S1	Laki-Laki	CPNS
13	Muchlis Nur Rahman, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	S1	Laki-Laki	CPNS
14	Olivia Flora Eva, A.Md.Ak.	Penata Laksana Barang Terampil	D3	Perempuan	PNS
15	Erliana Sofiati, A.Md.	Penata Laksana Barang Terampil	D3	Perempuan	CPNS
16	Margaretha, SE	Penata Layanan Operasional	S1	Perempuan	PNS
17	Lusi Sapitri, S.E.	Penata Layanan Operasional	S1	Perempuan	PPPK
18	Gheanissa Kurnia, S.Kom	Penata Layanan Operasional	S1	Perempuan	PPPK
19	Mohamad Iqbal Ramadhan, S.Kom	Penata Layanan Operasional	S1	Laki-Laki	PPPK
20	Dimas Praditya Prakoso, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	D3	Laki-Laki	PPPK
21	Fathrianda Komala Isral, A.Md.Kom	Pengelola Layanan Operasional	D3	Perempuan	PPPK
22	Vera Yeni Andika Putri, S.E	Perencana Ahli Pertama	S1	Perempuan	PNS
23	Satria Budi Wibawa, S.E.	Perencana Ahli Pertama	S1	Laki-Laki	CPNS
24	Siti Mustaqimah	Pranata Keuangan APBN Terampil	SLTA Sederajat	Perempuan	PNS
25	Nur Awaliah, S.Tr.Ak.	Pranata Keuangan APBN Terampil	S1	Perempuan	PNS

26	Arief Dwi Putranto, S.Si, Apt, MT	Pranata Komputer Ahli Madya	S2	Laki-Laki	PNS
27	Ekawati Emilia Hasanuddin, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Madya	S1	Perempuan	PNS
28	Judhi Saraswati, SP,MKM	Pranata Komputer Ahli Madya	S2	Perempuan	PNS
29	Royanihi, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Madya	S1	Perempuan	PNS
30	Winayu Budi Wardhani, S.Kom, M.Eng	Pranata Komputer Ahli Muda	S2	Perempuan	PNS
31	Affandi Sukarjan, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Muda	S1	Laki-Laki	PNS
32	Siti Masyitoh, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Muda	S1	Perempuan	PNS
33	Bowo Umbardiono, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Muda	S1	Laki-Laki	PNS
34	Muhammad Novan Satriono, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Muda	S1	Laki-Laki	PNS
35	Anggia Saniagati, S.Si, Apt., M.A.B	Pranata Komputer Ahli Muda	S2	Perempuan	PNS
36	Arlinda Wibiayu, S.Si, Apt., M.A.B	Pranata Komputer Ahli Muda	S2	Perempuan	PNS
37	Firmadi Biastiko, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Muda	S1	Laki-Laki	PNS
38	Fahmy, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Muda	S1	Laki-Laki	PNS
39	Nugroho Susanto, SE	Pranata Komputer Ahli Muda	S1	Laki-Laki	PNS
40	Irmayanty, S.T	Pranata Komputer Ahli Muda	S1	Perempuan	PNS
41	Ana Perwitasari, S.Farm, Apt., M.Sc.	Pranata Komputer Ahli Muda	S2	Perempuan	PNS
42	Rakhman Hakim, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Muda	S1	Laki-Laki	PNS
43	Akhmad Winarno, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	Laki-Laki	PNS
44	Andri Haryo Saputro, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	Laki-Laki	PNS
45	Ridho Tri Agusti, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	Laki-Laki	PNS
46	Salim Akhtur Permadi, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	Laki-Laki	PNS
47	Dimas Setiawan Afis, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	Laki-Laki	PNS
48	Widi Mardianto, ST	Pranata Komputer Ahli Muda	S1	Laki-Laki	PNS
49	Diniarti Nayu Pratiwi, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	Perempuan	PNS
50	Raki Anwar Ekaniza, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	Laki-Laki	PNS
51	Ade Restu Pahlawan, S. Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	Laki-Laki	PNS
52	Rangga Sasmita Nugraha, S.Si	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	Laki-Laki	PNS
53	Maulana Malik Muhammad, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	Laki-Laki	PNS

54	Sumarjianto, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	Laki-Laki	PNS
55	Irfan Nanda Gustri, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	Laki-Laki	PNS
56	Haifa Salsabila, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	Perempuan	PNS
57	Benyamin Ginting, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	Laki-Laki	CPNS
58	Dias Rezky Pratama, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	Laki-Laki	CPNS
59	Ridzqiawan Hammam Saputro, S.Tr.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	D4	Laki-Laki	CPNS
60	Ilyas Yudhistira Kurniawan, S.Tr.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	D4	Laki-Laki	CPNS
61	Aria Antasena, S.Tr.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	Laki-Laki	CPNS
62	Anggito Abimanyu, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	Laki-Laki	CPNS
63	Rizka Aulia, S.Tr.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	D4	Perempuan	CPNS
64	Muhammad Rizqi Adha, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	Laki-Laki	CPNS
65	Bagas Wigustanata, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	Laki-Laki	CPNS
66	Rayhan Suryatama Raharyawhedi, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	Laki-Laki	CPNS
67	Arif Widakdo, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	Laki-Laki	PNS
68	Artomo, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	Laki-Laki	PNS
69	Bimansyah, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	Laki-Laki	PPPK
70	Ibnu Umar, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	Laki-Laki	PPPK
71	Dynno Arliano, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	Laki-Laki	PPPK
72	Panji Agung Satriaji, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	Laki-Laki	PPPK
73	Muhammad Rois Purna, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1	Laki-Laki	PPPK
74	Niken Setyorini, A.Md	Pranata Komputer Mahir	D3	Perempuan	PNS
75	Vinsca Pramesthi, A.Md	Pranata Komputer Mahir	D3	Perempuan	PNS
76	Iswari Shitaesmi, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	D3	Perempuan	PNS
77	Djohan Sunaryadi, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	D3	Laki-Laki	PNS
78	Nurlaila Sari, A.Md.MI.	Pranata Komputer Terampil	D3	Perempuan	PNS
79	Muhamad Wahyu Kurniawan, A.Md	Pranata Komputer Terampil	D3	Laki-Laki	PNS
80	Agus Priyanto, A.Md	Pranata Komputer Terampil	D3	Laki-Laki	PNS
81	Ricky Kurnia Lestari, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	D3	Laki-Laki	PNS

82	Lamhot Alfianto Destian, A.Md.Kom.	Pranata Komputer Terampil	D3	Laki-Laki	PNS
83	Dyah Aprillia Retno Anggraeni, A.Md	Pranata Komputer Terampil	D3	Perempuan	PNS
84	Sannie Ragistia, S.Kom.	Pranata Komputer Terampil	S1	Perempuan	PNS
85	Lika Nur Annisa, A.Md	Pranata Komputer Terampil	D3	Perempuan	PNS
86	Adit Satriya, A.Md	Pranata Komputer Terampil	D3	Laki-Laki	PNS
87	Agung Aditia Gumilar, A.md	Pranata Komputer Terampil	D3	Laki-Laki	PNS
88	Rey Rinaldo, A.Md	Pranata Komputer Terampil	D3	Laki-Laki	PNS
89	Muhammad Rafiif Febriliansyah, A.Md.Kom.	Pranata Komputer Terampil	D3	Laki-Laki	CPNS
90	Muhammad Alfiandoko, A.Md.Kom.	Pranata Komputer Terampil	D3	Laki-Laki	CPNS
91	Raden Muhammad Rizky Awwalli Akbar, A.Md	Pranata Komputer Terampil	D3	Laki-Laki	PPPK
92	Ronny Febrian Saputra, A.Md.Kom	Pranata SDM Aparatur Terampil	D3	Laki-Laki	CPNS
93	Amini Nirwana Arfah, S.ST.	Sandiman Ahli Pertama	D4	Perempuan	CPNS
94	Rahmad Iswadi, S.Tr.T	Sandiman Ahli Pertama	D4	Laki-Laki	CPNS
95	Syubbanul Siddiq, S.Tr.Kom	Sandiman Ahli Pertama	D4	Laki-Laki	CPNS
96	Salsabila Wahyu Bintari, S.Tr.Kom	Sandiman Ahli Pertama	D4	Perempuan	CPNS
97	Nendy Septi Arniva, S.Si	Statistisi Ahli Pertama	S1	Perempuan	PPPK

Lampiran 2

Pengembangan Kompetensi Pegawai Pusdatin Tahun 2025

No	Nama Lengkap	NIP	Jabatan	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara Pelatihan	Tanggal Kegiatan
1	Artomo, A	198504152009121003	Pranata Komputer Mahir	1. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2. E-Learning Membangun Budaya Digital 3. E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital 4. E-Learning Etika Komunikasi Digital 5. E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital 6. Sertifikasi Incident Response Analyst 7. Pelatihan Literasi Digital]	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. PPSDM POM 3. PPSDM POM 4. PPSDM POM 5. PPSDM POM 6. BSSN 7. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 05/05/2025 3. 13/03/2025 4. 13/03/2025 5. 13/03/2025 6. 6/07/2025 7. 19/07/2025
2	Arif Widakdo, A.Md	198504072007121001	Pranata Komputer Mahir	1. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2. E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital 3. Pelatihan Literasi Digital 4. Pelatihan Manajemen Mutu Terintegrasi 5. Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. PPSDM POM 3. PPSDM POM 4. PPSDM POM 5. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 11/04/2025 3. 19/07/2025 4. 06/11/2025 5. 06/11/2025
3	Hayati Rohmatika Jufri, A.Md	199510312019032001	Pranata Komputer Terampil (Tubel Lepas Jabatan)	1. Membangun Digital Mindset 2. E-Learning Etika Komunikasi Digital 3. E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital 4. E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital 5. E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN 6. Mengenal Artificial Intelligence 7. Design Thinking dalam Proses Inovasi dan Pengembangan Solusi Organisasi 8. Design Thinking 9. E-Learning Penggunaan Generative AI (ChatGPT) dalam Pengawasan Obat dan Makanan 10. Implementasi dan Dampak Artificial Intelligence	1. PPSDM POM 2. PPSDM POM 3. PPSDM POM 4. PPSDM POM 5. PPSDM POM 6. PPSDM POM 7. PPSDM POM 8. PPSDM POM 9. PPSDM POM 10. PPSDM POM	1. 03/05/2025 2. 03/05/2025 3. 03/05/2025 4. 03/05/2025 5. 03/05/2025 6. 03/05/2025 7. 03/05/2025 8. 03/05/2025 9. 03/05/2025 10. 03/05/2025
4	Nurlaila Sari, A.Md.MI.	199508302019032004	Pranata Komputer Terampil	1. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2. ASN Tangguh di Era Digital Membangun Talenta Pemerintah Berbasis Teknologi 3. Membangun Kesadaran Keamanan Data Pribadi 4. Transformasi Digital Pemerintah Dari E-Government Menuju Smart Government Berbasis Komunitas 5. Hands On Scraping Data Case Analisis Sentimen pada Kebijakan Pemerintah 6. E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital 7. E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital 8. ASN Tangguh di Era Digital Membangun Talenta Pemerintah Berbasis Teknologi 9. E-Learning Etika Komunikasi Digital 10. E-Learning Budaya Digital 11. E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. Badan Pusat Statistik 3. Digitama Consulting 4. Badan Pusat Statistik 5. Badan Pusat Statistik 6. PPSDM POM 7. PPSDM POM 8. Badan Pusat Statistik 9. PPSDM POM 10. PPSDM POM 11. PPSDM POM 12. Badan Pusat Statistik 13. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 19/05/2025 3. 08/05/2025 4. 05/05/2025 5. 28/05/2025 6. 14/04/2025 7. 03/06/2025 8. 10/06/2025 9. 14/04/2025 10. 16/06/2025 11. 16/06/2025 12. 16/06/2025 13. 19/07/2025

No	Nama Lengkap	NIP	Jabatan	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara Pelatihan	Tanggal Kegiatan
				12. Menegakkan Security by Design dalam Sistem Pemerintah Digital 13. Pelatihan Literasi Digital		
5	Ekawati Emilia Hasanuddin, S.Kom	197110241998032001	Pranata Komputer Ahli Madya	1. E-Learning Budaya Digital 2. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 3. E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN 4. E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG) 5. E-Learning Membangun Budaya Digital 6. Pelatihan Manajemen Risiko 7. E-Learning Etika Komunikasi Digital 8. Pelatihan Literasi Digital	1. PPSPDM POM 2. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 3. PPSPDM POM 4. PPSPDM POM 5. PPSPDM POM 6. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 7. PPSPDM POM 8. PPSPDM POM	1. 19/05/2025 2. 15/05/2025 3. 16/05/2025 4. 03/06/2025 5. 27/05/2025 6. 27/02/2025 7. 15/03/2025 8. 19/07/2025
6	Abdurrochman Indrajaya Sukma, S.Kom, M.Kom	198205172005011004	Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	1. Business Process Engineer Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship 2025 2. Introduction To Cloud Computing Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025 3. Pengantar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025 4. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 5. International Webinar: "The Importance of Big Data in Health for National Resilience Strategies" 6. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Pengembangan Aparatur Komdigi 2. Pusat Pengembangan Literasi Digital 3. Pusat Pengembangan Aparatur Komdigi 4. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 5. Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) 6. PPSPDM POM	1. 03/03/2025 2. 24/02/2025 3. 24/02/2025 4. 15/05/2025 5. 20/02/2025 6. 19/07/2025
7	Salim Akhtur Permadi, S.Kom	199205012018011001	Pranata Komputer Ahli Pertama	1. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2. Pengenalan Internet of Things: Konsep, Teknologi, dan Aplikasinya 3. E-Learning Etika Komunikasi Digital 4. E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital 5. E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital 6. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. BADAN PENGEMBANGAN SDM KOMDIGI 3. PPSPDM POM 4. PPSPDM POM 5. PPSPDM POM 6. PPSPDM POM	1. 15/05/2025 2. 20/02/2025 3. 24/04/2025 4. 24/04/2025 5. 24/04/2025 6. 19/07/2025
8	Djohan Sunaryadi, A.Md.	198203202006041004	Pranata Komputer Terampil	1. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. PPSPDM POM	1. 15/05/2025 2. 19/07/2025
9	Muhammad Rois Purna, S.Kom	199512142024211002	Pranata Komputer Ahli Pertama	1. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2. Sosialisasi Penggunaan TTE pada Aplikasi SIMAKIN 3. Sistem Manajemen Risiko 4. E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital 5. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. Biro Sumber Daya Manusia 3. PPSPDM POM 4. PPSPDM POM 5. PPSPDM POM	1. 15/05/2025 2. 07/01/2025 3. 24/02/2025 4. 14/05/2025 5. 19/07/2025

No	Nama Lengkap	NIP	Jabatan	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara Pelatihan	Tanggal Kegiatan
10	Maulana Malik Muhammad, S.Kom.	199703032022031002	Pranata Komputer Ahli Pertama	1. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2. E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital 3. E-Learning Membangun Budaya Digital 4. E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN 5. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. PPSDM POM 3. PPSDM POM 4. PPSDM POM 5. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 03/06/2025 3. 03/06/2025 4. 03/06/2025 5. 19/07/2025
11	Haifa Salsabila, S.Kom	199810212022032002	Pranata Komputer Ahli Pertama	1. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2. Webinar PrakomID - "Hands On Scraping Data" Case : Analisis Sentimen pada Kebijakan Pemerintah 3. Webinar PrakomID "ASN TANGGUH DI ERA DIGITAL" - Membangun Talenta Pemerintah Berbasis Teknologi 4. E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital 5. E-Learning Etika Komunikasi Digital 6. Umpan Balik (Feedback) Penilaian/Uji Kompetensi Pegawai 7. E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital 8. E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital 9. E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN 10. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. BPS RI 3. BPS RI 4. PPSDM POM 5. PPSDM POM 6. PPSDM POM 7. PPSDM POM 8. PPSDM POM 9. PPSDM POM 10. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 28/05/2025 3. 19/05/2025 4. 19/05/2025 5. 19/05/2025 6. 15/05/2025 7. 03/06/2025 8. 21/05/2025 9. 13/03/2025 10. 19/07/2025
12	Ade Restu Pahlawan, S. Kom	199011102022031001	Pranata Komputer Ahli Pertama	1. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2. E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN 3. E-Learning Budaya Digital 4. E-Learning Etika Komunikasi Digital 5. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. PPSDM POM 3. PPSDM POM 4. PPSDM POM 5. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 18/02/2025 3. 20/05/2025 4. 20/05/2025 5. 19/07/2025
13	Siti Masyitoh, S.Kom	198201032007122001	Pranata Komputer Ahli Muda	1. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2. Webinar Membangun Kesadaran Keamanan Data Pribadi 3. E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital 4. E-Learning Etika Komunikasi Digital 5. E-Learning Membangun Budaya Digital 6. E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN 7. E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital 8. E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital 9. SOSIALISASI SHARING SESSION : AKREDITASI PERPUSTAKAAN 10. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. DIGITAMA 3. PPSDM POM 4. PPSDM POM 5. PPSDM POM 6. PPSDM POM 7. PPSDM POM 8. PPSDM POM 9. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan 10. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 08/05/2025 3. 03/06/2025 4. 03/06/2025 5. 03/06/2025 6. 04/06/2025 7. 04/06/2025 8. 04/06/2025 9. 13/02/2025 10. 19/07/2025
14	Iswari Shitaesmi, A.Md.	198310062006042004	Pranata Komputer Terampil	1. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 19/07/2025

No	Nama Lengkap	NIP	Jabatan	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara Pelatihan	Tanggal Kegiatan
15	Ridho Tri Agusti, S.Kom	199308032019031001	Pranata Komputer Ahli Pertama	1. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 19/07/2025
16	Fahmy, S.Kom	198501232007121001	Pranata Komputer Ahli Muda	1. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 19/07/2025
17	Irfan Nanda Gustri, S.T.	199512222022031002	Pranata Komputer Ahli Pertama	1. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) - ISO 37001:2016 2. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 3. Webinar PrakomID "ASN Tangguh Di Era Digital" - Membangun Talenta Pemerintah Berbasis Teknologi 4. RevoU Mini Course: Data Analytics 5. Memulai Tableau dari Nol untuk Pengolah Data Pemula 6. Kenali Vaksin Covid-19 untuk Jaga Mutu Selama Distribusinya 7. Pelatihan Literasi Digital	1. PPSDM POM 2. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 3. Badan Pusat Statistik 4. PT. Revolusi Cita Edukasi (RevoU) 5. Udemy, Inc. (Udemy) 6. PPSDM POM	1. 09/05/2025 2. 15/05/2025 3. 19/05/2025 4. 06/01/2025 5. 11/02/2025 6. 11/05/2025 7. 19/07/2025
18	Ana Perwitasari, S.Farm, Apt., M.Sc.	198807112015022002	Pranata Komputer Ahli Muda	1. Scientific Decision Making 2. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 3. E-Learning Budaya Digital 4. Sosialisasi Strategi Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan atau Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang Responsif dan Akuntabel sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Publik 5. Sosialisasi Penggunaan TTE pada Aplikasi SIMAKIN 6. E-Learning Etika Komunikasi Digital 7. E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital 8. E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital 9. E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital 10. E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN 11. IELTS Writing Coaching Clinic BPOM 12. E-Learning Membangun Budaya Digital 13. E-Learning Bahasa Inggris Study Luar Negeri : Spending Money 14. Pelatihan Literasi Digital	1. PPSDM POM 2. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 3. PPSDM POM 4. Biro Hukum dan Organisasi 5. Biro Sumber Daya Manusia 6. PPSDM POM 7. PPSDM POM 8. PPSDM POM 9. PPSDM POM 10. PPSDM POM 11. PPSDM POM 12. PPSDM POM 13. PPSDM POM 14. PPSDM POM	1. 11/06/2025 2. 15/05/2025 3. 25/03/2025 4. 23/01/2025 5. 07/01/2025 6. 22/03/2025 7. 22/03/2025 8. 23/03/2025 9. 22/03/2025 10. 18/03/2025 11. 18/03/2025 12. 18/03/2025 13. 27/02/2025 14. 19/07/2025

No	Nama Lengkap	NIP	Jabatan	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara Pelatihan	Tanggal Kegiatan
19	Anggia Saniagati, S.Si, Apt., M.A.B	198611042010122004	Pranata Komputer Ahli Muda	1. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2. Seminar Online: Transformasi Digital Pemerintah : Dari E-Government Menuju Smart Government Berbasis Komunitas 3. Pelatihan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE 4. Webinar AI Untuk ASN Indonesia: Menguasai Copilot dan Teknik Prompting 5. Pelatihan Manajemen Risiko 6. Sosialisasi Strategi Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan atau Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang Responsif dan Akuntabel sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Publik 7. International Webinar: The Importance of Big Data in Health for National Resilience Strategies 8. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik 3. Pusat Pengembangan Aparatur Komdigi 4. Yayasan Plan International Indonesia 5. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 6. Biro Hukum dan Organisasi 7. Universitas Insan Cita Indonesia 8. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 05/05/2025 3. 19/05/2025 4. 15/05/2025 5. 27/02/2025 6. 23/01/2025 7. 20/02/2025 8. 19/07/2025
20	Agung Aditia Gumilar, A.md	199508302022031002	Pranata Komputer Terampil	1. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2. E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital 3. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. PPSDM POM 3. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 17/06/2025 3. 19/07/2025
21	Nugroho Susanto, SE	198304142015021002	Pranata Komputer Ahli Muda	1. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2. E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital 3. Audit Sistem Manajemen Mutu - ISO 19011 : 2018 4. Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 5. E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital 6. Sosialisasi Penggunaan TTE pada Aplikasi SIMAKIN 7. Pelatihan Manajemen Risiko 8. Sosialisasi SE Pengelolaan Kinerja dan Peluncuran Aplikasi SIMAKIN 2025 9. E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN 10. E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital 11. E-Learning Etika Komunikasi Digital 12. E-Learning Membangun Budaya Digital 13. Hands On Scraping Data Case Analisis Sentimen pada Kebutuhan Kebijakan Pemerintah 14. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. PPSDM POM 3. PPSDM POM 4. PPSDM POM 5. PPSDM POM 6. Biro Sumber Daya Manusia 7. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 8. Biro Sumber Daya Manusia 9. PPSDM POM 10. PPSDM POM 11. PPSDM POM 12. PPSDM POM 13. BPS 14. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 25/03/2025 3. 19/06/2025 4. 19/06/2025 5. 05/05/2025 6. 07/01/2025 7. 27/02/2025 8. 03/03/2025 9. 18/03/2025 10. 18/03/2025 11. 18/03/2025 12. 18/03/2025 13. 28/05/2025 14. 19/07/2025
22	Bowo Umbardiono, S.Kom	197710262007121001	Pranata Komputer Ahli Muda	1. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2. Pelatihan Manajemen Risiko 3. E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital 4. E-Learning Etika Komunikasi Digital 5. E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN 6. E-Learning Pengujian Kimia dengan Test Kit 7. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 3. PPSDM POM 4. PPSDM POM 5. PPSDM POM 6. PPSDM POM 7. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 27/02/2025 3. 10/03/2025 4. 10/03/2025 5. 10/03/2025 6. 10/03/2025 7. 19/07/2025

No	Nama Lengkap	NIP	Jabatan	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara Pelatihan	Tanggal Kegiatan
22	Rakhman Hakim, S.Kom	198111122005011008	Pranata Komputer Ahli Muda	1. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2. E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN 3. Pelatihan Manajemen Risiko 4. E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital 5. E-Learning Etika Komunikasi Digital 6. E-Learning Membangun Budaya Digital 7. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. PPSDM POM 3. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 4. PPSDM POM 5. PPSDM POM 6. PPSDM POM 7. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 02/05/2025 3. 27/02/2025 4. 18/03/2025 5. 13/03/2025 6. 18/03/2025 7. 19/07/2025
23	Raki Anwar Ekaniza, S.Kom	199411172020121001	Pranata Komputer Ahli Pertama	1. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 19/07/2025
24	Muhammad Novan Satriono, S.Kom	198111162005011001	Pranata Komputer Ahli Muda	1. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2. Pelatihan Manajemen Risiko 3. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 3. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 27/02/2025 3. 19/07/2025
25	Ricky Kurnia Lestari, A.Md.	199601102020121001	Pranata Komputer Terampil	1. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2. Sosialisasi KIE & Subsite KataBPOM dan Aplikasi Evaluasi KIE Versi 1.5 3. E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN 4. Pelatihan Manajemen Risiko 5. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. Biro Hukum dan Organisasi 3. PPSDM POM 4. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 5. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 22/05/2025 3. 13/03/2025 4. 27/02/2025 5. 19/07/2025
26	Muhamad Wahyu Kurniawan, A.Md	199512222019031003	Pranata Komputer Terampil	1. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2. Mengenal Artificial Intelligence 3. Design Thinking 4. Internet of Things 5. Implementasi dan Dampak Artificial Intelligence 6. E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN 7. Sosialisasi Penggunaan TTE pada Aplikasi SIMAKIN 8. Ide dan Sejarah NLP 9. Pemanfaatan NLP dalam Peningkatan Kompetensi 10. Mindset NLP Dalam Kepemimpinan 11. E-Learning Membangun Budaya Digital 12. E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital 13. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. PPSDM POM 3. PPSDM POM 4. PPSDM POM 5. PPSDM POM 6. PPSDM POM 7. Biro Sumber Daya Manusia 8. PPSDM POM 9. PPSDM POM 10. PPSDM POM 11. PPSDM POM 12. PPSDM POM 13. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 16/05/2025 3. 16/05/2025 4. 16/05/2025 5. 16/05/2025 6. 13/03/2025 7. 07/01/2025 8. 19/05/2025 9. 19/05/2025 10. 19/05/2025 11. 13/03/2025 12. 14/03/2025 13. 19/07/2025

No	Nama Lengkap	NIP	Jabatan	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara Pelatihan	Tanggal Kegiatan
27	Royanih, S.Kom	196912122000032001	Pranata Komputer Ahli Muda	1. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2. Pelatihan Manajemen Risiko 3. E-Learning Etika Komunikasi Digital 4. E-Learning Keamanan dan Keselamatan Digital 5. E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital 6. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 3. PPSDM POM 4. PPSDM POM 5. PPSDM POM 6. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 27/02/2025 3. 07/03/2025 4. 07/03/2025 5. 22/06/2025 6. 19/07/2025
28	Akhmad Winarno, S.Kom	199209292018011001	Pranata Komputer Ahli Pertama	1. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2. Membangun Digital Mindset 3. E-Learning Penggunaan Generative AI (ChatGPT) dalam Pengawasan Obat dan Makanan 4. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. PPSDM POM 3. PPSDM POM 4. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 20/05/2025 3. 20/05/2025 4. 19/07/2025
29	Raden Muhammad Rizky Awwalli Akbar, A.Md	199401132023211018	Pranata Komputer Terampil	1. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2. Webinar PrakomID - ASN Tangguh di Era Digital: Membangun Talenta Pemerintah Berbasis Teknologi 3. Webinar PrakomID : Menegakkan Security by Design dalam Sistem Pemerintah Digital 4. Komunikasi Risiko 5. E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN 6. Leader Dialogue: Kesehatan Jiwa, Raga, dan Harta dalam Membentuk Budaya BerAKHLAK 7. Sosialisasi Adendum PPPK Tahun 2025 8. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. Badan Pusat Statistik 3. Badan Pusat Statistik 4. PPSDM POM 5. PPSDM POM 6. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan 7. Biro Sumber Daya Manusia 8. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 10/06/2025 3. 16/06/2025 4. 20/05/2025 5. 20/05/2025 6. 07/02/2025 7. 13/03/2025 8. 19/07/2025
30	Rey Rinaldo, A.Md	199608042022031001	Pranata Komputer Terampil	1. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2. Webinar Membangun Kesadaran Keamanan Data Pribadi 3. Membangun Pola Pikir yang Adaptif dan Terbuka 4. Strategic Thinking 5. E-Learning Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penyusunan Laporan Kinerja 2024 6. E-Learning Etika Komunikasi Digital 7. E-Learning Persiapan Beasiswa : Mencari Tahu Universitas Terbaik 8. Society 5.0 9. Leader Dialogue: Kesehatan Jiwa, Raga, dan Harta dalam Membentuk Budaya BerAKHLAK 10. SOSIALISASI SHARING SESSION : AKREDITASI PERPUSTAKAAN 11. E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital 12. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. Digitama 3. PPSDM POM 4. PPSDM POM 5. PPSDM POM 6. PPSDM POM 7. PPSDM POM 8. PPSDM POM 9. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan 10. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan 11. PPSDM POM 12. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 08/05/2025 3. 23/05/2025 4. 23/05/2025 5. 23/05/2025 6. 23/05/2025 7. 23/05/2025 8. 23/05/2025 9. 07/02/2025 10. 13/02/2025 11. 08/04/2025 12. 19/07/2025

No	Nama Lengkap	NIP	Jabatan	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara Pelatihan	Tanggal Kegiatan
31	Vinsca Pramesthi, A.Md	199206252015022003	Pranata Komputer Terampil	1. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2. Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi 3. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. Kementerian Informatika dan Digital - Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship 2025 3. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 03/03/2025 3. 19/07/2025
32	Niken Setyorini, A.Md	198812272010122005	Pranata Komputer Mahir	1. Sosialisasi Aplikasi dan atau website 2. Bimbingan Teknis Perpajakan 3. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. Pusklat Anggaran dan Perbendaharaan 3. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 27/02/2025 3. 19/07/2025
33	Lamhot Alfianto Destian, A.Md.Kom.	199412062020121002	Pranata Komputer Terampil	1. Sosialisasi Aplikasi dan atau website 2. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 19/07/2025
34	Widi Mardianto, ST	198603172015021003	Pranata Komputer Ahli Pertama	1. Sosialisasi Aplikasi dan atau website 2. Pelatihan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3. E-Learning Literasi Digital Pegawai ASN 4. E-Learning Literasi Digital Pegawai ASN 5. E-Learning Literasi Digital Pegawai ASN 6. E-Learning Literasi Digital Pegawai ASN 7. E-Learning Literasi Digital Pegawai ASN 8. E-Learning Literasi Digital Pegawai ASN 9. E-Learning Literasi Digital Pegawai ASN 10. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. Kementerian Komunikasi dan Digital 3. PPSDM POM 4. PPSDM POM 5. PPSDM POM 6. PPSDM POM 7. PPSDM POM 8. PPSDM POM 9. PPSDM POM 10. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 26/03/2025 3. 15/04/2025 4. 29/04/2025 5. 29/04/2025 6. 29/04/2025 7. 14/03/2025 8. 15/04/2025 9. 16/04/2025 10. 19/07/2025
35	Dwi Resmiyarti, S.Farm, Apt	198703212010122006	Pranata Komputer Ahli Muda (Tubel Lepas Jabatan)			

No	Nama Lengkap	NIP	Jabatan	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara Pelatihan	Tanggal Kegiatan
36	Nendy Septi Arniva, S.Si	199209012023212040	Statistisi Ahli Pertama	1. Sosialisasi Aplikasi dan atau website 2. E-Learning Literasi Digital Pegawai ASN 3. E-Learning Literasi Digital Pegawai ASN 4. E-Learning Literasi Digital Pegawai ASN 5. E-Learning Literasi Digital Pegawai ASN 6. E-Learning Literasi Digital Pegawai ASN 7. E-Learning Literasi Digital Pegawai ASN 8. E-Learning Literasi Digital Pegawai ASN 9. Pelatihan Manajemen Risiko 10. Sosialisasi dan Internalisasi Core Value BerAKHLAK 11. Hands On Scraping Data Case Analisis Sentimen pada Kebutuhan Kebijakan Pemerintah 12. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. PPSDM POM 3. PPSDM POM 4. PPSDM POM 5. PPSDM POM 6. PPSDM POM 7. PPSDM POM 8. PPSDM POM 9. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 10. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan 11. BPS 12. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 03/06/2025 3. 03/06/2025 4. 04/06/2025 5. 24/03/2025 6. 13/03/2025 7. 28/05/2025 8. 28/05/2025 9. 27/02/2025 10. 07/02/2025 11. 28/05/2025 12. 19/07/2025
37	Affandi Sukarjan, S.Kom	197411012002121001	Pranata Komputer Ahli Muda	1. Sosialisasi Aplikasi dan atau website 2. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 19/07/2025
38	Rangga Sasmita Nugraha, S.Si	199103122022031002	Pranata Komputer Ahli Pertama	1. Sosialisasi Aplikasi dan atau website 2. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 19/07/2025
39	Winayu Budi Wardhani, S.Kom, M.Eng	198305252007122001	Pranata Komputer Ahli Muda	1. Sosialisasi Aplikasi dan atau website 2. Pelatihan Manajemen Risiko 3. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 3. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 27/02/2025 3. 19/07/2025
40	Judhi Saraswati, SP,MKM	197110311999032001	Pranata Komputer Ahli Madya	1. E-Learning Critical Thinking 2. E-Learning Transformasi Digital 3. Sosialisasi Aplikasi dan atau website 4. Pelatihan Manajemen Risiko 5. Pelatihan Literasi Digital	1. PPSDM POM 2. PPSDM POM 3. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 4. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 5. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 15/05/2025 3. 15/05/2025 4. 27/02/2025 5. 19/07/2025
41	Sannie Ragistia, A. Md.	199308122020122002	Pranata Komputer Terampil	1. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2. Membangun Kesadaran Keamanan Data Pribadi 3. Intriduction To Cloud Computing 4. Konsep Dasar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 5. Peran ASN Dalam Membangun Citra Lembaga Melalui Konten Kreatif 6. Webinar PrakomID "ASN TANGGUH DI ERA DIGITAL" - Membangun Talenta Pemerintah Berbasis Teknologi 7. Sharing Knowledge "Let's Go Abroad! Belajar, Bertumbuh dan Berkontribusi Sosial di Australia"	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. PT Digitama Sinergi Indonesia 3. Badan Pengembangan SDM Komdigi 4. Badan Pengembangan SDM Komdigi 5. Badan Pengembangan SDM Komdigi 6. Badan Pusat Statistik 7. PPSDM POM 8. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 08/05/2025 3. 06/05/2025 4. 24/02/2025 5. 06/05/2025 6. 19/05/2025 7. 19/05/2025 8. 19/05/2025 9. 19/07/2025

No	Nama Lengkap	NIP	Jabatan	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara Pelatihan	Tanggal Kegiatan
				8. Hands On Scraping Data Case Analisis Sentimen pada Kebutuhan Kebijakan Pemerintah 9. Pelatihan Literasi Digital	9. PPSPDM POM	
42	Dyah Aprillia Retno Anggraeni, A.Md	199604242020122002	Pranata Komputer Terampil	1. Sosialisasi Aplikasi dan atau website 2. E-Learning Literasi Digital Pegawai ASN 3. E-Learning Literasi Digital Pegawai ASN 4. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. PPSPDM POM 3. PPSPDM POM 4. PPSPDM POM	1. 15/05/2025 2. 14/03/2025 3. 17/06/2025 4. 19/07/2025
43	Arlinda Wibiayu, S.Si, Apt., M.A.B	198105052007122001	Pranata Komputer Ahli Muda	1. E-Learning Manajemen Risiko 2. Bimbingan Teknis Awareness Keamanan Data dan Informasi 3. Pelatihan Manajemen Risiko 4. Pelatihan Penyusunan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik Angkatan Ke-4 5. Pelatihan Literasi Digital	1. PPSPDM POM 2. BSSN 3. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 4. BSSN 5. PPSPDM POM	1. 04/06/2025 2. 10/02/2025 3. 27/02/2025 4. 10/02/2025 5. 19/07/2025
44	Andri Haryo Saputro, S.Kom	199412172019031004	Pranata Komputer Ahli Pertama	1. Sosialisasi Aplikasi dan atau website 2. E-Learning Literasi Digital Pegawai ASN 3. E-Learning Literasi Digital Pegawai ASN 4. E-Learning Literasi Digital Pegawai ASN 5. E-Learning Literasi Digital Pegawai ASN 6. E-Learning Literasi Digital Pegawai ASN 7. E-Learning Design Thinking 8. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. PPSPDM POM 3. PPSPDM POM 4. PPSPDM POM 5. PPSPDM POM 6. PPSPDM POM 7. PPSPDM POM 8. PPSPDM POM	1. 15/05/2025 2. 20/05/2025 3. 20/05/2025 4. 20/05/2025 5. 20/05/2025 6. 20/05/2025 7. 20/05/2025 8. 19/07/2025
45	Dimas Setiawan Afis, S.Kom	199706302019031002	Pranata Komputer Ahli Pertama	1. Sosialisasi Aplikasi dan atau website 2. E-Learning Literasi Digital Pegawai ASN 3. E-Learning Literasi Digital Pegawai ASN 4. E-Learning Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 5. E-Learning Literasi Digital Pegawai ASN 6. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. PPSPDM POM 3. PPSPDM POM 4. PPSPDM POM 5. PPSPDM POM 6. PPSPDM POM	1. 15/05/2025 2. 14/05/2025 3. 17/06/2025 4. 14/05/2025 5. 14/05/2025 6. 19/07/2025
46	Lika Nur Annisa, A.Md	199701302022032001	Pranata Komputer Terampil	1. E-Learning Literasi Digital Pegawai ASN 2. E-Learning Literasi Digital Pegawai ASN 3. E-Learning Literasi Digital Pegawai ASN 4. Sosialisasi Aplikasi dan atau website 5. Pelatihan Literasi Digital	1. PPSPDM POM 2. PPSPDM POM 3. PPSPDM POM 4. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 5. PPSPDM POM	1. 05/05/2025 2. 05/05/2025 3. 05/05/2025 4. 15/05/2025 5. 19/07/2025
47	Adit Satriya, A.Md	199105132022031003	Pranata Komputer Terampil	1. Sosialisasi Aplikasi dan atau website 2. Sosialisasi Aplikasi dan atau website 3. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. Biro Sumber Daya Manusia 3. PPSPDM POM	1. 15/05/2025 2. 07/01/2025 3. 19/07/2025

No	Nama Lengkap	NIP	Jabatan	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara Pelatihan	Tanggal Kegiatan
48	Muhammad Sofyan Syaori, A. md	199107142022031001	Pranata Komputer Terampil	1. Sosialisasi Aplikasi dan atau website 2. Pelatihan Manajemen Risiko 3. E-Learning Literasi Digital Pegawai ASN 4. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 3. PPSDM POM 4. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 11/03/2025 3. 17/06/2025 4. 19/07/2025
49	Ibnu Umar, S.T.	199501042024211008	Pranata Komputer Ahli Pertama	1. Sosialisasi Aplikasi dan atau website 2. E-Learning Manajemen Risiko 3. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. PPSDM POM 3. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 03/03/2025 3. 19/07/2025
50	Firmadi Biastiko, S.Kom	198806272010121005	Pranata Komputer Ahli Muda	1. Sosialisasi Aplikasi dan atau website 2. Pelatihan Manajemen Risiko 3. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 3. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 27/02/2025 3. 19/07/2025
51	Agus Priyanto, A.Md	198708152020121002	Pranata Komputer Terampil	1. Sosialisasi Aplikasi dan atau website 2. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 19/07/2025
52	Riani Fajar Sari, S.Farm	198705312010122002	Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil	1. Sosialisasi Aplikasi dan atau website 2. Pelatihan Manajemen Risiko 3. Sosialisasi dan Internalisasi Core Value BerAKHLAK 4. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan 4. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 27/02/2025 3. 07/02/2025 4. 19/07/2025
53	Diniarti Nayu Pratiwi, S.Kom	198912042015022003	Pranata Komputer Ahli Pertama	1. Pelatihan Manajemen Risiko 2. Sosialisasi Aplikasi dan atau website 3. Sharing Knowledge Alumni Tugas Belajar BPOM 4. Sosialisasi di Bidang Teknologi dan Informasi 5. Pelatihan Manajemen Risiko 6. Sosialisasi dan Internalisasi Core Value BerAKHLAK 7. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 3. PPSDM POM 4. BPS 5. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 6. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan 7. PPSDM POM	1. 28/02/2025 2. 15/05/2025 3. 21/04/2025 4. 21/04/2025 5. 27/02/2025 6. 07/02/2025 7. 19/07/2025

No	Nama Lengkap	NIP	Jabatan	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara Pelatihan	Tanggal Kegiatan
54	Sumarjianto, S.Kom	199504302022031003	Pranata Komputer Ahli Pertama	1. Sosialisasi Aplikasi dan atau website 2. Sosialisasi dan Internalisasi Core Value BerAKHLAK 3. Seminar Kepemimpinan 4. Seminar Kepemimpinan 5. Sosialisasi dan Internalisasi Core Value BerAKHLAK 6. E-Learning Feedback Kinerja/Penilaian Kompetensi Pegawai 7. E-Learning Literasi Digital Pegawai ASN 8. Pelatihan Manajemen Risiko 9. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. PPSDM POM 3. PPSDM POM 4. PPSDM POM 5. PPSDM POM 6. PPSDM POM 7. PPSDM POM 8. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 9. PPSDM POM	1. 15/05/2025 2. 23/05/2025 3. 23/05/2025 4. 23/05/2025 5. 23/05/2025 6. 23/05/2025 7. 05/05/2025 8. 27/02/2025 9. 19/07/2025
55	Arief Dwi Putranto, S.Si, Apt, MT	197902092003121001	Pranata Komputer Ahli Madya	1). Pelatihan Manajemen Risiko 2). E-Learning Etika Komunikasi Digital 3). E-Learning Pengujian Kimia dengan Test Kit 4). E-Learning Pedoman Sampling dan Pengujian Obat 5). E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG) 6). Audit Sistem Manajemen Mutu - ISO 19011 : 2018 7. Pelatihan Literasi Digital 8. Pelatihan Manajemen Mutu Terintegrasi	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. 3. 4. 5. 6. 7. PPSDM POM 8. PPSDM POM	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 19/07/2025 8. 06/11/2025
56	Habib Akmal Nasution, S.S.I	199803042020121001	Arsiparis Terampil	1. pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah 2. Pelatihan Literasi Digital	1. LPKN 2. PPSDM POM	1. 23/01/2025 - 25/01/2025 2. 19/07/2025
57	Margaretha, SE	198611142010122004	Penata Layanan Operasional	1). Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2). Sosialisasi RHK dan Indikator Kinerja Mandatory Jabatan Analis/Pranata SDMA 3. Pelatihan Literasi Digital	1). Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2). Biro Sumber Daya Manusia 3. PPSDM POM	1). 15/05/2025 2). 03/02/2025 3. 19/07/2025
58	Nur Awaliah, S.Tr.Ak.	199401042020122002	Pranata Keuangan APBN Terampil	1). Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2). Pelatihan Manajemen Risiko 3. Pelatihan Literasi Digital	1). Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2). Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 3. PPSDM POM	1). 15/05/2025 2). 27/02/2025 - 11/03/2025 3. 19/07/2025
59	Vera Yeni Andika Putri, S.E	199406162019032005	Perencana Ahli Pertama	1. Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 2. Pelatihan Literasi Digital 3. Pelatihan Manajemen Mutu Terintegrasi 4. Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP	1. Biro Perencanaan dan Keuangan 2. PPSDM POM 3. PPSDM POM 4. PPSDM POM	1. 10/02/2025 - 12/02/2025 2. 19/07/2025 3. 06/11/2025 4. 06/11/2025

No	Nama Lengkap	NIP	Jabatan	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara Pelatihan	Tanggal Kegiatan
60	Andrea Anggrianti, S.E	199504102019032003	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1). Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2). E-Learning Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bagi Kementerian/Lembaga 3). Sosialisasi Pelaporan Proyeksi Target dan Realisasi Capaian Output TA 2025 4). Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Keuangan Negara 5). Pengelolaan Uang Persediaan (UP) Pertanggungjawaban Keuangan Negara 6). Mekanisme Pencairan dan Pembayaran Keuangan Pengadaan Barang dan Jasa 7). Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Perjalanan Dinas 8). Pelatihan Literasi Digital	1). Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2). Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan 3). Direktorat Pelaksanaan Anggaran 4). PPSPDM POM 5). PPSPDM POM 6). PPSPDM POM 7). PPSPDM POM 8). PPSPDM POM	1). 15/05/2025 2). 15/04/2025 - 14/05/2025 3). 13/03/2025 4). 10/03/2025 5). 18/03/2025 6). 18/03/2025 7). 10/03/2025 8). 19/07/2025
61	Dewi Arun Sari, S.Ak	199009072015022004	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1). Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2). Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 3). Kemenkeu Corporate University Open Class (KCOC) Pengenalan Coretax bagi Wajib Pajak Instansi Pemerintah Angkatan I Tahun 2025 4). Pelatihan PPK (TW III) 5). Pelatihan Literasi Digital	1). Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2). Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional 3). Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 4). 5. PPSPDM POM	1). 15/05/2025 2). 08/01/2025 - 25/01/2025 3). 22/01/2025 4). 05/08/2025 - 11-08-2025 5). 19/07/2025
62	Siti Mustaqimah	197109071991032001	Pranata Keuangan APBN Terampil	1). Sosialisasi Pelaporan Proyeksi Target dan Realisasi Capaian Output TA 2025 2). Coretax bagi Instansi Pemerintah: Pembuatan Bukti Potong, Pembayaran dan Pelaporan Tahun 2025 3). Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2025 4). Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 5). Microlearning "Virtual Account" 6). Sosialisasi Penggunaan TTE pada Aplikasi SIMAKIN 7). Pelatihan Literasi Digital	1). Direktur Pelaksanaan Anggaran 2). KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK 3). Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan 4). Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 5). Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan 6). Biro Sumber Daya Manusia 7). PPSPDM POM	1). 13/03/2025 2). 05/02/2025 3). 27/02/2025 4). 15/05/2025 5). 20/05/2025 6). 07/01/2025 7). 19/07/2025
63	N - Noormandiyanti, A.Md.S.I.	199709242019032003	Arsiparis Terampil	1). Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2). Sosialisasi Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan BPOM, BPOM: Jelajah Media Tahun 2025 3). Sosialisasi Adendum PPPK Tahun 2025 4). Pelatihan Literasi Digital	1). Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2). Biro Umum 3). Biro Sumber Daya Manusia 4). PPSPDM POM	1). 15/05/2025 2). 22/01/2025 - 23/01/2025 3). 13/03/2025 4). 19/07/2025
64	Hanifa Inawati, S.Hum.	199603022020122002	Arsiparis Ahli Pertama	1). Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2). Pelatihan Manajemen Risiko 3). Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 4). Sosialisasi Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan BPOM, BPOM: Jelajah Media Tahun 2025	1). Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2). Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 3). Biro Perencanaan dan Keuangan 4). Biro Umum 5). PPSPDM POM	1). 15/05/2025 2). 27/02/2025 - 11/03/2025 3). 10/02/2025 - 12/02/2025 4). 22/01/2025 - 23/01/2025

No	Nama Lengkap	NIP	Jabatan	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara Pelatihan	Tanggal Kegiatan
				5. Pelatihan Literasi Digital		5. 19/07/2025
65	Olivia Flora Eva, A.Md.Ak.	199808052022032001	Penata Laksana Barang Terampil	1. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pemenuhan Layanan TIK Pusdatin 2. Pelatihan Literasi Digital	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. PPSDM POM	1. 5/15/2025 2. 19/07/2025
66	Irmayanty, S.T	197311172002122001	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	1. Sosialisasi Penyusunan Laporan BMN dalam rangka Pemutakhiran BMN Tahunan Tahun 2024 2. Pelatihan Manajemen Risiko 3. Pelatihan Literasi Digital	1. 2. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 3. PPSDM POM	1). 21/01/2025 - 24/01/2025 2). 27/02/2025 - 11/03/2025 3. 19/07/2025

Lampiran 3

Laporan Survei Kepuasan Layanan TIK Tahun 2025

ANALISIS HASIL SURVEI KEPUASAN LAYANAN TIK TAHUN 2025

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan pemanfaatan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Badan POM, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin) telah melaksanakan survei kepuasan layanan TIK tahun 2025 yang disampaikan melalui surat Nomor TI.05.8.09.25.298 tanggal 2 Oktober 2025 dengan periode pengisian sampai dengan tanggal 30 November 2025. Target responden survei adalah pegawai Badan POM yang telah memanfaatkan Layanan TIK Pusdatin melalui *link* https://link.pom.go.id/link/Survei_Layanan_TIK_BPOM2025. Output yang dihasilkan dari survei layanan TIK adalah Indeks Kepuasan Layanan TIK dan menjadi tolak ukur kepuasan *stakeholder* dalam memanfaatkan layanan TIK yang sudah diberikan oleh Pusdatin. Pengukuran kepuasan Layanan TIK dilaksanakan terhadap layanan data, sistem informasi, infrastruktur, perencanaan dan keamanan TIK di BPOM dengan metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pengguna Layanan TIK di BPOM dalam memperoleh pelayanan dari Pusdatin.

Survei Kepuasan Layanan TIK Pusdatin bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, yang selanjutnya menjadi dasar dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan layanan sehingga hasil survei dapat digunakan sebagai *evidence-based decision* untuk menyusun rencana perbaikan layanan secara berkelanjutan. Hasil survei digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja pelayanan, identifikasi area perbaikan, serta penyusunan rekomendasi peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Hasil survei Layanan TIK akan dipublikasikan dalam rangka mendukung akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pelayanan publik dengan harapan agar perbaikan secara berkelanjutan yang telah diupayakan dapat tersampaikan.

2. Tujuan

Survei tersebut bertujuan untuk mengetahui persepsi dan tingkat kepuasan pelanggan internal Badan POM terhadap layanan TIK yang telah diberikan Pusdatin. Selain itu

juga akan menjadi masukan terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan perbaikan layanan TIK di lingkungan Badan POM.

3. Waktu Pelaksanaan

Periode pengisian Survei Kepuasan Layanan TIK Tahun 2025 dimulai tanggal 01 Oktober 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025, yang kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 30 November 2025.

4. Metode Survei

Tingkat kepuasan pengguna layanan TIK diukur menggunakan survei dalam satu periode pengukuran yaitu pada tanggal 01 Oktober 2025 sampai dengan 30 November 2025 dengan responden seluruh pegawai BPOM baik di unit Pusat maupun di UPT serta skala Indeks menggunakan skala 5.

Terdapat 3 (tiga) kategori Layanan dengan masing-masing kategori memiliki beberapa sub layanan dan menyampaikan 2 (dua) pertanyaan untuk masing-masing sub layanan tersebut. Sebelum menjawab pertanyaan, responden terlebih dahulu diminta menyatakan apakah dalam satu tahun terakhir menggunakan masing-masing layanan TIK yang tercantum. Jika responden menyatakan menggunakan layanan tersebut, maka responden akan diarahkan untuk mengisi pertanyaan kepuasan terkait layanan dimaksud:

- 1) Kategori Layanan Aplikasi, 9 Layanan (E-BPOM, Smart BPOM, SIPT, Subsite, TTE, Katalistik (ITSM), BCC, Link POM, BPOM Mobile / Cek BPOM), dengan parameter:
 - a) Layanan aplikasi dapat diakses dengan mudah.
 - b) Petugas responsif dan komunikatif dalam memberikan layanan serta mampu menyelesaikan pertanyaan/keluhan/perbaikan dengan baik.
- 2) Kategori Layanan Lainnya, 8 Layanan (Email BPOM, Simpan BPOM, Pengujian SIT/UAT, Proses Pengajuan APD, Proses Rekomendasi Aplikasi, Layanan Insiden Siber, Layanan Pengujian Aplikasi/ITSA, Layanan Data), dengan parameter:
 - a) Prosedur untuk mendapatkan layanan sangat mudah dan cepat.
 - b) Petugas responsif dan komunikatif dalam memberikan layanan serta mampu menyelesaikan pertanyaan/keluhan/perbaikan dengan baik.
- 3) Kategori Layanan Infrastruktur, 5 Layanan (Penyediaan Internet, Zoom Meeting, Pemeliharaan dan Perbaikannya (Jaringan dan Hardware), Layanan VPS-VPN-

Domain di PDNs, Layanan Permintaan Hosting dan Domain (Server Development)), dengan parameter :

- a) Prosedur untuk mendapatkan layanan infrastruktur TIK sangat mudah dan cepat.
- b) Petugas responsif dan komunikatif dalam memberikan layanan serta mampu menyelesaikan pertanyaan/keluhan/perbaikan dengan baik.

BAB II. HASIL SURVEI KEPUASAN LAYANAN TIK

1. Responden

Jumlah Responden yang telah mengisi Survei Kepuasan Layanan TIK Tahun 2025 sebanyak 1.043 responden dari 6.533 pegawai (15.89 % dari total pegawai di BPOM) dari 53 Balai/ Balai Besar POM, 23 Loka POM dan 33 Unit Kerja Pusat. Target responden yang telah ditentukan sejumlah 436 responden, dengan masing-masing Unit Kerja Pusat dan UPT menyampaikan sejumlah 4 (empat) responden. Capaian responden Survei Layanan TIK Tahun 2025 telah mengisi survei sebesar 239,22 %.

Kebijakan perpanjangan waktu dari sebelumnya berakhir di bulan Oktober 2025 menjadi bulan November 2025 dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada Unit Kerja Pusat dan UPT yang belum mengisi. Namun demikian, sampai dengan berakhirnya *deadline*, masih terdapat 13 unit kerja/UPT yang belum mengisi formulir survei kepuasan layanan TIK Tahun 2025, antara lain:

1. Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan
2. Biro Umum
3. Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Prikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
4. Balai Besar POM di Gorontalo
5. Balai Besar POM di Makassar
6. Balai Besar POM di Pekanbaru
7. Balai POM di Baubau
8. Balai POM di Jember
9. Balai POM di Tanjungbalai
10. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
11. Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah
12. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe
13. Loka POM di Kabupaten Toba

Dengan demikian, dari target seluruh 109 Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM yang harus mengisi survei Layanan TIK, hanya tercapai sebesar 88,07 %.

TABEL 2.1.
REKAPITULASI RESPONDEN SURVEI KEPUASAN LAYANAN TIK PUSDATIN
TAHUN 2025 PER UNIT KERJA

No	Unit Kerja	Jumlah Responden	Persentase
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	1	1,14%
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	19	20,88%
3	Balai Besar POM di Bandung	11	6,88%
4	Balai Besar POM di Banjarbaru	52	59,09%
5	Balai Besar POM di Denpasar	57	52,78%
6	Balai Besar POM di Gorontalo	0	0,00%
7	Balai Besar POM di Jakarta	13	10,24%
8	Balai Besar POM di Jayapura	3	3,95%
9	Balai Besar POM di Kupang	14	18,18%
10	Balai Besar POM di Makassar	0	0,00%
11	Balai Besar POM di Manado	1	1,10%
12	Balai Besar POM di Mataram	5	6,49%
13	Balai Besar POM di Medan	23	17,42%
14	Balai Besar POM di Padang	75	64,66%
15	Balai Besar POM di Palangka Raya	2	2,94%
16	Balai Besar POM di Palembang	1	1,19%
17	Balai Besar POM di Pekanbaru	0	0,00%
18	Balai Besar POM di Pontianak	9	11,39%
19	Balai Besar POM di Samarinda	1	1,22%
20	Balai Besar POM di Semarang	3	2,01%
21	Balai Besar POM di Serang	51	57,30%

22	Balai Besar POM di Surabaya	2	1,39%
23	Balai Besar POM di Yogyakarta	1	0,91%
24	Balai Kalibrasi	3	16,67%
25	Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	0	0,00%
26	Balai Pengujian Produk Biologi	1	4,00%
27	Balai POM di Ambon	1	1,47%
28	Balai POM di Balikpapan	1	4,35%
29	Balai POM di Banyumas	37	100,00%
30	Balai POM di Batam	34	47,89%
31	Balai POM di Baubau	0	0,00%
32	Balai POM di Bengkulu	2	2,63%
33	Balai POM di Bima	25	96,15%
34	Balai POM di Bogor	1	2,38%
35	Balai POM di Dumai	1	3,85%
36	Balai POM di Ende	6	17,65%
37	Balai POM di Indragiri Hulu	1	3,45%
38	Balai POM di Jambi	14	17,72%
39	Balai POM di Jember	0	0,00%
40	Balai POM di Kediri	27	75,00%
41	Balai POM di Kendari	1	1,22%
42	Balai POM di Mamuju	10	16,39%
43	Balai POM di Manokwari	5	7,35%
44	Balai POM di Palopo	28	80,00%
45	Balai POM di Palu	2	2,70%

46	Balai POM di Pangkal Pinang	32	53,33%
47	Balai POM di Payakumbuh	1	2,94%
48	Balai POM di Sanggau	1	3,70%
49	Balai POM di Sofifi	6	10,34%
50	Balai POM di Surakarta	1	2,50%
51	Balai POM di Tabalong	2	8,00%
52	Balai POM di Tangerang	1	2,63%
53	Balai POM di Tanjungbalai	0	0,00%
54	Balai POM di Tarakan	23	54,76%
55	Balai POM di Tasikmalaya	4	11,76%
56	Balai POM di Tulang Bawang	4	19,05%
57	Biro Hukum dan Organisasi	6	7,50%
58	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	13	22,03%
59	Biro Perencanaan dan Keuangan	1	1,23%
60	Biro Sumber Daya Manusia	2	2,44%
61	Biro Umum	0	0,00%
62	Direktorat Cegah Tangkal	14	25,93%
63	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	3	5,77%
64	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	42	73,68%
65	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	31	44,29%
66	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	6	7,89%

67	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	3	3,85%
68	Direktorat Pengawasan Kosmetik	1	1,43%
69	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	6	8,45%
70	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	9	11,25%
71	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	2	2,53%
72	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	11	14,29%
73	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	1	1,89%
74	Direktorat Registrasi Obat	5	3,97%
75	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	1	1,03%
76	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	1	0,86%
77	Direktorat Siber Obat dan Makanan	4	6,90%
78	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	45	83,33%
79	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	0	0,00%
80	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	28	48,28%
81	Inspektorat I	12	20,00%
82	Inspektorat II	9	14,29%
83	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0,00%
84	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	0	0,00%
85	Loka POM di Kabupaten Banggai	1	4,55%

86	Loka POM di Kabupaten Belitung	10	47,62%
87	Loka POM di Kabupaten Belu	2	14,29%
88	Loka POM di Kabupaten Buleleng	1	4,17%
89	Loka POM di Kabupaten Bungo	12	54,55%
90	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	0	0,00%
91	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	2	8,70%
92	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	18	75,00%
93	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	1	4,76%
94	Loka POM di Kabupaten Merauke	1	4,17%
95	Loka POM di Kabupaten Mimika	13	59,09%
96	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	7	31,82%
97	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	22	95,65%
98	Loka POM di Kabupaten Sambas	1	5,00%
99	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	10	43,48%
100	Loka POM di Kabupaten Sorong	5	18,52%
101	Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	8	47,06%
102	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	8	34,78%
103	Loka POM di Kabupaten Toba	0	0,00%
104	Loka POM di Kota Lubuklinggau	1	4,55%
105	Loka POM di Kota Tanjungpinang	1	4,00%
106	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	2	3,33%
107	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	40	40,40%
108	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	1	1,06%

109	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	1	1,22%
-----	--	---	-------

2. Hasil Survei Layanan TIK

Hasil Indeks Kepuasan Layanan TIK Tahun 2025 adalah 4,40. Dari hasil survei tersebut, naik 0,89 dibandingkan dengan hasil survei pada tahun 2024.

Indikator	Tahun 2024	Tahun 2025
Indeks Kepuasan Layanan TIK	3,51	4,40

Adapun hasil survei terhadap layanan TIK oleh Pusdatin, adalah sebagai berikut :

1) Kategori Layanan Aplikasi

- a. Secara umum, seluruh layanan aplikasi yang diajukan dalam survei memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja Unit dan UPT. Peringkat pertama dalam jumlah responden adalah layanan aplikasi BPOM Mobile/Cek BPOM (919 Responden) diikuti dengan layanan aplikasi TTE (886 Responden) dan layanan aplikasi Subsite (760 Responden). Penilaian pada layanan aplikasi BCC mendapat responden lebih rendah dibandingkan layanan aplikasi lainnya yaitu 172 (Responden). Namun demikian bukan berarti layanan aplikasi website tidak berkontribusi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis diunit maupun UPT, hal ini dibuktikan dengan nilai yang diperoleh 4,56, yang artinya responden setuju bahwa layanan aplikasi Website memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja Unit dan UPT.
- b. Layanan aplikasi yang dinilai paling mudah diakses adalah BCC sedangkan layanan aplikasi BPOM Mobile/Cek BPOM dianggap kurang mudah diakses dibandingkan aplikasi lainnya. Namun demikian, bukan berarti Layanan aplikasi BPOM Mobile/Cek BPOM sulit diakses oleh pengguna, hal ini dibuktikan dengan nilai yang diperoleh mendapat nilai indeks 4,26, yang artinya responden setuju bahwa layanan aplikasi BPOM Mobile/Cek BPOM dapat diakses dengan mudah.

- c. Dalam hal Petugas responsif dan komunikatif dalam memberikan layanan serta mampu menyelesaikan pertanyaan/keluhan/perbaikan dengan baik diperoleh pada petugas yang menangani aplikasi BCC. Sedangkan petugas yang mengelola aplikasi Katalistik (ITSM) mendapat nilai lebih rendah dibandingkan aplikasi lainnya. Namun demikian bukan berarti petugas yang menangani keluhan pada aplikasi Katalistik (ITSM) tidak responsif dan komunikatif, hal ini dibuktikan dengan penilaian 4,08, yang artinya responden setuju bahwa petugas pengelola layanan Katalistik (ITSM) responsif dan komunikatif dalam memberikan layanan serta mampu menyelesaikan pertanyaan/keluhan/perbaikan dengan baik.

Tabel 2.2. Rincian Layanan Aplikasi

No.	Nama Layanan	Nilai Indeks 2025	Jumlah Responden Yang Menggunakan
1	<i>Layanan aplikasi dapat diakses dengan mudah</i>		
	E-BPOM	4,43	361
	Smart BPOM	4,41	231
	SIPT	4,40	557
	Subsite	4,52	760
	TTE	4,42	886
	Katalistik (ITSM)	4,29	407
	BCC	4,56	172
	Link POM	4,47	668
	BPOM Mobile / Cek BPOM	4,26	919
2	<i>Petugas responsif dan komunikatif dalam memberikan layanan serta mampu menyelesaikan pertanyaan/keluhan/perbaikan dengan baik</i>		
	E-BPOM	4,37	361
	Smart BPOM	4,39	231
	SIPT	4,09	557
	Subsite	4,39	760
	TTE	4,34	886
	Katalistik (ITSM)	4,08	407
	BCC	4,53	172
	Link POM	4,42	668
	BPOM Mobile / Cek BPOM	4,24	919

Tabel 2.3. Rekapitulasi Layanan Aplikasi

Kesimpulan	Nama Layanan	Nilai Indeks 2025
	E-BPOM	4,40
	Smart BPOM	4,40
	SIPT	4,24
	Subsite	4,46
	TTE	4,38
	Katalistik (ITSM)	4,19
	BCC	4,55
	Link POM	4,45
	BPOM Mobile / Cek BPOM	4,25

2) Kategori Layanan Lainnya

- a. Secara umum, seluruh layanan dalam kategori layanan lainnya memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja Unit dan UPT. Peringkat pertama dalam jumlah responden adalah layanan Email BPOM (1014 responden) diikuti dengan layanan Simpan BPOM (653 responden). Layanan Penilaian pada Layanan Pengujian Aplikasi/ITSA mendapat jumlah responden rendah dibandingkan layanan lainnya yaitu 52 Responden. Namun demikian bukan berarti layanan Layanan Pengujian Aplikasi/ITSA tidak berkontribusi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis di unit maupun UPT, hal ini dibuktikan Layanan Pengujian Aplikasi/ITSA mendapat nilai 4,47, yang artinya responden setuju bahwa Layanan Pengujian Aplikasi/ITSA memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja Unit dan UPT
- b. Layanan yang dinilai sangat mudah dan cepat prosedurnya adalah Layanan Insiden Siber sedangkan layanan Simpan POM mendapat nilai lebih rendah dibandingkan layanan lainnya. Hal ini bukan berarti layanan Simpan POM sulit diakses yang dibuktikan dengan perolehan nilai 4,34, yang artinya responden setuju bahwa layanan aplikasi layanan Simpan POM dapat diakses dengan mudah dan cepat.
- c. Dalam hal Petugas responsif dan komunikatif dalam memberikan layanan serta mampu menyelesaikan pertanyaan/keluhan/perbaikan dengan baik diperoleh pada petugas yang menangani Layanan Data. Sedangkan petugas yang mengelola Simpan POM mendapat nilai lebih rendah dibandingkan aplikasi lainnya. Namun demikian bukan berarti petugas yang menangani keluhan pada layanan Simpan POM tidak responsif dan komunikatif, hal ini

dibuktikan dengan penilaian 4,28 , yang artinya responden setuju bahwa petugas pengelola layanan aplikasi Simpan POM responsif dan komunikatif dalam memberikan layanan serta mampu menyelesaikan pertanyaan / keluhan/perbaikan dengan baik.

Tabel 2.4 Rincian Layanan Lainnya

No.	Nama Layanan	Nilai Indeks 2025	Jumlah Responden Yang Menggunakan
1	<i>Prosedur untuk mendapatkan layanan sangat mudah dan cepat</i>		
	Email BPOM	4,36	1014
	Simpan BPOM	4,34	653
	Pengujian SIT/UAT	4,44	120
	Proses Pengajuan APD	4,40	164
	Proses Rekomendasi Aplikasi	4,48	92
	Layanan Insiden Siber	4,52	65
	Layanan Pengujian Aplikasi/ITSA	4,44	52
	Layanan Data	4,51	227
2	<i>Petugas responsif dan komunikatif dalam memberikan layanan serta mampu menyelesaikan pertanyaan/keluhan/perbaikan dengan baik</i>		
	Email BPOM	4,30	1014
	Simpan BPOM	4,28	653
	Pengujian SIT/UAT	4,40	120
	Proses Pengajuan APD	4,40	164
	Proses Rekomendasi Aplikasi	4,47	92
	Layanan Insiden Siber	4,49	65
	Layanan Pengujian Aplikasi/ITSA	4,50	52
	Layanan Data	4,52	227

Tabel 2.5 Rekapitulasi Layanan Lainnya

Kesimpulan	Nama Layanan	Nilai Indeks 2025
	Email BPOM	4,33
	Simpan BPOM	4,31

	Pengujian SIT/UAT	4,42
	Proses Pengajuan APD	4,40
	Proses Rekomendasi Aplikasi	4,47
	Layanan Insiden Siber	4,50
	Layanan Pengujian Aplikasi/ITSA	4,47
	Layanan Data	4,51

3) Layanan Infrastruktur

- a. Secara umum, seluruh layanan Infrastruktur yang diajukan dalam survei memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja Unit dan UPT. Peringkat pertama dalam jumlah responden adalah layanan Zoom Meeting (921 responden) diikuti dengan layanan Penyediaan Internet (431 responden). Penilaian pada Layanan VPS, VPN dan Domain di PDNs mendapat nilai rendah dibandingkan layanan Infrastruktur lainnya. Namun demikian bukan berarti layanan Layanan VPS, VPN dan Domain di PDNs tidak berkontribusi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis diunit maupun UPT, hal ini dibuktikan semua layanan yang masuk dalam survei mendapat nilai 4,41.
- b. Layanan Permintaan Hosting dan Domain (Server Development) mendapat nilai lebih tinggi dibanding layanan Infrastruktur lainnya pada pertanyaan "Prosedur untuk mendapatkan layanan infrastruktur TIK sangat mudah dan cepat." dengan mendapatkan indeks 4,54, sedangkan layanan Penyediaan Internet mendapat nilai lebih rendah dibanding layanan Infrastruktur lainnya. Hal ini bukan berarti Penyediaan Internet sulit diakses karena nilai yang diperoleh mendapat nilai indeks 4,22.
- c. Dalam hal petugas responsif dan komunikatif dalam memberikan layanan serta mampu menyelesaikan pertanyaan/keluhan/perbaikan dengan baik diperoleh pada petugas yang menangani Layanan Permintaan Hosting dan Domain (Server Development) dengan indeks 4,57. Sedangkan petugas yang mengelola Penyediaan Internet mendapat nilai lebih rendah dibandingkan aplikasi lainnya. Namun demikian bukan berarti petugas yang menangani keluhan pada Layanan Penyediaan Internet tidak responsif dan komunikatif, hal ini dibuktikan dengan mendapat nilai indeks 4,29.

Tabel 2.6. Rincian Layanan Infrastruktur

No.	Nama Layanan	Nilai Indeks 2025	Jumlah Responden Yang Menggunakan
1	<i>Prosedur untuk mendapatkan layanan infrastruktur TIK sangat mudah dan cepat.</i>		
	Penyediaan Internet	4,22	431
	Zoom Meeting	4,48	921
	Pemeliharaan dan Perbaikannya (Jaringan dan Hardware)	4,33	368
	Layanan VPS, VPN dan Domain di PDNs	4,40	159
	Layanan Permintaan Hosting dan Domain (Server Development)	4,54	81
2	<i>Petugas responsif dan komunikatif dalam memberikan layanan serta mampu menyelesaikan pertanyaan/keluhan/perbaikan dengan baik</i>		
	Penyediaan Internet	4,29	431
	Zoom Meeting	4,44	921
	Pemeliharaan dan Perbaikannya (Jaringan dan Hardware)	4,35	368
	Layanan VPS, VPN dan Domain di PDNs	4,43	159
	Layanan Permintaan Hosting dan Domain (Server Development)	4,57	81

Tabel 2.7. Rekapitulasi Layanan Infrastruktur

Kesimpulan	Nama Layanan	Nilai Indeks 2025
	Penyediaan Internet	4,26
	Zoom Meeting	4,46
	Pemeliharaan dan Perbaikannya (Jaringan dan Hardware)	4,34
	Layanan VPS, VPN dan Domain di PDNs	4,41
	Layanan Permintaan Hosting dan Domain (Server Development)	4,56

3. Masukan Responden

Rata-rata responden memberikan pernyataan bahwa layanan TIK yang diselenggarakan Pusdatin sudah baik namun demikian ada beberapa masukan dari responden yang dapat membangun atau memperbaiki layanan TIK di BPOM yaitu :

1. Peningkatan kecepatan dan stabilitas internet/WiFi/LAN di seluruh unit/gedung, termasuk saat acara besar, zoom meeting, dan jam sibuk;
2. Perbaikan dan peningkatan stabilitas aplikasi SIPT (tidak sering error, loading lama, auto-logout, kapasitas server/database, kapasitas upload file, jeda waktu sesi, bisa kembali ke halaman sebelumnya, fitur notifikasi, integrasi dengan modul lain, mengurangi anomali data);
3. Perbaikan BPOM Mobile dan Cek BPOM (lebih responsif, tidak sering error, data NIE selalu update, pencarian mudah, tampilan tidak "downgrade" dari versi lama, mendukung kebutuhan pengawasan di lapangan);
4. Respon atau penindakan ITSM/Katalistik agar jauh lebih cepat, jelas statusnya, lebih komunikatif dan solutif; keluhan tidak dibiarkan berhari-hari/bulan, tidak perlu mengejar via WA pribadi, ada pedoman pemilihan layanan yang tepat;
5. Pengurangan jumlah aplikasi yang terlalu banyak/tersebar; harapan adanya integrasi/super app/satu pintu sehingga data tidak perlu diinput berulang dan user tidak pusing banyak akun/password;
6. Peningkatan kapasitas dan fitur SIMPAN (kapasitas storage lebih besar, bisa view/preview doc/xls/ppt tanpa download, metadata tanggal upload benar, bisa terintegrasi dengan aplikasi lain seperti SIMAKIN, keamanan folder lebih baik);
7. Peningkatan keamanan dan reliability layanan (server tidak sering down, uptime dijaga, bandwidth server ditambah, keamanan data dan audit keamanan siber diperkuat);
8. Lebih banyak sosialisasi dan pelatihan terkait aplikasi/layanan TIK (termasuk katalog layanan), termasuk untuk pegawai yang jarang pakai atau generasi yang kurang akrab dengan TIK, dan pelatihan TIK berbasis kompetensi;
9. Peningkatan kualitas dan responsivitas SDM/PIC TIK (lebih ramah, responsif, peka terhadap kebutuhan UPT, tidak mengabaikan pertanyaan kecil, ada PIC per wilayah/UPT, penambahan SDM bila perlu);
10. Peningkatan kualitas UI/UX berbagai aplikasi agar lebih user friendly, tampilannya modern, jelas alur kerjanya, dilengkapi panduan/pedoman terintegrasi, dan tidak membingungkan user; dan

11. Peningkatan dukungan anggaran dan infrastruktur TIK di UPT (perangkat komputer/laptop berspek memadai, kamera/alat pendukung kegiatan, lisensi software seperti Office, antivirus, tools AI, dan lain-lain).

BAB III. KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

1. Kesimpulan

- a. Secara umum semua layanan TIK yang disurvei rata-rata mendapatkan nilai indeks diatas 4 (empat), yang berarti bahwa rata-rata responden setuju bahwa Layanan TIK yang diselenggarakan Pusdatin dapat diakses dengan mudah, petugas responsif dan komunikatif dalam memberikan layanan serta mampu menyelesaikan pertanyaan/keluhan/perbaikan dengan baik.
 - 1) Kategori Layanan Aplikasi
Aplikasi BCC mendapat nilai paling tinggi dibanding aplikasi lainnya, sedangkan aplikasi Katalistik (ITSM) mendapat nilai lebih rendah dibanding aplikasi lainnya. Namun demikian semua aplikasi mendapat nilai > 4.
 - 2) Kategori Layanan Lainnya
Aplikasi Layanan Data mendapat nilai paling tinggi dibanding aplikasi lainnya, sedangkan aplikasi Simpan BPOM mendapat nilai lebih rendah dibanding aplikasi lainnya. Namun demikian semua aplikasi mendapat nilai > 4.
 - 3) Kategori Layanan Infrastruktur
Layanan Permintaan Hosting dan Domain (Server Development) mendapat nilai paling tinggi dibanding Layanan Infrastruktur lainnya, sedangkan Penyediaan Internet mendapat nilai lebih rendah dibanding Layanan Infrastruktur lainnya. Namun demikian semua Layanan Infrastruktur mendapat nilai > 4.
- b. Indeks Layanan TIK Pusdatin mengalami kenaikan 0,89 dibandingkan tahun 2024. Hal tersebut disebabkan terdapat perbaikan kualitas layanan yang telah ditindaklanjuti oleh Pusdatin. Faktor yang mendukung perbaikan tersebut antara lain:
 - 1) Petugas semakin responsif dan komunikatif dalam memberikan layanan serta mampu menyelesaikan pertanyaan/keluhan/perbaikan dengan baik.
 - 2) Perbaikan kualitas area pelayanan yang dinilai, baik sistem informasi maupun dukungan infrastruktur berkontribusi terhadap peningkatan kinerja unit kerja dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran strategis.

- c. Kurangnya dukungan pendanaan untuk pembelian lisensi antivirus original di lingkungan Unit Kerja Pusat sehingga jumlah antivirus original sangat terbatas. Hal tersebut ternyata menjadi permakluman pegawai yang sebelumnya mendapat fasilitas lisensi disebabkan oleh kebijakan efisiensi pemerintah.
- d. Permasalahan koneksi internet, maka perlu dilakukan penyesuaian paket bandwidth untuk mengakomodir kebutuhan internet, khususnya kebutuhan *meeting online*. Hal ini juga diperlukan dukungan pendanaan untuk meningkatkan bandwidth di Badan POM.
- e. Terdapat masukan dari responden untuk melakukan reviu Kepka Infrastruktur TIK untuk dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

2. Rencana Tindak Lanjut

Beberapa rencana tindak lanjut berdasarkan hasil survei kepuasan layanan TIK tahun 2025, antara lain:

1. Pengusulan rancangan Keputusan Kepala BPOM tentang Standar Infrastruktur TIK terbaru hasil reviu tahun 2025 untuk dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan infrastruktur TIK pada tahun anggaran 2026.
2. Prioritas pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SIPT pada tahun anggaran 2026 untuk memperbaiki kualitas dan bug yang masih ditemukan.
3. Peningkatan Layanan Infrastruktur TIK khususnya untuk penambahan lisensi anti virus, Tools AI, dan Office berlisensi dan terupdate serta penambahan kapasitas internet di lingkungan kantor Badan POM Jakarta Pusat namun dengan tetap mempertimbangkan kondisi anggaran Pusdatin di tahun 2026.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap SLA Layanan TIK di aplikasi Katalistik sehingga dapat diidentifikasi dan dipetakan kendala dan permasalahan terhadap keluhan responden Layanan TIK Pusdatin.